

PRABOWO LIBAS ANGGARAN DAN KORUPTOR

ATASI KEMISKINAN
KEMENSOS
GANDENG KAMPUS

WAJAH BARU
PENDIDIKAN
JAWA BARAT

AKMAL
BAHAGIA DI
BUMI ETAM
CATATAN UNTUK
GUBERNUR
TERPILIH

BERANTAS
SINDIKAT PMI
ILEGAL

MERAH TARGET
PARIWISATA BERSAMA
EFISIENSI ANGGARAN

DARI BAMSOET
HINGGA SULTAN YOGYA
DUKUNG EFISIENSI
ANGGARAN

SIAPKAN 30 NAMA
UNTUK PATRICK
KLUVERT



Rp75.000,-



info indonesia

www.infoindonesia.id

Network

INOVASI UNTUK NEGERI



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781

Email : redaksi@infoindonesia.id



LAPOR MAS WAPRES

PENGADUAN:

LANGSUNG DATANG KE ISTANA WAPRES 📄
SENIN - JUMAT, JAM 08.00 - 14.00 WIB

KONTAK KE WHATSAPP 📄

08111 704 2207

ALAMAT 📍

ISTANA WAKIL PRESIDEN RI,
JLN. KEBON SIRIH NO. 14, JAKARTA PUSAT

EDISI
BULAN
FEBRUARI
2025

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Kelangkaan pasok energi terbukti memang rawan. Yang rawan, mudah rusak, tentu saja terutama hajat hidup orang banyak. Begitu-
ulah salah satu simpulan dari penerapan kebijakan melarang pengecer menjual gas elpiji dalam tabung kemasan tiga kilogram yang biasa disebut sebagai gas (seukuran buah) melon.



22

INFO SUMSEL

Usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru langsung bertolak ke Magelang Jawa Tengah guna mengikuti pembekalan (retret) di Akademi Militer (Akmil) Magelang.



32

INFO DAERAH

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi program unggulan pemerintah dalam sektor kesehatan resmi dimulai sejak 10 Februari 2025 atas persetujuan Presiden RI, Prabowo Subianto.



70

INFO NASIONAL

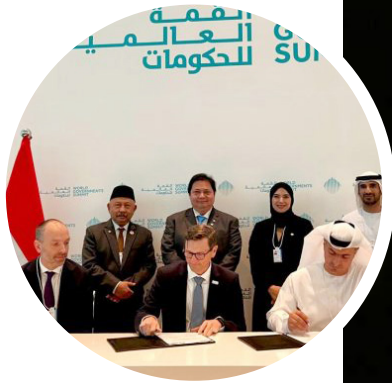
Peringatan Hari Pers Nasional Ke-79 berlangsung di dua kota berbeda pulau. Namun, Presiden Prabowo Subianto menyatakan perbedaan tempat itu dengan pidato ucapan selamat yang bersemangat persatuan.



58

INFO EKONOMI

Para pemangku kepentingan anggaran pemerintah memiliki pandangan beragam tentang penerapan program efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto. Namun, Wakil Ketua Umum Kadin Bambang Soesatyo dan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menjabat Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta justru mendukung kebijakan ini.



66

INFO ISTANA

Di forum dalam maupun luar negeri, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program efisiensi atau penghematan anggaran dengan percaya diri. Kali ini ia mengemukakannya pada pidato secara daring (dalam jaringan internet) di World Governments Summit 2025 --acara yang berlangsung sekali setahun sejak 2013 di Dubai, Uni Emirat Arab.



87

INFO KHUSUS

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang 2024 memecahkan rekor sepanjang lima tahun terakhir. Momentum yang menjadi peluang untuk pengembangan sektor pariwisata pada tahun-tahun berikutnya.

- 3 DARI REDAKSI
- 20 OPINI
- 50 INFO WISATA

- 54 INFO OLAHRAGA
- 86 KAJI

76

INFO NASIONAL

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mempertimbangkan kerja sama pendanaan dan pembangunan melalui investasi, baik dalam maupun luar negeri, menyusul adanya efisiensi anggaran kementerian/lembaga.



SAHIH

Semakin sahih, valid, bahwa kerawanan yang beriringan dengan perubahan iklim adalah masalah pangan, energi, dan air. Kerawanan yang bersifat global atau mondial. Bukan hanya masalah nasional maupun sekadar urusan pribadi atau keluarga.

Di dalam negeri, soal pangan, energi, dan air mengemuka dalam wacana publik maupun peristiwa nyata. Kita mulai saja dengan soal pangan terkait kehendak bersama untuk mandiri berswasembada pangan. Mandiri dan sejahtera bagi para petani produsen, namun harganya terjangkau oleh konsumen. Termasuk menyediakan nilai tambah yang juga dapat menghidupi rantai distribusi dari produsen ke konsumen.

Dalam hal ini pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering giling (GKG) di gudang adalah senilai Rp6.500 per kg. Namun, dari berbagai informasi maupun pengamatan sederhana, terungkap bahwa HPP itu sulit terwujud secara menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto pun mengakui bahwa di berbagai penggilingan padi yang menampung GKG petani, harga yang berlaku sering sekali berada di bawah HPP. Karena itulah Presiden berharap kepada Perpadi (Perhimpunan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia) dapat membeli GKG sesuai dengan HPP. O ya, HPP ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional yang memang memiliki kewenangan untuk itu.

Beralih ke soal energi. Yang mengemuka di awal Februari 2025 adalah antrean warga untuk memperoleh gas bersubsidi dalam tabung berisi tiga kilogram elpiji yang lazim dikenal sebagai gas melon. Di media sosial kita dapat menyimak foto maupun video antrean warga yang hendak membelinya. Pemerintah mengambil kebijakan untuk menata ulang distribusi gas melon ini untuk efisiensi dan ketepatan penerima subsidi. Namun, sosialisasi penerapan kebijakan tata ulang gas bersubsidi ini tampaknya belum menjangkau warga sehingga yang terjadi adalah antrean mengular untuk mendapatkan gas melon tadi.

Energi, termasuk gas elpiji, sudah lama disebut sebagai kebutuhan dasar yang rawan menimbulkan masalah bagi umat manusia di Abad XXI. Tentu saja ini terkait dengan rekam jejak konflik di wilayah yang kaya dengan cadangan energi minyak dan gas. Sebut saja misalnya perang Irak di masa lalu dan perang Ukraina yang belum berakhir.

Untuk Indonesia, memang ada kabar menggembirakan tentang cadangan energi di perut bumi: Blok Warim di Papua yang mulai mengemuka belakangan ini. Sejauh ini Blok Warim diketahui sebagai kawasan dengan cadangan terbesar di Indonesia, melampaui rekor Blok Rokan di Riau yang menghasilkan 11 miliar barel minyak selama sekitar 70 tahun, antara 1951- 2021. Sedangkan potensi cadangan di Blok Warim diperkirakan 2-3 kali lipat dari Blok Rokan. Namun, potensi dan riwayat konflik di Papua juga sudah terbukti sahih.

Bagaimana dengan air? Bangsa kita memiliki dua musim kemarau dan penghujan. Kedua musim itu berpotensi menjadi masalah. Saat kemarau mengalami kelangkaan air, sedangkan pada musim penghujan, menghadapi masalah luapan air. Akan semakin rumit persoalannya jika dikaitkan dengan produksi dan ketahanan pangan bangsa ini.

Dari ulasan ringkas mengenai pangan, energi, dan air, sudah jelas kita memerlukan terobosan kebijakan agar kekayaan melimpah akan lebih bermanfaat (benefit). Bukan memicu sengketa. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

● TELP 021-791 96781
● FAX 021-791 96786

Twitter : @InfoIndonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadh, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI** : Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



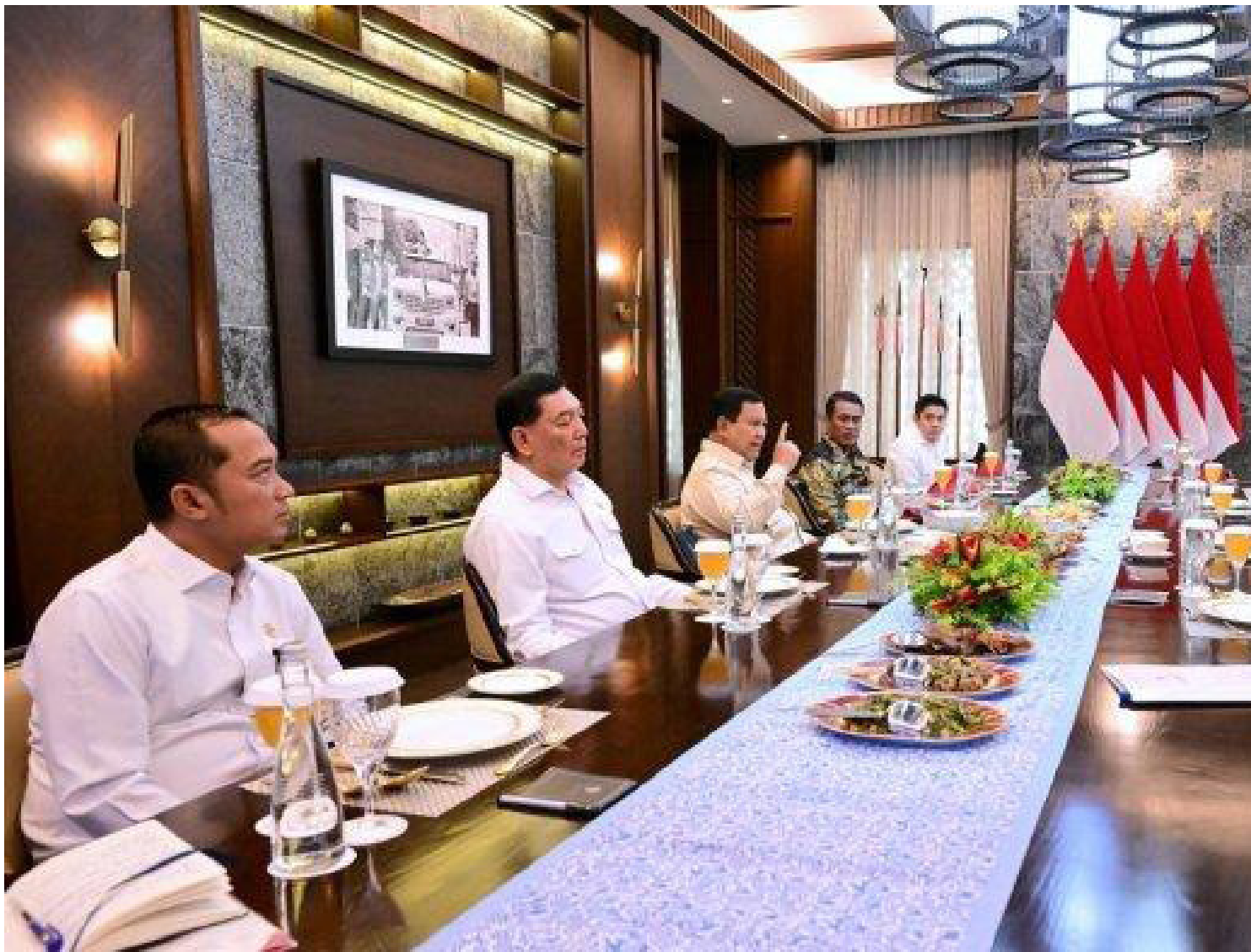
GANGGUAN SEJENAK PASOK GAS MELON

Kelangkaan pasok energi terbukti memang rawan. Yang rawan, mudah rusak, tentu saja terutama hajat hidup orang banyak. Begitulah salah satu simpulan dari penerapan kebijakan melarang pengecer menjual gas elpiji dalam tabung kemasan tiga kilogram yang biasa disebut sebagai gas (seukuran buah) melon.

Bermula dari kebijakan. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu Tepat Sasaran. Keputusan itu ditandatangani pada 27

bisa mendapat pasokan dan jual LPG 3 kg wajib mendaftar untuk menjadi pangkalan dengan batas waktu pendaftaran hingga satu bulan. Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan langkah penataan agar LPG 3kg yang dikonsumsi masyarakat dapat sesuai dengan batas harga yang ditetapkan

nomor induk berusaha (NIB) dengan mendaftarkan diri di sistem Online Single Submission (OSS). "Nomor induk berusaha itu kan diterbitkan melalui OSS. Jadi perseorangan pun boleh. Itu bisa mendaftarkan nomor induk kependudukannya sebagai dasar, kemudian masuk dalam skema OSS.



Prabowo, JK, Bahlil (Sekretariat Presiden RI)

Februari 2023. Yang menandatangani tentu bukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, melainkan menteri sebelumnya, Arifin Tasrif yang menjabat di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, kebijakan semacam itu biasanya memang memerlukan waktu sebelum pelaksanaannya di lapangan.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut, para pengecer agar

oleh pemerintah.

"Jadi yang pengecer justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dahulu," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025, dikutip Sabtu 1 Februari 2025.

Untuk pengecer yang hendak mendaftar agar menjadi pangkalan dan mendapatkan pasokan dan penjualan gas melon, antara lain memiliki

Kita juga sudah integrasikan dengan sistem kependudukan di Kementerian Dalam Negeri," terang Yuliot.

Menurut dia, skema pendistribusian baru gas LPG 3 kg ini dilakukan untuk memutuskan mata rantai penyaluran yang kerap tidak tepat sasaran. "Kita enggak ada istilah naik kelas. Mereka mendaftarkan saja. Justru dari pengecer kalau mereka jadi pangkalan, itu kan justru mata rantainya akan lebih pendek. Ini kan juga ada satu

layer tambahan. Ini yang kita hindari,” ucap Yuliot.

Alhasil, pada awal Februari 2025, saat penerapan kebijakan itu, banyak dampak negatif di lapangan yang tak terbayangkan sebelumnya. Paling tidak, di sejumlah kota dan kabupaten terjadi antrean warga yang ke-



sulitan memperoleh gas melon. Malah antrean mengular itu merengut nyawa seorang ibu warga Kota Tangerang Selatan, Banten bernama Yonih, 62, pada Senin, 3 Februari 2025.

Almarhumah Yonih meninggal dunia usai terjatuh saat dua lengannya menenteng dua tabung gas elpiji 3 kg. Warga Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu diduga kelelahan setelah sebelumnya mencoba mencari gas

elpiji 3 kg untuk dirinya berjualan.

Sebelum meninggal, sekitar pukul 10 WIB, Yonih meninggalkan rumah menuju agen gas elpiji terdekat yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Namun sekitar pukul 11.00 WIB, ada warga yang melihat Yonih sudah jalan sempoyongan. Perempuan lanjut usia itu memang sempat duduk beristirahat sejenak, Namun, akhirnya terjatuh dan kehilangan kesadaran.

Warga yang melihat pun langsung berbondong-bondong membawanya ke rumah yang tak berapa jauh. Ibu berusia 62 tahun itu pun dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 13.30 di rumah sakit terdekat. “Tidak ada

langkah penertiban penjualan gas LPG tersebut dilakukan semata-mata untuk penataan distribusi yang lebih baik.

“Sebagai pemerintah, kami permohonan maaf atas kejadian ini. Penertiban ini semata-mata dilakukan untuk penataan yang lebih baik. Kami akan segera melakukan perbaikan,” ungkap Bahlil di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat, pada Selasa, 4 Februari 2025.

Bahlil juga menyampaikan bahwa ia mendapatkan kabar mengenai meninggalnya nenek Yonih melalui media pemberitaan. Meski begitu, Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan bahwa pe-



Menteri ESDM Bahlil di Istana (Sekretariat Presiden RI)

gejala apa-apa. Pagi kan dagang nasi uduk. Ngobrol sama saya soal gas, terus bilang infonya ada gas mau turun, ya sudah kita siap-siap,” kata Dedi, kerabat korban.

Dedi menduga, korban kelelahan saat mencari dan mengantre gas elpiji 3 kg. Sebab sebelum ikut mengantre dengan warga lain, Yonik harus bangun subuh, memasak nasi uduk dan lauk pauknya, hingga berjualan. Setelah berjualan, dia harus mencari tabung gas melon atau LPG 3 kg yang membuatnya berdiri lama untuk mengantre. “Habis antre, kecapean, sempat duduk sebelum pulang. Enggak ada sakit sebelumnya,” kata dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta maaf atas kejadian yang menimpa Yonih. Ia menjelaskan bahwa

nataan pembelian tabung gas LPG 3 Kg tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi gas tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

“Tujuan kami adalah agar rakyat bisa mendapatkan LPG dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau,” ujar Bahlil, menegaskan komitmen pemerintah untuk penataan distribusi subsidi gas tersebut.

Pada Selasa itu, Menteri Bahlil juga dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Negara. Salah satunya agendanya adalah mendampingi Presiden bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 HM Jusuf Kalla.

Ia mengungkapkan, Jusuf Kalla menyoroti kebijakan terkait LPG yang sudah ada sejak masa jabatannya sebagai Wakil Presiden. Ya, Pak JK berbiacara tentang LPG, bahwa kebijakan ini

• INFO UTAMA

sudah ada sejak beliau menjabat sebagai Wakil Presiden di periode pertama,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan.

Bahlil menjelaskan bahwa Jusuf Kalla menekankan pentingnya penataan agar harga gas LPG 3 kg bisa merata di seluruh lapisan masyarakat. Menurut dia, salah satu kebijakan yang diambil adalah menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan.

Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini mengemukakan, distribusi gas 3 kg dimulai dari Pertamina ke agen dengan harga sekitar Rp12 hingga Rp13 ribu, kemudian dari agen ke pangkalan seharga

la juga mengungkapkan, masyarakat tetap harus menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) saat membeli gas elpiji 3 kilogram (kg) di pengecer. Hal ini, kata dia, agar distribusi gas elpiji 3 kg tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau enggak pakai KTP mau pakai apa? Kalian mau LPG 3 kilo ini dipakai dioplos baru dikasih ke industri. Nanti subsidi kita ini gimana. Itu mak-sudnya,” kata Bahlil

Menurut dia pemerintah ingin masyarakat dapat membeli gas elpiji 3 kilogram dengan harga yang murah dan terjangkau. Pasalnya, selama ini

jelek banget lah,” ucap Bahlil.

“Tapi apa yang terjadi, harga (elpiji 3 kilogram) kita itu ada yang Rp25.000 sampai Rp30.000 ribu. Artinya subsidi kita ini banyak yang tidak tepat sasaran, itu satu dari sisi harga,” sambung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Toh antrean mengular tetap berlangsung. Di kawasan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, misalnya, puluhan warga rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan elpiji 3 kilogram (kg) di agen resmi pada Selasa, 4 Februari 2025.

“Saya dapat informasi sejak pukul 09.30 WIB warga sudah lama men-



Antre Elpiji. (akun X @cingreborn)

Rp16 hingga Rp17 ribu. Namun, dari pangkalan ke pengecer, Pertamina kesulitan mengendalikan harga, yang kadang mencapai di atas Rp20 ribu, bahkan hingga Rp30 ribu.

Lebih lanjut, Bahlil menambahkan bahwa subsidi untuk masyarakat terkait gas 3 kg belum mengalami perubahan sejak era Jusuf Kalla. Sementara itu, kurs rupiah terhadap dolar Amerika terus meningkat. “Di masa itu, kurs dolar, menurut Pak JK, masih Rp8 ribu. Sekarang sudah mencapai Rp16 ribu,” tandas Bahlil.

banyak pengecer yang menjual gas elpiji 3 kilogram dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kita melakukan penataan ini kan dalam rangka memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran, karena kita itu subsidinya itu Rp87 triliun per tahun dengan perhitungan per galon (tabung gas) itu per tangki itu maksimal harganya sebenarnya di angka Rp18.000-Rp19.000. Udah paling jelek-jelek banget kalau ada mark up itu udah paling jelek Rp20.000, udah

gantre,” kata Iwan seorang penjual makanan siap saji pecel lele kepada wartawan. Ia mengaku sudah kesulitan mendapatkan elpiji sejak sepekan lalu atau tepatnya saat perayaan Imlek, pergantian tahun dalam kalender warga keturunan Tionghoa.

Perkembangan berikutnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan Presiden Prabowo menginstruksikan agar para pengecer dapat menjual lagi gas melon bersubsidi itu mulai Selasa, 4 Februari juga. Namun, sambungnya, ke depan para

pengecer itu harus terdaftar sebagai subpangkalan gas bersubsidi LPG 3 kg.

"Tapi, melihat situasi dan kondisi tadi (kesulitan warga mendapat gas) Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar pengecer bisa jualan kembali sampai kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan," kata Dasco.

"Administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," ujarnya mengulang pernyataan Prabowo yang juga Ketum Gerindra itu.

Dasco memastikan pula stok LPG 3 kg tidak mengalami kelangkaan. Ia pun

kembali diperbolehkan menjual gas liquefied petroleum gas atau LPG bersubsidi 3 kilogram kembali per Selasa ini juga. Hasan menyatakan langkah itu diambil untuk menyetop kesulitan akses LPG di tengah masyarakat. "Hari ini para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat," kata Hasan.

Ia mengatakan bersamaan dengan itu para pengecer diminta mendaftar di aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP) agar terdaftar sebagai subpangkalan resmi. Selanjutnya, kata dia, Pertamina akan mendorong para pengecer mendaftar sebagai sub

3 kilogram (kg) tanpa ada persiapan, padahal para pengecer adalah mata rantai terakhir dari distribusi. Hasilnya, menurut Sugeng, kekacauan timbul dari keputusan melarang pengecer berjualan elpiji bersubsidi tersebut.

"Sekali lagi, mekanisme yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM secara mendadak itulah yang mengakibatkan panic buying. Sehingga terjadilah antre panjang betul. Karena tadi mata rantai terakhir dipotong dengan mendadak tanpa menggantikan infrastruktur atau mata rantai lain," ujar Sugeng.

Untuk itu, Sugeng berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto



Antrean panjang di pangkalan gas 3 Kg. (uby.pasjabar)

memastikan pemerintah akan membuat regulasi supaya harga LPG 3 kg dari pangkalan ke pengecer tidak terlampau mahal ke depannya. "Makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal," kata dia.

Ia pun memastikan tak ada kelangkaan stok LPG bersubsidi 3 kg. "Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka," katanya.

Terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengonfirmasi bahwa para pengecer

pangkalan resmi guna melindungi rakyat sebagai konsumen terakhir.

"Dengan terdaftar resmi di aplikasi MAP sebagai sub pangkalan, maka harga di tingkat konsumen bisa terjaga. Begitu pula distribusi gas elpiji 3kg bisa disalurkan ke tangan rakyat yang benar-benar berhak mendapatkannya," ucapnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto menyebut bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil tindakan melarang pengecer berjualan elpiji

yang telah membuka kembali rantai terakhir dari distribusi gas elpiji subsidi. Dia berharap, situasi yang kacau akibat kisruh elpiji 3 kg bisa kembali normal ke depannya.

"Kritik kita kepada Kementerian ESDM, selaku regulator dan juga pembuat kebijakan, agar hati-hati menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi harus melalui sosialisasi yang tuntas dan sebagainya kalau mau melakukan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang terjadi seperti kemarin," tandasnya. • Editor: GE

ELPIJI, KUDETA, DAN RESHUFFLE

Sempat menjadi wacana bahwa kelangkaan elpiji dapat memicu upaya menyudutkan pemerintah. Ramalan Hard Gumay tentang kemungkinan kudeta ikut dibawa-bawa.

Seiring kelangkaan gas elpiji kemasan tiga kilogram, sejumlah media dalam jaringan internet memuat ramalan Hard Gumay tentang kemungkinan kudeta pada 2025. Tambahan pula, belasan unjuk rasa sudah terdaftar di instansi kepolisian. Wacana reshuffle, perombakan kabinet menteri, muncul pula ke permukaan.

Meski begitu Hard Gumay menegaskan

pan Hard Gumay.

Toh rantai pasok gas elpiji bersubsidi mulai lancar sejak Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan warung-warung pengecer dapat menyediakan gas melon untuk warga yang membutuhkan. Jadi, urusan menyudutkan pemerintahan bahkan penggulingan kekuasaan yang dipicu oleh kelangkaan gas tiga kilogram dan antrean mengular warga yang kesulitan mendapatkannya



Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi (Dok. PCO)

kan kudeta yang ia ramalkan itu akan gagal. "Tahun depan (2025) diserang, dilancarkan sama dia, dijalanin sama dia, jadi dia mulai menghasut sana, menghasut sini, ngajak sana, ngajak sini, ngarangkul sana, ngerangkul sini, tapi tidak berhasil," begitu antara lain kutipan uca-

boleh dibilang sekadar wacana.

Namun, Kantor Berita Nasional Antara melaporkan, Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya dan Sekitarnya mengerahkan sebanyak 3.279 personel untuk mengamankan unjuk rasa di sejumlah titik Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

"Melibatkan sebanyak 3.279 personel yang terdiri dari 3.099 personel dari satuan tugas daerah (Satgasda) dan 630 personel dari satuan tugas resor (Satgasres)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan resmi.

Ade Ary menjelaskan total sasaran pengamanan sebanyak 17 titik di antaranya yaitu area Gedung DPR/MPR RI 1.542 personel, Kementerian ESDM RI sebanyak 503 personel, Kedubes Malaysia 556 personel. "Kemudian KPK 95 personel, PN Jaksel 45 personel, area Istana Negara 120 personel, area silang Monas barat daya 95 personel, area Sapta Pesona 183 personel," katanya.

Kemudian, Ade Ary menyebutkan untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional melihat eskalasi di lapangan.

cara sejuk dan damai, tidak ada ujaran kebencian dan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas," katanya.

Kepada para koordinator lapangan dan orator, Ade Ary mengingatkan agar berorasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa, lakukan aksi unjuk rasa dengan damai. "Tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum, hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas," kata Ade Ary.

Kesiagaan personel Polda Metro Jaya pada Kamis, 6 Februari 2025 itu masih berkaitan dengan unjuk rasa ratusan buruh yang berlangsung sehari sebelumnya di depan Kantor Kementerian ESDM. Unjuk rasa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

bersubsidi sejak 1 Februari 2025.

Said Iqbal mengemukakan, unjuk rasa di depan Kementerian ESDM itu mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan gas elpiji 3 kg bagi masyarakat dan memastikan tidak terjadi kelangkaan, mengembalikan sistem penjualan gas elpiji 3 kg ke tingkat eceran atau warung seperti sebelumnya, dan memecat Menteri ESDM karena dianggap gagal menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil.

Dia menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah jelas menyampaikan ketersediaan gas elpiji 3 kg tidak dilarang beredar di pengecer atau warung-warung kecil. "Sepuluh ribu buruh akan aksi kembali di depan kantor kementerian ESDM dan di DPR RI," ujar Said Iqbal.

Menurut dia, ada ratusan ribu



Mensesneg Prasetyo Hadi (Ist)

"Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkatkan maka diadakan penutupan jalan," katanya.

Ia juga mengimbau kepada peserta unjuk rasa agar tetap berpedoman pada regulasi sesuai aturan hukum yang berlaku. "Silahkan sampaikan aspirasi se-

dan Partai Buruh pada Rabu, 5 Februari 2025 itu, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, merupakan bentuk protes terhadap kelangkaan gas elpiji 3 kg yang terjadi di berbagai daerah akibat kebijakan pemerintah yang melarang pengecer menjual gas

pengecer terdampak oleh kelangkaan gas elpiji 3 kg, dan juga membuat sulit masyarakat. "Kurang lebih 370 ribu pengecer termasuk warung, toko-toko kelontong, dan toko-toko kecil lainnya," sambungnya.

Menanggapi pernyataan Menteri

ESDM, Bahlil Lahadalia, bahwa kelangkaan gas elpiji karena ingin menata ulang distribusi gas elpiji bersubsidi, Said Iqbal mempertanyakan kesiapan penerapan kebijakan itu di lapangan. Ia mempertanyakan data jumlah pangkalan untuk mengantisipasi antrean yang mengular.

"Pelosok-pelosok negeri itu pangkalan-pangkalan hanya beberapa saja. Total pangkalan seluruh Indonesia saja hanya 4 ribu pangkalan. Bahkan akibat dari itu, kita temui dari berita ada orang tua perempuan meninggal, terbunuh," tandas Said Iqbal.

Bagaimana dengan poin ketiga desakan KSPI dan Partai Buruh agar Menteri ESDM dipecat? Ini berarti reshuffle kabinet. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan belum ada rencana reshuffle kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.

"Hah reshuffle apa? Nggak ada reshuffle, belum," kata Prasetyo saat ditanya terkait isu reshuffle kabinet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, (6/2/2025).

Prasetyo yang dikutip Kantor Berita Nasional Antara menegaskan, saat ini kabinet pimpinan Prabowo Subianto tersebut sedang fokus bekerja. "Belum, lagi kerja, lagi kerja," kata dia seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya tidak segan menindak para menteri yang tidak becus bekerja. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2025 malam.

Presiden pun mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih untuk mengoreksi diri. "Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya

dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan dia menginginkan pemerintahan yang dia pimpin bebas dari penyelewengan dan korupsi. Oleh karena itu, dia memastikan akan



Silahkan sampaikan aspirasi secara sejuak dan damai, tidak ada ujaran kebencian dan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas.

menindak orang yang tidak mau mewujudkan hal itu.

"Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu

ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak," ujarnya.

Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Prabowo adalah sosok yang terbuka dan hal itu berarti sinyal warning. "Saya pikir kan Pak Prabowo itu orangnya terbuka, kalau dia sudah bicara terbuka artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing," ujar Dasco, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

Toh Dasco menegaskan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. "Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal," tandas Dasco.

Terkait wacana reshuffle, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan partai tak khawatir soal isu Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar bakal direshuffle. Kata Doli, Bahlil hanya menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Presiden Prabowo.

"Ya biasa saja. Selama... Yang penting Presiden kasih tugas apa, dikerjakan. Kira-kira gitu," ujar Doli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

Doli pun yakin tidak ada perbedaan sikap antara Prabowo dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait kebijakan melarang pedagang eceran menjual gas elpiji 3 kg.

"Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin," kata Doli

Doli menambahkan, kebijakan Bahlil yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sebenarnya memiliki niat baik demi mengatur tata niaga soal gas elpiji subsidi.

"Tak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang menga - rang-

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia (Ist)

mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari Presiden,” sambungnya.

Ia menjelaskan, setiap partai pasti memberikan kader terbaik mereka untuk membantu Prabowo. Ia menanamkan, seluruh kader Golkar termasuk Bahlil merupakan orang-orang terbaik.

“Ada delapan kader terbaik kami, termasuk ketua umum kami Iho ya. Ketum itu kan adalah kader terbaik partai. Makanya karena dia terbaik, makanya dipilih jadi ketum,” kata Doli.

Ia mengatakan, dalam menjalani tugas-tugas pastilah ada tantangan-

luruh kader Golkar itu bekerja secara maksimal, loyal terhadap Presiden, berdedikasi pekerjaannya kepada kepentingan rakyat dan bangsa,” sambungnya.

Di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan keputusan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. “Yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi, ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi, soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu

demikian, para pemangku jabatan tersebut bisa mengemban tugasnya dengan baik dan tidak melakukan pekerjaan dengan motif-motif lain di luar kepentingan masyarakat Indonesia.

“Ini peringatan yang berlaku umum. Jadi, siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi,” katanya.

Saat menyampaikan arahan untuk Kabinet Merah Putih, Presiden juga tidak hanya memberikan peringatan agar KMP bertugas melayani rakyat, tetapi juga memberikan apresiasi apa-



Demo Partai Buruh di depan Kantor Kementerian ESDM (Ist)

nya yang harus dihadapi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. “Bahwa kemudian ada tantangan yang dihadapi di lapangan, ya itu kita hadapi tanggung jawab kita masing-masing. Sudah pekerjaannya gitu. Dan yang bisa mengukur itu adalah Presiden,” ujar dia.

Menurut dia, seluruh kader Golkar bekerja secara maksimal dan loyal terhadap Prabowo. “Tapi yang jelas se-

betul-betul hanya Presiden yang tahu,” kata Hasan kepada wartawan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025.

Hasan mengemukakan, pernyataan Presiden Prabowo itu merupakan pesan yang selalu disampaikan kepada anggota Kabinet Merah Putih agar dapat bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan fokus terhadap itu. Dengan

bila program yang dikerjakan anggota kabinetnya berhasil. Hal ini membuktikan bahwa pesan yang disampaikan kepada anggota KMP diterima dengan benar dan dikerjakan untuk kepentingan rakyat.

“Jadi, Presiden juga senantiasa memberikan apresiasi. Kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan,” tandas Hasan. • Editor: GE

MITIGASI DAN TINDAK LANJUT PASCA ANTREAN

Antrean pasok elpiji 3 kg bersubsidi hingga menimbulkan antrean mengular mulai terurai. Bagaimana tindak lanjut kebijakannya?

Bogor adalah kabupaten dengan penduduk terbanyak di Indonesia, lebih dari lima juta warga, sehingga layak menjadi contoh penyaluran gas elpiji bersubsidi dalam tabung 3 kilogram. Dalam menerapkan kebijakan distribusi elpiji 3 kg ini, Kepala Bidang Tertib Niaga Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor,

tertinggi (HET) gas LPG 3 kg di Kabupaten Bogor ditetapkan pada angka Rp18.700. Harga ini berlaku dari pangkalan hingga agen, dan pengendalian harga dilakukan pada titik-titik tersebut.

Anton mengungkapkan pula, mekanisme distribusi gas LPG 3 kg dimulai dari stasiun pengisian elpiji curah (SPBE) yang kemudian turun ke agen, lalu ke pangkalan, dan selanjutnya ke



emak-emak Bogor (Pemprov Jabar)

Anton Sudjana saat melakukan peninjauan ketersediaan gas LPG 3 kg di wilayah Kecamatan Babakan Madang dan Ciawi pada Selasa, 4 Februari 2025.

Menurut Anton, sebagaimana dikutip portal web resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, harga eceran

pengecer. Namun, untuk menghindari konteks dan ketidaksesuaian harga, pengendalian harga dilakukan sampai pada tingkat pangkalan.

"Pangkalan saat ini tidak melakukan penjualan langsung ke pengecer. Ini adalah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Pengecer

er harus menjadi sub-pangkalan yang terdaftar dalam aplikasi untuk memastikan harga dapat dikendalikan dengan baik,” ungkap Anton.

Anton juga menjelaskan bahwa surat edaran tersebut dikeluarkan untuk menanggulangi ketidaksesuaian harga yang selama ini terjadi di lapangan, serta untuk memastikan gas LPG 3 kg diperuntukkan bagi UMKM dan rumah tangga sesuai dengan tujuan. Kebijakan ini bertujuan agar harga gas tetap terkendali sesuai dengan HET yang telah ditetapkan, yakni Rp18.700 per tabung.

Meskipun awalnya ada kekhawatiran dari masyarakat terkait kesulitan dalam membeli gas LPG, Anton meny-

“Dengan aplikasi MAP (Merchant Application Pangkalan) yang sudah dibuka kembali, pengecer yang nantinya menjadi sub-pangkalan kini bisa langsung mengambil gas dari pangkalan seperti biasa. Harapan kami, harga gas akan tetap stabil dan sesuai dengan HET yang telah ditentukan,” tambah Anton.

la menegaskan, selain bertujuan mengendalikan harga sesuai dengan HET, kebijakan ini hendak memastikan bahwa gas LPG 3 kg tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Namun, pelaksanaan di lapangan menghasilkan beberapa temuan.

Hasil pengecekan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Polri Brigjen. Pol. Helfi Assegaf mengemukakan antara lain antrean timbul karena pendistribusian gas elpiji bersubsidi 3 kilogram kini terpusat di pangkalan.

“Memang kita temukan sejak ada surat edaran terkait masalah perubahan pendistribusian yang dulu masih ada pengecer, saat ini langsung oleh agen-agen atau sub-penyalur,” ujarnya.

Alhasil, pasok gas elpiji 3 kg yang semula menyebar dari satu pangkalan menjadi beberapa penyalur atau pengecer pun terhambat. “Karena fokus di satu tempat (pangkalan) maka terjadi antrean di beberapa tempat,” kata Helfi, dikutip pada Selasa, 4 Februari 2025.

la menambahkan, faktor kedua ter-



Wamen Yuliot Tanjung (BPH Migas)

ampaikan bahwa saat ini, Pertamina telah membuka kembali aplikasi Monika bagi pengecer untuk menjadi sub-pangkalan dan mengakses langsung pasokan LPG. Dengan demikian, pengecer dapat membeli langsung dari pangkalan tanpa perlu menunggu prosedur tambahan.

Polri melakukan pengecekan terkait maraknya antrean gas LPG 3 Kg, misalnya, menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan antrean mengular warga. Usai memantau antrean di Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan Banten, Dirlitpideksus Bareskrim

dapat temuan pengurangan pasokan gas elpiji bersubsidi 3 kg, dari supplier (pemasok) ke agen atau ke pangkalan. Dia menyebut, biasanya 280 unit per-hari kini menurun menjadi 130 unit per-hari.

“Terjadi penurunan suplai ke agen atau ke pangkalan yang tadinya perha-

ri itu 280 tabung, LPG 3 kg. Saat ini hanya 130 per hari. Ini hasil pengecekan kita ya, belum ke wilayah lain,” ujarnya.

Terkait hal ini, Helfi menyampaikan telah mengintruksikan ke Satgasda untuk segera turun mengecek dan mengawasi stok dan distribusi gas elpiji bersubsidi 3 kilogram. “Apakah sama dengan yang kita lakukan ini hasilnya, nanti akan dikumpulkan di laporan kami dan kami akan laporan kepada pimpinan,” ujar dia.

pihak yang mengambil kesempatan di tengah polemik LPG 3 kg bersubsidi ini. Yuliot mengatakan, urusan penimbunan tersebut menjadi perhatian Kementerian ESDM bersama aparat kepolisian.

“Jadi untuk penimbunan, kita kan juga bekerja sama dengan kepolisian. Jadi kan indikasinya ada terjadi penimbunan di beberapa titik,” kata Yuliot Tanjung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Sabtu (8/2/2025).



Menteri ESDM Bahliil (Kementerian ESDM)

Penurunan pasok yang dikemukakan Helfi dapat menjadi indikasi penimbunan. Soal ini diakui oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung yang menyatakan praktik penimbunan LPG 3 kilogram memang terjadi di beberapa titik.

Dia mengingatkan agar tidak ada

Dia menegaskan tidak boleh ada pihak yang menimbun gas LPG 3 kg. Pasalnya, pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat karena kesulitan mendapatkan gas melon tersebut. Belum lagi jika harganya melambung tinggi akibat terbatasnya stok.

“Jadi kita menghendaki itu jangan

terjadi penimbunan. Itu justru kebutuhan masyarakat, jadi jangan ada yang berspekulasi. Jangan ada yang mengambil kesempatan juga di situ,” kata Yuliot.

Ia menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi bersama merespons dugaan penimbunan tersebut. “Ya, ini kita juga melakukan evaluasi bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga, termasuk dengan aparat hukum,” tandasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menimbun gas 3 kg.

Soedeson mengaku menerima laporan bahwa ada individu yang membeli hingga 20 tabung elpiji 3 kg. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan gas subsidi dengan harga resmi, yakni Rp18.000 per tabung.

“Ada yang kemudian menemukan satu orang bisa beli sampai 20 tabung. Sehingga itu menyebabkan kelangkaan. Harga resmi Rp18.000 bisa naik berlipat,” kata Soedeson dalam keterangannya, Rabu, 5 Februari 2025

Selain penimbunan, Soedeson juga menyoroti praktik pemindahan isi tabung elpiji 3 kg ke tabung yang lebih besar. Gas yang seharusnya disubsidi untuk masyarakat kecil itu kemudian dijual secara komersial tanpa subsidi.

“Ada yang membeli beberapa tabung terus ditransmisikan ke tabung yang lebih besar untuk dijual secara komersial tanpa subsidi. Itu kan merugikan masyarakat dan merugikan negara,” ucap Soedeson.

DPR pun berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah efek negatif dari kebijakan baru distribusi gas melon ini. Alhasil, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengintruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.

Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan. “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung

DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025

Setelah komunikasi, kata Dasco, Presiden menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan," tandasnya.

Tindak lanjut berikutnya, pengawasan distribusi gas melon elpiji 3 kg itu akan menjadi tugas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). "Ya sementara kalau untuk pengawasan hanya melalui jaringan itu yang dilakukan pengawasan oleh BPH Migas. Jadi ya kita juga kalau bisa diintegrasikan seluruh pengawasan itu dilakukan oleh BPH Migas. Jadi mung-



Terjadi penurunan suplai ke agen atau ke pangkalan yang tadinya perhari itu 280 tabung, LPG 3 kg. Saat ini hanya 130 per hari. Ini hasil pengecekan kita ya, belum ke wilayah lain.

kin maksud dari Pak Menteri seperti itu," kata Wamen ESDM Yuliot Tanjung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.

Dia menerangkan, saat ini pengawasan BBM subsidi dan jaringan gas (jargas) berada di BPH Migas. Nantinya, pengawasan soal penyaluran LPG 3 Kg juga akan diintegrasikan di badan tersebut.

Menurut Yuliot, penambahan tugas ke BPH Migas itu bisa dilakukan. Pasalnya, badan usaha yang menyalurkan LPG 3 kg itu sama dengan penyalur BBM Subsidi, yakni PT Pertamina (Persero).

"Jadi kita akan mengefektifkan, tugas yang ada di lingkungan kementerian ESDM dan juga ini pengawasan itu bisa dilakukan sekaligus karena badan

usaha yang diawasi itu pada umumnya sama. Jadi baik yang mendistribusikan minyak maupun yang mendistribusikan gas," sambungnya.

Rencana pembentukan badan pengawas LPG 3 kg sebelumnya diungkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ini jadi upaya untuk menyalurkan 'gas melon' itu tepat sasaran. "Kami jujur dari Kementerian ESDM yang diberikan tugas kepada Pertamina Patra Niaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya akan membentuk badan khusus untuk melakukan penataan, supaya rakyat benar-benar dapat harganya yang pas, terjangkau, sesuai dengan pemerintah," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat sidang pangkalan LPG 3 kg di

transaksi dapat dikontrol melalui sistem digital yang telah disiapkan oleh PT Pertamina (persero).

"Dengan pengecer naik menjadi subpangkalan, itu sudah akan dimasukkan aplikasinya. Supaya kita tahu dia jual ke siapa, harganya berapa, supaya tidak ada markup dan juga dijual ke oplosan. Itu maksudnya," jelasnya.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tetap berjalan dengan baik dan harga jualnya tetap terkendali. "Harganya tetap sesuai dong," pungkas Bahlil.

Terkait skema pengawasan dan pelaporan, Wamen Yuliot menyebut prosedurnya akan sama seperti laporan penyalur BBM subsidi. Pada konteks ini,



Hefli Assegaf (Mabes Polri)

Pekanbaru, Rabu, 5 Februari 2025.

Sebagai tindak lanjut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait kembalinya penjualan tabung LPG 3 Kg di pengecer, Bahlil menemukan harga di salah satu pangkalan LPG 3 Kg di Pekanbaru sesuai ketentuan pemerintah. "Alhamdulillah, hari ini saya di Riau di pangkalan ini bagus sekali. Harganya Rp18.000. Rp18.000 itu rakyat beli langsung. Ini yang pemerintah mau seperti ini. Jadi harga masyarakat itu harus dapat dengan harga di bawah Rp20.000," ungkapnya.

Bahlil menegaskan pula, kebijakan mengenai pengecer tidak dibatalkan, melainkan ditata ulang dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan. Langkah ini bertujuan agar

Pertamina ataupun badan usaha lain yang mendapat mandat penyaluran akan melaporkannya ke BPH Migas.

"Ya strukturnya untuk pelaporan seperti di minyak itu kan seluruh badan usaha penyalur minyak itu kan harus melaporkan kepada BPH Migas. Jadi nanti juga ia menyalurkan untuk LPG itu apa saja badan usahanya itu juga akan membuatkan laporan kepada badan pengawas," kata Yuliot.

Ia menegaskan, pihaknya akan merubah regulasi soal tugas BPH Migas. Terutama nantinya akan memuat soal pengawasan penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi. "Dalam hal ini kita akan mengubah regulasi terlebih dulu menambahkan beban kerja untuk BPH Migas," tandasnya. • Editor: GE

NEGARA VS CUKONG



Oleh: Adi Prayitno
Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta
Direktur Eksekutif Parameter Politik

Kasus pagar laut gaib di Kabupaten Tangerang memantik perdebatan serius soal negara versus cukong yang cukup pelik. Cukong adalah istilah lain dari pemilik modal besar yang memiliki kekuatan ekonomi luar biasa.

Meski sudah dibongkar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan TNI Angkatan Laut, aktor utama pemasangan pagar laut tersebut belum juga bisa diungkap secara eksplisit.

Semua pihak berkeyakinan bahwa pemasangan pagar laut sepanjang 30 kilometer tak mungkin dilakukan kalangan biasa. Meminjam istilah Titiek Soeharto, kalau bukan perusahaan besar, tak mungkin sanggup membuat pagar laut sebesar itu karena butuh keahlian khusus, modal besar, dan kekuatan sumber daya memadai. Bahkan, politisi Gerindra itu meminta semua kementerian tidak takut melawan oligarki.

Pernyataan Titiek Soeharto terang benderang mengonfirmasi mastermind di balik pemasangan pagar laut di tanah Banten pastilah cukong besar yang sulit disentuh.

Sebelum ada perintah langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menyegel, mencabut, sekaligus mengusut, terlihat sekali negara kelihatan gagap menghadapi persoalan sepele semacam ini. Negara yang dimaksud adalah pihak terkait, yakni KKP dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) yang terkesan canggung merespons desakan publik mengungkap dalang kasus spektakuler di Tanah Jawa.

Awalnya, pihak KKP protes besar saat TNI Angkatan Laut membongkar pagar laut yang disinyalir bisa dijadikan bukti sah aktivitas ilegal. Tindakan pembongkaran dituding bisa menghilangkan barang bukti. Begitu juga Kementerian ATR/ BPN yang sangat hati-hati dalam pernyataan resminya.

Situasi berubah total setelah ada perintah dari Presiden serta desakan DPR supaya persoalan pemagaran laut di-

tuntaskan.

Dua kementerian yang semula tampak kikuk langsung bergerak cepat. KKP menyatakan, sertifikat di laut tindakan ilegal. Kementerian ATR/BPN juga langsung mencabut sejumlah sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang dianggap cacat prosedur.

Proses berbelit-belit semacam ini mengindikasikan persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang tak semudah membalik telapak tangan. Sebab, yang dihadapi bukan pihak "kaleng-kaleng", melainkan oligarki yang gurita bisnisnya kuat.

Hanya instruksi langsung Presiden dan dukungan politik penuh parlemen yang dapat mengatasi semua kekisruhan. Pada tahap ini negara perlahan mulai menunjukkan wajah aslinya yang berdaulat.

Oligarki, kata Jeffrey A Winters, merujuk pada kalangan tertentu, jumlahnya segelintir orang dengan kekuatan ekonomi raksasa. Pengaruhnya cukup kuat tidak hanya di sektor bisnis, tetapi juga merambah ke semua lini kehidupan, termasuk ranah politik. Cengkeraman kekuatan para oligarki di Indonesia sangat luar biasa.

Fenomena "State Capture"

Dalam perspektif ekonomi politik, fenomena rumitnya mengurai persoalan pagar laut di Tangerang mirip apa yang disebut Sarah Bracking (2018) sebagai state capture, yakni adanya upaya individu atau perusahaan untuk membuat regulasi dan kebijakan negara demi keuntungan pribadi mereka dengan memberikan keuntungan tidak sah kepada pejabat publik. Itu artinya, ada titik temu kepentingan antara pihak korporasi dan oknum aparat kekuasaan yang saling berkelindan.

Ratusan sertifikat HGB dan sertifikat hak milik (SHM) menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ada praktik saling menguntungkan (mutual interesting) kedua belah pihak, di pemerintahan sebelumnya.

Jika tak mutual, mungkin saja dalam praktiknya para cukong posisinya lebih dominan di hadapan oknum aparat negara untuk membuat regulasi yang menguntungkan kepentingan ekonomi mereka. Wajar jika kemudian pihak-pihak terkait terlihat gelagapan menyelesaikan persoalan yang terjadi pada masa lampau itu.

Padahal, faktanya jelas berupa pagar laut 30 kilometer, sertifikat HGB, SHM, dan pengakuan nelayan yang merasa dirugikan atas tindakan pemagaran laut. Anehnya lagi, semua pihak, mulai dari mantan menteri terkait saat itu hingga mantan Bupati Tangerang, merasa tidak tahu terkait sertifikat hak guna laut.

Jika dikalkulasi secara rasional, rasanya sulit di negara ini ada cukong yang posisinya bisa mendikte, apalagi mengooptasi, negara. Justru yang terjadi cukong tumbuh besar karena sokongan politik berlimpah oknum aparat

kekuasaan dalam memuluskan agenda ekonomi mereka melalui regulasi yang kesannya prosedural.

Sebut saja, misalnya, soal terbitnya sertifikat HGB dan SHM serta klaim kepemilikan lahan pastinya melibatkan "orang dalam" memuluskan langkah terukur menguasai laut.

Dalam realitasnya yang terjadi sebenarnya adalah praktik kapitalisme negara (state capitalism), di mana para aktor ekonomi dan politikus berpengaruh saling berkongsi berburu keuntungan. Richard Robison dan Vedi R Hadiz (2004) menyebut fakta semacam ini dengan sebutan aliansi politico-business predatory, yaitu perselingkuhan kepentingan pebisnis dengan aktor politik kekuasaan untuk mengakumulasi keuntungan ekonomi sendiri.

Di Indonesia sudah menjadi rahasia umum pemodal kerap

Semua infrastruktur politik dan hukum sangat memadai untuk menyeret aktor utama. Semesta mendukung penuh langkah KKP dan ATR/BPN mengungkap pelaku yang sesungguhnya hingga selesai.

Indikasi dukungan bersumber dari tiga hal. Pertama, perintah Prabowo untuk mengusut persoalan ini hingga tuntas. Kedua, DPR meminta semua kementerian jangan takut pada oligarki. Ketiga, dukungan publik yang cukup kuat.

Apa pun judulnya, kasus pemagaran laut jelas merugikan nelayan, merusak ekosistem laut, dan melukai rasa keadilan.

Percuma pembongkaran terus dilakukan jika dalang pemasangan pagar laut tak bisa dieksekusi. Sikap heroisme semua pihak seakan tak berarti jika cukong tak bisa diusut. Minimal ada kejelasan siapa pihak paling bertanggung jawab.



bersekutu dengan politisi dan birokrat untuk memburu kepentingan ekonomi melalui kebijakan resmi pemerintah, seperti izin usaha, izin bangunan, dan seterusnya.

Hebatnya lagi, hal semacam ini dinilai lumrah, tak melanggar aturan, dan sulit diperkarakan secara hukum. Kecanggihan terhindar dari jerat hukum adalah bagian cerita lain dari kehebatan persekutuan cukong dan aktor kekuasaan.

Mengungkap Aktor Utama

Pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah mengungkap oligarki yang punya andil besar dalam pemagaran laut di Kabupaten Tangerang.

Termasuk kepastian hukum apakah kasus pemagaran laut Kabupaten Tangerang sebatas pelanggaran teknis administratif atau ada unsur pidana. Kejelasan posisi hukum perlu diungkap untuk menghindari kekisruhan berkepanjangan.

Dalam konteks inilah negara harus menunjukkan wibawanya. Menindak tegas pihak yang menginjak harga diri bangsa. Prinsip negara hukum kedaulatan negara di atas segalanya.

Oleh karena itu, bagi publik, ukuran sukses soal pagar laut cuma satu. Mengungkap aktor kunci sekaligus mempertegas posisi kesalahan mereka sebagai pembuktian bahwa negara tidak tunduk pada siapa pun.

Intinya, negara jangan kalah oleh cukong. ●



ANTUSIAS IKUTI RETRET KEPALA DAERAH DI MAGELANG

Usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru langsung bertolak ke Magelang Jawa Tengah guna mengikuti pembekalan (retret) di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Kegiatan retret yang dijadwalkan akan berlangsung selama 8 hari dimulai dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 tersebut diikuti oleh para kepala daerah yang terdiri dari 33 Gubernur, 363 Bupati dan 85 Walikota yang telah dilantik secara serentak oleh Presiden di istana Kepresidenan Jakarta, sehari sebelumnya pada Kamis (20/2/2025).

Gubernur Sumsel Herman Deru sebelum bertolak ke Magelang mengaku sudah menyiapkan diri. Ia pun memahami bahwa di Akmil Magelang terkenal dengan kedisiplinannya, ketangguhan dan bela negara. Ini dapat menjadi bekal dan disana pun dapat menjadi wadah untuk bertukar pikiran, komoditas, atau bertukar sumber daya manusia.

"Itu yang kita harapkan dari retreat

ini bukan hanya bersilaturahmi tapi bagaimana kita menemukan manfaat melalui potensi yang ada sehingga kita bisa bertukar dari komoditas itu," jelasnya.

Setibanya di Magelang, Herman Deru mengaku antusias dalam mengikuti kegiatan retreat tersebut.

"Kegiatan retret ini, sangat bermanfaat untuk para kepala daerah sebelum mulai bertugas di kembali ke daerah masing-masing," ungkapnya.

HD menyebut, akan banyak kegiatan yang akan dijalankan selama di Akmil Magelang, selain itu akan banyak pengetahuan, dan arahan yang didapatnya dari para pembicara atau narasumber sebagai bekal dirinya memimpin Sumsel di periode kedua 2025-2030.

"Akan banyak pengetahuan, dan

arahan yang langsung disampaikan oleh Presiden RI Pak Prabowo Subianto dan beberapa Kementerian termasuk kementerian Dalam Negeri. Bahkan informasinya ada mantan Presiden juga yang akan menjadi narasumber," tegasnya.

Lebih lanjut Herman Deru berharap melalui kegiatan retret ini akan menambatkan kekompakan antar sesama kepala daerah khususnya para Gubernur Se-Indonesia sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

"Sejatinya Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. jadi kegiatan ini sangat kita tunggu-tunggu sebagai bentuk menjalin koordinasi dan kekompakan dalam bekerja dengan tujuan tidak lain untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat," tandasnya.

Serius dan Fokus Ikuti Semua Materi

Kegiatan retreat ini berlangsung selama 8 hari. Meski cukup memakan waktu namun manfaat yang diterima akan sangat besar. Hal ini sangat disadari betul oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru yang selalu fokus dan antusias mengikuti semua materi yang disampaikan.

Untuk diketahui sebanyak 450 kepala daerah yang terdaftar mengikuti retreat diisi dengan sejumlah agenda kegiatan mulai dari olahraga pagi, kegiatan ibadah dan materi wawasan kebangsaan.

Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru dalam mengikuti retreat ini tetap terlihat bugar dan fokus mengikuti berbagai agenda kegiatan.

Bahkan HD terlihat hadir berbaur dengan sejumlah kepala daerah lainnya saat olahraga pagi yang juga dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Setelah sesi ibadah, Gubernur Sumsel Herman Deru juga nampak serius mendengarkan paparan pada sesi materi wawasan nusantara yang akan diberikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Sedangkan pada malam harinya nanti akan ada lanjutan paparan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani terkait dengan pengelolaan anggaran.

Retret kepala daerah adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan orientasi dan peningkatan kapasitas bagi kepala daerah di Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah dan menghadapi tantangan yang ada.

Kegiatan retreat ini menjadi salah satu rangkaian pelantikan kepala daerah secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dimana pelantikan HDCU sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2025-2030 bersamaan dengan 961 Kepala Daerah lainnya yang terdiri dari 33 Gubernur, 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Walikota dan 85 Wakil Walikota.

Presiden Prabowo Subianto dalam

arahannya memberikan semangat kepada 961 kepala daerah yang baru saja dilantik.

Prabowo juga menekankan pentingnya posisi para kepala daerah sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar pemimpin.

"Saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat, saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka, itu adalah tugas kita," tegas Prabowo,

Para kepala daerah diinginkannya, meskipun berasal dari berbagai latar belakang partai, agama, dan suku, para kepala daerah adalah bagian dari keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, yang mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

"Keluarga Besar Republik Indone-

sia, Keluarga Besar Merah Putih, Keluarga Besar Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tapi kita satu saudara-saudara sekalian," katanya.

Para kepala daerah berasal dari keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya menjadi kekuatan untuk bersatu, meskipun mereka mungkin memiliki pandangan politik yang berbeda.

"Saya juga ingin menyampaikan Selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing saudara-saudara ini," katanya.

Presiden Prabowo menyebut segera bertemu lagi dengan ratusan kepala daerah itu di Magelang, untuk retreat Akademi Militer (Akmil) yang akan diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

"Saya kira demikian ingin saya sampaikan marilah kita mengabdikan kepada rakyat kita berbuat yang terbaik untuk rakyat kita," tuturnya. ●



JALANKAN TUGAS SEBAGAI PLT GUBERNUR SUMSEL

Setelah menjalani pelantikan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Sumsel Herman Deru langsung mengikuti retret kepala daerah. Sedangkan Wagub Sumsel, Cik Ujang pulang ke Palembang.

Kepulangan Cik Ujang beserta keluarga disambut dengan pengalungan bunga oleh Sekda Sumsel Drs H Edward Candra MH beserta istri beserta jajaran Forkopimda dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.

"Saat ini pak Gubernur sedang menjalani retret di Akademi Militer Magelang. Nanti mari bersama-sama kita selesaikan apa saja yang menjadi program kerja pak Gubernur. Mari kita berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak", ujarnya.

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada Sekda Sumsel beserta Forkopimda Sumsel yang telah menyambut kedatangannya bersama keluarga.

"Terima kasih kepada semua atas sambutan selamat datang ini. Saya senang pada akhirnya saya dan pak Gubernur dilantik, sebab sempat terbakar sebelumnya pelantikan kami ini bakal diundur lagi. Alhamdulillah jadi dilantik", tuturnya.

Sementara Edward Candra menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat menjalankan tugas kepada H Cik Ujang sebagai Plt Gubernur Sumsel selama Gubernur Herman Deru mengikuti kegiatan retreat yang berlangsung selama 8 hari dimulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang.

"Sehubungan pak Gubernur sedang retret, maka dalam kesempatan ini kami serahkan pula surat penunjukkan pak Wagub sebagai Plt Gubernur Sumsel", ujarnya.

Tugas Perdana Sebagai Plt Gubernur

Sebagai Plt Gubernur Sumsel, Cik Ujang menghadiri turnamen sepakbola Siti Fatimah Cup III tahun 2025 yang diselenggarakan RSUD Siti Fatimah Provin-

si Sumsel di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang.

Plt Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas digelarnya turnamen tersebut oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel yang sangat perhatian terhadap olahraga sepakbola.

Menurutnya, turnamen tersebut se-

laras dengan program dan tekad Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) dalam memajukan sepakbola di Provinsi Sumsel sekaligus menumbuhkan bibit pemain sepak bola terbaik asli Sumsel.

"Kebetulan walaupun sedikit-sedikit saya juga senang dengan sepak bola ini. Dulu di Kabupaten Lahat saya juga membuat klub sepak bola namanya Ca-



haya United FC dan sudah bertanding di berbagai daerah di Indonesia. Kedepan kita rencanakan juga membuat klub sepak bola bernama Sumsel United,” ungkapnya.

Penutupan turnamen yang bertema “Maju Untuk Semua” itu ditandai dengan penyerahan piala Plt Gubernur Sumsel Cik Ujang kepada para juara.

Pemenang juara pertama Siti Fatimah FC A dan juara kedua Siti Fatimah FC B dengan hasil pertandingan 4 : 2. Sementara juara ketiga diraih PS Bank Sumsel Babel yang berhasil mengalahkan PS PUSRI dengan skor hasil pertandingan 3 : 1.

Ketua Panitia Turnamen Siti Fatimah Cup III tahun 2025, Nuryandi mengatakan, turnamen tersebut yang telah berlangsung sejak 11 Januari 2025 itu diikuti 16 tim dari Jajaran Pemerintah Kota Palembang, OPD dan BUMD di Provinsi Sumatera Selatan.

“Sejumlah pertandingan telah dilaksanakan di beberapa tempat diantaranya di lapangan Atletik Jakabaring untuk babak penyisihan, kemudian di Stadion Bumi Sriwijaya dan Stadion Gelora Sriwijaya,” ujarnya.

Merasa Terharu

Sementara sebelumnya, mengisi waktu akhir pekan pasca dilantik sebagai Wakil Gubernur Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel) H Cik Ujang langsung kerja. Diawali dengan meninjau sejumlah ruangan di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel di Jalan A. Rivai Palembang, Sabtu (22/2/2025).

Saat tiba di kantor Gubernur Sumsel sekitar pukul 10.00 Wib, Wagub yang juga selaku Plt Gubernur Sumsel ini langsung disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Biro di lingkungan Pemprov Sumsel dan langsung menaiki anak tangga menuju lantai dua.

Di lantai dua Kantor Gubernur Sumsel ini, Wagub Cik Ujang berkesempatan meninjau ruangan kerjanya, yang akan ditempatinya selama menjabat sebagai Wakil Gubernur hingga 2030 mendatang.



Cik Ujang kembali mengungkapkan rasa haru dan bahagiannya. Dia juga mengaku tidak menyangka akan empati ruangan Wakil Gubernur Sumsel, mengingat cita-citanya sedari kecil ingin menjadi seorang pengusaha.

“Alhamdulillah usai dilantik, kemarin disambut Bapak Sekda dan Kepala OPD

meriah sekali, rasanya senang, gembira. Background dahulu adalah pengusaha, tidak menyangka duduk menjadi Wakil Gubernur tapi dengan adanya kita bekerja keras, jujur, loyalitas, dengan yang lainnya juga silaturahmi, komunikasi dijaga. Alhamdulillah sekarang jadi Wagub,” ungkapnya. ●

HDCU JABAT GUBERNUR DAN WAGUB SUMSEL PERIODE 2025-2030

Haji Herman Deru dan H. Cik Ujang (HDCU) resmi menjadi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Wakil Gubernur Sumsel masa jabatan 2025-2030. Pelantikan HDCU dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta.

HDCU dilantik bersamaan dengan 961 Kepala Daerah lainnya yang terdiri dari 33 Gubernur, 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Walikota dan 85 Wakil Walikota. Acara pelantikan serentak ini digelar mulai pukul 09.30 Wib.

Pelantikan kepala daerah ini dimulai dengan prosesi kirab dari Monumen Na-

Negara Republik Indonesia dan provinsi adalah bagian dari dalam bingkai tersebut.

Dalam kesempatan itu Herman Deru memaknai secara khusus apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menyampaikan sambutan. Menurutnya tugas Kepala Daerah adalah mensejahterakan masyarakat.

"Maka untuk itu harus ada sinergitas

jangka panjang.

"Sebagai daerah penghasil pangan terbesar punya tanggung jawab yakni daerah menjadi penyangga nasional tentu kita tanggung jawab. Apalagi pemerintah pusat dengan tegas mengatakan stop impor," ujarnya.

Lebih jauh Herman Deru mengatakan Sumsel telah siap dengan segala infrastruktur pertaniannya untuk menjadi



sional (Monas) menuju Istana Kepresidenan. Barisan Kirab ini dimeriahkan oleh Drum Band Gita Praja IPDN. Selanjutnya barisan kirab tersebut secara berurutan masuk ke Istana Merdeka melalui pintu utama di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir.

Usai pelantikan, Gubernur Herman Deru mengatakan pelantikan serentak ini merupakan bingkai besar sebagai

antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini merupakan wakil pemerintah pusat sampai ke desa-desa. Itu utamanya pesan dari Presiden," kata HD.

Herman Deru mengatakan dirinya bersama Wagub Cik Ujang dan kepala daerah lain dan Wakilnya tentu punya janji kepada masyarakat yang harus ditunaikan baik jangka pendek maupun

provinsi andalan bagi suplai pangan di Indonesia khususnya beras dan jagung.

Terkait visi misinya Sumsel Maju Terus Untuk Semua, harus menjadi anak emas, meskipun persoalan mereka berbeda-beda. Sehingga Kepala Daerah mesti dapat menyeimbangkan penyelesaiannya antara permasalahan di daerah juga potensinya yang dapat diangkat baik sektor pertanian, pariwisata, mineral, gas

batubara.

"Tapi kuncinya harus kompak antara Bupati/Walikota, Gubernur serta pemerintah pusat," jelasnya.

Kemudian untuk retreat Herman Deru mengaku telah menyiapkan diri. Ia Pun memahami bahwa di Akmil Magelang terkenal dengan kedisiplinannya, ketangguhan dan bela negara. Ini dapat menjadi bekal dan disana pun dapat menjadi wadah untuk bertukar pikiran, komoditas, atau bertukar sumber daya manusia.

"Itu yang kita harapkan dari retreat ini bukan hanya bersilaturahmi tapi bagaimana kita menemukan manfaat melalui potensi yang ada sehingga kita bisa bertukar dari komoditas itu," jelasnya.

Ajak Membangun Bersama

Pada kesempatan ini Herman Deru juga mengingatkan bahwa Pilkada sudah selesai. Apapun perbedaan yang terjadi itu adalah konsekuensi demokrasi.

"Masyarakat secara bersama-sama lagi membangun Sumsel tanpa membedakan partai pengusung, apapun suku, dan agama demi Sumsel Maju Terus Untuk Semua," tandasnya.

Sementara itu sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya, menekankan pentingnya posisi para kepala daerah sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar pemimpin.

"Saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat, saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka, itu adalah tugas kita," tegas Prabowo,

Meskipun kepala daerah berasal dari berbagai latar belakang partai, agama, dan suku, lanjut Prabowo, namun para kepala daerah adalah bagian dari keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, yang mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

"Keluarga Besar Republik Indonesia, Keluarga Besar Merah Putih, Keluarga Besar Bhinneka Tunggal Ika. kita berbeda-beda tapi kita satu saudara-saudara sekalian," katanya.

Keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya menjadi kekuatan untuk bersatu, meskipun mereka mungkin memiliki pandangan politik yang berbeda.

"Saya juga ingin menyampaikan Selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing saudara-saudara ini," katanya.

Feby Deru Dilantik Jadi Ketua TP PKK

Secara terpisah Hj. Febrita Lustia Herman Deru atau akrab disapa Feby Deru juga resmi dilantik menjadi Ketua TP PKK sekaligus Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumsel Periode 2025-2030. Feby Deru dilantik langsung oleh Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum Tim Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian, di Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa, Jakarta Pusat.

Feby Deru dilantik serentak bersama 33 orang Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekaligus Tim Pembina Posyandu Provinsi periode 2025-2030 se-Indone-

sia.

Pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sebagai pembina TP PKK Pusat dan Penasehat Tim Pembina Posyandu Pusat.

Ketua TP PKK Provinsi yang dilantik ini merupakan istri dari para gubernur yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pagi sebelumnya di hari yang sama.

Dalam sambutannya Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan momentum pelantikan ini bukan sekedar seremonial saja namun merupakan tonggak baru dalam perjalanan panjang pengabdian Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu untuk pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Ia meyakini sinergi antara Pemerintah daerah dengan TP PKK dan Posyandu akan semakin kuat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. •



AJAK MASYARAKAT KEMBALI BERSATU DEMI SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Usai dilantik secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru didampingi Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang mengajak seluruh masyarakat di Bumi Sriwijaya kembali bersatu membangun Sumsel.

"Saya mengajak seluruh masyarakat kembali bersatu secara bersama-sama lagi membangun Sumsel tanpa membedakan partai pengusung, apapun suku, dan agama demi Sumsel Maju Terus Untuk Semua," ucap Herman Deru.

Herman Deru juga mengaku lega dan bersyukur mengingat momen pelantikan secara serentak ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia.

"Pelantikan serentak ini merupakan bingkai besar sebagai Negara Republik Indonesia dan provinsi adalah bagian dari dalam bingkai tersebut,"

ucap Herman Deru.

Herman Deru juga mengaku memaknai secara khusus apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menyampaikan sambutan. Menurutnya tugas Kepala Daerah adalah mensejahterakan masyarakat.

"Maka untuk itu harus ada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini merupakan wakil pemerintah pusat sampai ke desa-desa. Itu utamanya pesan dari Presiden," kata HD.

Dirinya bersama Wagub Cik Ujang dan kepala daerah lain dan wakilnya tentu punya janji kepada masyarakat yang harus ditunaikan baik jangka

pendek maupun jangka panjang.

"Sebagai daerah penghasil pangan terbesar punya tanggung jawab yakni daerah menjadi penyangga nasional tentu kita tanggung jawab. Apalagi pemerintah pusat dengan tegas mengatakan stop impor," ujarnya.

Lebih jauh Herman Deru mengatakan Sumsel telah siap dengan segala infrastruktur pertaniannya untuk menjadi provinsi andalan bagi suplai pangan di Indonesia khususnya beras dan jagung.

Terkait visi misinya Sumsel Maju Terus Untuk Semua, semua Kabupaten/kota harus menjadi anak emas, meskipun persoalan setiap daerah



berbeda-beda. Sehingga Kepala Daerah mesti dapat menyeimbangkan penyelesaiannya antara permasalahan di daerah juga potensinya yang dapat diangkat baik sektor pertanian, pariwisata, mineral, gas batubara.

"Tapi kuncinya harus kompak antara Bupati/Walikota, Gubernur serta pemerintah pusat," jelasnya.

Kemudian untuk retreat Herman Deru mengaku telah menyiapkan diri. Ia Pun memahami bahwa di Akmil Magelang terkenal dengan kedisiplinannya, ketangguhan dan bela negara. Ini dapat menjadi bekal dan disana pun dapat menjadi wadah untuk bertukar pikiran, komoditas, atau bertukar sumber daya manusia.

"Itu yang kita harapkan dari retreat ini bukan hanya bersilaturahmi tapi bagaimana kita menemukan manfaat melalui potensi yang ada sehingga kita bisa bertukar dari komoditas itu," jelasnya.

Pada kesempatan ini Herman Deru juga mengingatkan bahwa Pilkada sudah selesai. Apapun perbedaan yang terjadi itu adalah konsekuensi demokrasi.

"Saya mengajak masyarakat secara bersama-sama lagi membangun Sumsel tanpa membedakan partai pengusung, apapun suku, dan agama demi Sumsel Maju Terus Untuk Semua," ucap Herman Deru.

Untuk diketahui pelantikan HDCU sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2025-2030 bersamaan dengan 961 Kepala Daerah lainnya yang terdiri dari 33 Gubernur 33, Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Walikota dan 85 Wakil Walikota.

Pelantikan kepala daerah ini dimulai dengan prosesi kirab dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Kepresidenan. Barisan Kirab ini dimeriahkan oleh Drum Band Gita Praja IPDN. Selanjutnya barisan kirab tersebut secara berurutan masuk ke Istana Merdeka melalui pintu utama di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir.

Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya memberikan semangat kepada 961 kepala daerah yang baru saja dilantik.

Prabowo juga menekankan pent-

ingnya posisi para kepala daerah sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar pemimpin.

"Saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat, saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka, itu adalah tugas kita,"



tegas Prabowo,

Para kepala daerah diinginkannya, meskipun berasal dari berbagai latar belakang partai, agama, dan suku, para kepala daerah adalah bagian dari keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, yang mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

"Keluarga Besar Republik Indonesia, Keluarga Besar Merah Putih, Keluarga Besar Bhinneka Tunggal Ika. kita

berbeda-beda tapi kita satu saudara-saudara sekalian," katanya.

Para kepala daerah berasal dari keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya menjadi kekuatan untuk bersatu, meskipun mereka mungkin memiliki pandangan politik yang berbeda.

"Saya juga ingin menyampaikan Selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing saudara-saudara ini," katanya.

Presiden Prabowo menyebut akan segera bertemu lagi dengan ratusan kepala daerah itu di Magelang, untuk retreat Akademi Militer (Akmil) yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

"Saya kira demikian ingin saya sampaikan marilah kita mengabdikan kepada rakyat kita berbuat yang terbaik untuk rakyat kita," tuturnya. ●

SIAP DUKUNG PROGRAM HDCU WUJUDKAN SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) siap mendukung program pasangan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Cik Ujang atau HDCU dalam mewujudkan Sumsel Maju Terus untuk Semua.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Drs H Edward Candra dalam pertemuan silaturahmi dengan Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel Terpilih H Herman Deru dan Cik Ujang tidak lain sebagai bentuk dukungan Pemprov Sumsel sekaligus men-doakan agar jalannya pemerintahan berlangsung dengan lancar.

"Insya Allah dengan hitungan jam beliau akan dilantik oleh Pak Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara RI. Kita semua hadir disini dengan semangat dan memberikan selamat atas terpilihnya Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel," ungkapnya.

Lanjut Sekda mengatakan Provinsi

masyarakat siap menyukseskan program Gubernur Sumsel dan Wakil Sumsel terpilih demi Sumsel maju untuk semua," tuturnya.

Untuk menyambut pemimpin baru ini Pemprov menggelar Ramah Tamah Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Terpilih periode 2025-20230 yakni pasangan H Herman Deru dan H Cik Ujang (HDCU) bertempat di Hotel Borobudur Jakarta.

Ramah tamah tersebut juga dihadiri Istri Gubernur Sumsel Hj Feby Herman Deru, Istri Wakil Gubernur Terpilih Hj Lidi-awati beserta keluarga, kerabat, para tim pemenangan dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumsel.

Gubernur Sumsel Herman Deru pada



Sumsel di bawah kepemimpinan Herman Deru pada periode sebelumnya telah terbukti banyak menorehkan prestasi. Untuk jajaran Pemprov Sumsel siap mendukung visi misi program Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur HDCU.

"Pemprov Sumsel bersama

kesempatan itu mengucapkan rasa syukur karena momen seperti ini terulang kembali. Dimana masing-masing pribadi mengemban kerinduan untuk saling bertemu melepaskan rasa rindu.

"Herman Deru dan Cik Ujang dipercaya oleh masyarakat menjadi Gubernur

dan Wakil Gubernur 2025 -2030," ucap HD mengawali sambutannya.

Herman Deru menyebutkan kehadiran semua elemen dan stakeholders pada ramah tamah kali ini luar biasa, tentu ini tidak terlepas dari pertolongan doa, dan dilapangan sehingga masyarakat diyakinkan untuk memilih Herman Deru dan Cik Ujang.

"Terimakasih perjuangan baik berupa pikiran, tenaga dan material kami ucapkan terima kasih. Mari kita bersama-sama untuk menuju Sumsel Maju Terus Untuk Semua," ujarnya.

Resmi Dilantik Sebagai Gubernur dan Wagub Sumsel

H. Herman Deru dan H. Cik Ujang (HDCU) resmi menjadi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Wakil Gubernur Sumsel masa jabatan 2025-2030. Pelantikan HDCU dilakukan langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Kepresidenan.

HDCU dilantik bersamaan dengan 961 Kepala Daerah lainnya yang terdiri dari 33 Gubernur 33, Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Walikota dan 85 Wakil Walikota. Acara pelantikan serentak ini digelar mulai pukul 09.30 Wib.

Pelantikan kepala daerah ini dimulai dengan prosesi kirab dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Kepresidenan. Barisan Kirab ini dimeriahkan oleh Drum Band Gita Praja IPDN. Selanjutnya barisan kirab tersebut secara berurutan masuk ke Istana Merdeka melalui pintu utama di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir.

Usai pelantikan, Gubernur Herman Deru mengatakan pelantikan serentak ini merupakan bingkai besar sebagai Negara Republik Indonesia dan provinsi adalah bagian dari dalam bingkai tersebut.

Dalam kesempatan itu Herman Deru memaknai secara khusus apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menyampaikan sambutan. Menurutnya tugas Kepala Daerah adalah mensejahterakan masyarakat.

"Maka untuk itu harus ada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini merupakan wakil pemerintah pusat b sampai ke

desa -desa. Itu utamanya pesan dari Presiden," kata HD.

Herman Deru mengatakan dirinya bersama Wagub Cik Ujang dan kepala daerah lain dan Wakilnya tentu punya janji kepada masyarakat yang harus ditunaikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Sebagai daerah penghasil pangan terbesar punya tanggung jawab yakni daerah menjadi penyangga nasional tentu kita tanggung jawab. Apalagi

Untuk Semua, harus menjadi anak emas, meskipun persoalan mereka berbeda-beda. Sehingga kepala daerah mesti dapat menyeimbangkan penyelesaiannya antara permasalahan di daerah juga potensinya yang dapat diangkat baik sektor pertanian, pariwisata, mineral, gas batubara.

"Tapi kuncinya harus kompak antara Bupati/Walikota, Gubernur serta pemerintah pusat," jelasnya.

Pada kesempatan ini Herman Deru



pemerintah pusat dengan tegas mengatakan stop impor," ujarnya.

Lebih jauh Herman Deru mengatakan Sumsel telah siap dengan segala infrastruktur pertaniannya untuk menjadi provinsi andalan bagi suplai pangan di Indonesia khususnya beras dan jagung.

Terkait visi misinya Sumsel Maju Terus

juga mengingatkan bahwa Pilkada sudah selesai. Apapun perbedaan yang terjadi itu adalah konsekuensi demokrasi.

"Masyarakat secara bersama-sama lagi membangun Sumsel tanpa membedakan partai pengusung, apapun suku, dan agama demi Sumsel Maju Terus Untuk Semua," tandasnya. •



DUKUNG CKG, JAKARTA SIAPKAN 292 PUSKESMAS PEMBANTU

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi program unggulan pemerintah dalam sektor kesehatan resmi dimulai sejak 10 Februari 2025 atas persetujuan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai pertemuan khusus dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Program cek kesehatan gratis ini telah diputuskan oleh Presiden Prabowo dan mulai berjalan pada 10 Februari, khususnya di puskesmas serta klinik-klinik," ujar Budi, Rabu 5 Februari 2025.

Budi menambahkan bahwa program ini akan menjangkau seluruh kelompok

pok usia dengan total cakupan sekitar 280 juta penduduk Indonesia.

Dalam implementasinya, CKG akan dibagi ke dalam dua kelompok usia, yakni anak usia di bawah enam tahun dan usia di atas enam tahun.

Sebagai tahap awal, CKG akan dilakukan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik di seluruh Indonesia.

Pemeriksaan ini akan dilakukan berdasarkan bulan kelahiran peserta atau sebagai kado ulang tahun dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Nantinya, pemeriksaan akan dilakukan saat ulang tahun mereka plus satu bulan. Namun, bagi yang lahir di Januari, Februari, dan Maret, pemeriksaan bisa dilakukan hingga April," jelas Budi.

Dijelaskan Budi, pemerintah telah merancang pemeriksaan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok usia, yakni bayi baru lahir dengan enam jenis pemeriksaan. Balita, dengan delapan jenis pemeriksaan. Anak SD, dengan 11 jenis pemeriksaan.



Remaja SMP, dengan 13 jenis pemeriksaan. Remaja SMA, dengan 12 jenis pemeriksaan serta dewasa dan lanjut usia, akan mendapatkan 19 jenis pemeriksaan.

Budi menegaskan bahwa CKG merupakan langkah besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

"Program ini adalah langkah besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara merata," tegasnya.

Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi menyatakan, program CKG mencakup pemeriksaan berbagai jenis penyakit yang dapat dicegah melalui deteksi dini.

Pemeriksaan ini menjadi solusi atas tingginya angka kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat diantisipasi lebih awal.

Endang menjelaskan bahwa program ini didesain berdasarkan siklus hidup masyarakat, mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lansia. CKG akan berfokus pada tiga kategori utama, yaitu:

1. CKG Ulang Tahun

- Dimulai pada 10 Februari 2025
- Menyasar anak usia 0-6 tahun serta masyarakat usia 18 tahun ke atas
- Dilaksanakan di Puskesmas dan klinik mitra
- Masyarakat dapat melakukan pemeriksaan dalam rentang waktu 30 hari setelah ulang tahun

2. CKG Sekolah

- Mulai berjalan pada Juli 2025, bertepatan dengan tahun ajaran baru
- Menyasar anak usia 7-17 tahun di sekolah-sekolah

3. CKG Khusus Ibu Hamil dan Balita

- Dilaksanakan di Puskesmas dan Posyandu
- Fokus pada pemantauan kesehatan ibu hamil serta tumbuh kembang balita

Jenis pemeriksaan dalam CKG bervariasi, mulai dari skrining kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, pemeriksaan gizi, kesehatan mata dan

telinga, hingga tekanan darah.

Untuk usia dewasa dan lansia, pemeriksaan akan difokuskan pada risiko stroke, penyakit jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik.

Pemerintah telah menetapkan persyaratan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MEN-KES/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun.

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi:

- * Memiliki aplikasi Satu Sehat Mobile
- * Peserta aktif BPJS Kesehatan
- * Masa berlaku skrining 30 hari setelah ulang tahun
- * Bayi baru lahir dapat skrining dalam 24 jam atau dua hari setelah lahir
- * Membawa KTP, Kartu Keluarga (KK), atau Kartu Identitas Anak (KIA)

- * Balita dan anak prasekolah wajib membawa Buku Kesehatan Ibu dan Anak
- * Tiket pemeriksaan dari Satu Sehat Mobile atau WhatsApp
- * Mengisi formulir kuisioner skrining mandiri.

Pemerintah menyediakan cara mudah untuk mendaftar CKG melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.

Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kemenkes, Setiaji menjelaskan, bahwa aplikasi ini memungkinkan masyarakat mendaftar tanpa harus antri di Puskesmas.

"Masyarakat cukup mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile dan mengisi profil mereka. Fitur CKG akan aktif mulai besok, dan mereka bisa memilih tanggal pemeriksaan dalam jangka waktu H+30 setelah ulang tahun," ujar Setiaji.

Selain itu, aplikasi juga memungkinkan pengguna mendaftarkan keluarga atau anak mereka untuk pemeriksaan yang sama.

Bagi masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi Satu Sehat Mobile, tersedia alternatif pendaftaran melalui WhatsApp di nomor



• INFO DAERAH

081110500567.

Fitur chatbot akan memandu masyarakat dalam melakukan registrasi secara mudah dan cepat.

Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bidang Sains dan Teknologi (Wamendikstisaintek) Stella Christie menjalani CKG di Puskesmas Cakung, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia men-

terorganisir,” ujar Stella usai menjalani pemeriksaan di Puskesmas Cakung.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya memanfaatkan layanan ini sebagai bagian dari perayaan ulang tahunnya di bulan Januari. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan pimpinan perguruan tinggi, untuk turut serta dalam program ini.

“Ayo, adik-adik mahasiswa, para

yang berlaku.

“Setiap hasil pemeriksaan di lapangan akan ditindaklanjuti dan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan,” ujar Asnawi saat menghadiri acara di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan, Senin 10 Februari 2025.

Asnawi menjelaskan bahwa program ini memiliki dua tujuan utama, yaitu mendeteksi faktor risiko penyakit serta memberikan tindakan lanjutan bagi peserta yang teridentifikasi memiliki kondisi kesehatan tertentu.

“Ada dua tujuan utama dari program ini. Pertama, mendeteksi faktor risiko. Jika seseorang memiliki faktor risiko, kami akan berupaya mengendalikannya. Namun, bagi yang telah terdiagnosis penyakit seperti tuberkulosis (TB), akan langsung mendapatkan pengobatan sesuai standar,” jelasnya.

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi meninjau pelaksanaan layanan CKG di Puskesmas Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pada Senin 10 Februari

2025.

Program layanan kesehatan gratis ini diberikan setiap hari kepada warga yang berulang tahun.

Teguh tiba di puskesmas sekitar pukul 11.10 WIB dan langsung berdialog dengan sejumlah pasien yang sedang mengantri di lobi.

Dalam kesempatan tersebut, ia menanyakan kondisi kesehatan warga serta mendapatkan masukan mengenai pelaksanaan program cek kesehatan gratis ini.

Setelah berdialog dengan warga, Teguh, yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati, Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Timur Kusmanto, Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Hendra Hidayat, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy, serta sejumlah pejabat lainnya, meninjau fasilitas layanan kesehatan yang berada di lantai dasar dan lantai dua



gajak mahasiswa dan civitas akademika untuk lebih peduli terhadap kesehatan.

Stella menyoroti bahwa dari sekitar 9 juta mahasiswa di Indonesia, banyak yang cenderung mengabaikan kesehatan karena merasa masih muda dan sehat.

“Justru karena masih muda, kita harus mulai membiasakan diri untuk rutin cek kesehatan. Ini kebiasaan yang sangat penting. Apalagi layanan ini gratis dan hanya membutuhkan sedikit waktu. Prosesnya pun sudah sangat

dosen, dan jajaran pimpinan perguruan tinggi, mari kita manfaatkan layanan cek kesehatan gratis ini bersama,” ajak Stella.

Program CKG di Puskesmas ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan di kalangan akademisi dan generasi muda.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Asnawi Abdullah, menyatakan bahwa seluruh hasil pemeriksaan akan diproses sesuai prosedur medis

puskesmas.

Sekitar 30 menit kemudian, rombongan Pj Gubernur melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Pembantu Kelurahan Jati 2 untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program di berbagai fasilitas kesehatan.

Teguh menegaskan bahwa peninjauan ini bertujuan memastikan program cek kesehatan gratis yang merupakan inisiatif pemerintah pusat dapat berjalan optimal di Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh dan berkomitmen untuk mensukseskan program cek kesehatan gratis ini sebagai bagian dari strategi peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa layanan ini telah diterapkan di 44 puskesmas kecamatan, 292 puskesmas pembantu, serta berbagai klinik di seluruh wilayah Jakarta. Seluruh puskesmas telah terintegrasi dengan aplikasi layanan Satu Sehat dan BPJS Kesehatan guna memastikan akses layanan yang lebih efisien.

"Setiap hari, masing-masing puskesmas memiliki kuota 30 warga untuk program cek kesehatan gratis ini," tambahnya.

Teguh juga menegaskan bahwa Pemprov DKI akan semakin gencar dalam mensosialisasikan program ini kepada masyarakat agar lebih banyak warga yang dapat memanfaatkannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini dibagi ke dalam beberapa kelompok usia untuk memberikan layanan yang lebih spesifik.

Di Puskesmas Pulogadung, misalnya, bayi berusia 0-1 tahun diberikan kalung merah, anak usia 2-17 tahun mendapat kalung kuning, warga usia 18-59 tahun mengenakan kalung hijau, dan lansia usia 60 tahun ke atas diberikan kalung biru.

Setiap kelompok memiliki jenis pemeriksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan usia masing-masing.

"Pemeriksaan meliputi pengukuran antropometri, seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut untuk dewasa," jelas Ani.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga mencakup tes gula darah, hemoglobin (HB), kesehatan gigi, mata, serta telinga.

Jika ditemukan indikasi risiko kesehatan, pemeriksaan lanjutan akan dilakukan melalui laboratorium sesuai dengan kebutuhan pasien. Bahkan, layanan pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG) dan deteksi dini kanker juga disediakan bagi mereka yang membutuhkan.

"Waktu yang dibutuhkan untuk setiap pemeriksaan cek kesehatan gratis ini sekitar 30 menit per pasien," tutupnya. ●

Jenis Cek Kesehatan Gratis Berdasarkan Usia

Setiap kelompok usia akan mendapatkan layanan skrining sesuai kebutuhan kesehatan mereka. Berikut rinciannya:

1. Bayi Baru Lahir (Usia 0-2 Hari)

- Kekurangan Hormon Tiroid sejak lahir
- Kekurangan enzim G6PD
- Kekurangan hormon adrenal sejak lahir
- Penyakit jantung bawaan (PJB) kritis
- Kelainan saluran empedu
- Gangguan pertumbuhan

2. Balita dan Anak Prasekolah (Usia 1-6 Tahun)

- Pertumbuhan dan perkembangan
- Deteksi tuberkulosis
- Pemeriksaan telinga, mata, dan gigi
- Talasemia (mulai usia 2 tahun)
- Gula darah (mulai usia 2 tahun)

3. Dewasa (Usia 18-59 Tahun)

Pemeriksaan Kardiovaskular

- Status merokok
- Aktivitas fisik
- Status gizi dan kesehatan gigi
- Tekanan darah
- Gula darah
- Risiko stroke dan penyakit jantung (mulai usia 40 tahun)
- Fungsi ginjal (mulai usia 40 tahun)

Pemeriksaan Paru-Paru

- Tuberkulosis
- Penyakit paru obstruktif kronis (mulai usia 40 tahun)

Deteksi Dini Kanker

- Kanker payudara (wanita mulai usia 30 tahun)
- Kanker leher rahim (wanita mulai usia 30 tahun)
- Kanker paru (pria mulai usia 45 tahun)
- Kanker usus (pria mulai usia 45 tahun)

Pemeriksaan Indra dan Kesehatan Jiwa

- Mata dan telinga
- Pemeriksaan kesehatan mental
- Pemeriksaan Hati
- Hepatitis B dan C

Deteksi fibrosis/sirosis hati

Skrining untuk Calon Pengantin

- Anemia (wanita)
- Sifilis
- HIV

4. Lansia (Usia 60 Tahun ke Atas)

Pemeriksaan Geriatri dan Kardiovaskular

- Status merokok
- Aktivitas fisik
- Status gizi dan kesehatan gigi
- Tekanan darah
- Gula darah
- Risiko stroke dan penyakit jantung (mulai usia 40 tahun)
- Fungsi ginjal (mulai usia 40 tahun)

Pemeriksaan Paru-Paru

- Tuberkulosis
- Penyakit paru obstruktif kronis

Deteksi Dini Kanker

- Kanker payudara (wanita hingga usia 69 tahun)
- Kanker leher rahim (wanita hingga usia 69 tahun)
- Kanker paru (pria)
- Kanker usus (pria)

Pemeriksaan Indra dan Kesehatan Jiwa

- Mata dan telinga
- Kesehatan mental

Pemeriksaan Hati

- Hepatitis B dan C
- Deteksi fibrosis/sirosis hati.

EFISIENSI ANGGARAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran APBN dan APBD.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) telah mengimplementasikan kebijakan ini dengan menyesuaikan berbagai langkah untuk mendukungnya.

Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyampaikan, Pemprov Jatim melaksanakan kebijakan dengan sebaik mungkin untuk mendukung program-program prioritas.

"Kami harus dapat menyelaraskan diri dan melaksanakan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, kebijakan ini untuk mendukung program-program prioritas nasional yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat," ungkapnya di Surabaya, Jumat, 7 Februari 2025.

Adhy menambahkan bahwa Inpres tersebut tidak menghalangi program-program Gubernur Jawa Timur, seperti misi perdagangan.

Ia menekankan bahwa berbagai program di Jawa Timur tetap dapat dilaksanakan dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi, karena hal ini dapat memberikan dorongan positif bagi perekonomian daerah.

"Semua kegiatan tetap dapat dilanjutkan, namun dukungan anggarannya akan dikurangi," tambah Adhy.

Kebijakan efisiensi anggaran tersebut juga berdampak signifikan. Salah satu dampak yang langsung dirasakan adalah berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Dijelaskan Adhy, bahwa pemangkasan DAU dan DAK tidak hanya berlaku untuk Pemprov Jatim, tetapi juga untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota di

wilayah tersebut.

Adhy Karyono mengingatkan seluruh kabupaten/kota untuk bersiap menghadapi pengurangan anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah.

"DAU dan DAK berkurang hampir Rp200 miliar. Kita harus menggan-
tinya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, bagi daerah yang ket-
ergantungannya tinggi pada DAU, ini akan menjadi tantangan besar," ujar Adhy.

Selain berdampak pada operasional daerah, pemangkasan anggaran ini juga berpengaruh terhadap alokasi dana untuk pegawai, terutama tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Salah satu isu krusial yang muncul adalah masa depan 19.600 tenaga honorer dan PPPK di lingkungan Pemprov Jatim.

Adhy menjelaskan bahwa tenaga honorer dan PPPK terbagi dalam dua kelompok, yakni mereka yang telah lulus tes PPPK serta yang belum lulus namun masih bekerja sebagai tenaga paruh waktu.

"PPPK yang belum lulus tetap akan mendapatkan gaji dan tunjangan yang sama. Namun, tantangannya adalah tenaga honorer dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belum masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena kendala teknis, seperti kurangnya kemampuan IT atau kesalahan dalam input data," terangnya.

Meskipun Pemprov Jatim berupaya mengakomodasi kondisi ini, Adhy mengakui bahwa banyak kabupaten/kota menghadapi tantangan besar dalam memenuhi pembayaran gaji pegawai.

Sebab, banyak daerah dengan PAD yang kecil, sementara kebutuhan anggaran untuk gaji pegawai mencapai ratusan miliar rupiah.

"Sejumlah daerah masih sangat bergantung pada DAU, terutama daerah dengan keterbatasan PAD yang hingga 60 persen

anggarannya ber-



gantung pada dana transfer dari pusat,” ungkapnya.

Untuk itu, Adhy meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jatim segera menyesuaikan kebijakan anggaran mereka, khususnya terkait dengan gaji pegawai. Mengingat Inpres No.1 Tahun 2025 sudah ditandatangani Presiden Prabowo, langkah efisiensi harus segera diimplementasikan.

“Daerah harus lebih kreatif dalam mengelola PAD dan melakukan efisiensi. Jika tidak, dampaknya akan sangat berat, terutama bagi tenaga honorer dan PPPK yang masih memiliki status

“Kami berharap tidak ada pihak yang dirugikan, tetapi semua harus memahami bahwa efisiensi anggaran adalah langkah yang tidak bisa dihindari,” jelasnya.

Sementara, Kepala Bappeda Jatim, M Yasin, menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29, Jatim akan mengalami efisiensi dana transfer dari pusat sekitar Rp 200 miliar.

Oleh karena itu, ia menuturkan, pihaknya perlu menyesuaikan penggunaan dana transfer tersebut dalam APBD.

“Langkah pertama yang akan kami

ganggu,” tutupnya.

Bahkan Pemprov Jatim memutuskan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas (Perdin) hingga 50 persen.

“Kami akan mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Selain itu, kegiatan seremonial dan pertemuan juga akan diminimalkan,” ujarnya.

Menurut Yasin, setiap OPD akan melakukan perhitungan efisiensi anggaran sesuai dengan target penghematan yang ditetapkan, sejalan dengan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.



belum jelas,” tegasnya.

Selain itu, Adhy juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mencari solusi jangka panjang.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota harus lebih cermat dalam menambah tenaga honorer, memastikan perencanaan yang matang agar tidak menambah beban keuangan daerah.

Di sisi lain, tenaga honorer dan PPPK juga diimbau untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan ini. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota diminta untuk mempercepat proses verifikasi data dan pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi syarat.

lakukan adalah efisiensi perjalanan dinas sebesar 50%. Kedua, efisiensi akan dilakukan pada kegiatan seremonial, paket pertemuan, dan kegiatan lainnya. Kami akan meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghitung secara rinci, karena tidak semua perjalanan dinas dapat dikategorikan tidak efektif,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa belanja untuk program prioritas tidak akan dikurangi, yang akan dikurangi adalah belanja yang tidak berpengaruh langsung pada capaian kinerja.

“Kami pastikan program prioritas, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik dan yang langsung menyentuh masyarakat, tidak akan ter-

“Setiap OPD akan menyesuaikan penghematan anggaran mereka. Namun, tidak semua perjalanan dinas bisa dihilangkan, seperti yang dilakukan oleh Inspektorat, karena sifat pekerjaannya memang membutuhkan mobilitas,” jelasnya.

Meski dilakukan efisiensi anggaran, Yasin menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu program prioritas Pemprov Jatim, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami memastikan efisiensi ini tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Anggaran akan difokuskan pada peningkatan layanan publik serta kesejahteraan warga,” tutupnya. •

WAJAH BARU PENDIDIKAN JAWA BARAT

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi, memperkenalkan serangkaian kebijakan progresif yang bertujuan untuk mereformasi sistem pendidikan di provinsi ini.

Langkah-langkah yang diambil tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga pada penegakan prinsip integritas dan transparansi di sektor pendidikan.

Salah satu kebijakan utama yang diusung adalah penghapusan anggaran untuk dana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sekolah, yang sebelumnya mencapai Rp750 miliar.

Dedi Mulyadi menilai bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas belajar mengajar.

"Dana tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada kualitas belajar mengajar,"katanya.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan menahan ijazah siswa, meskipun ada tunggakan biaya.

Menurutnya,

setiap siswa berhak atas pendidikan tanpa ada hambatan administratif yang menghalangi akses mereka terhadap ijazah dan kelulusan.

Sebagai bagian dari upaya meredakan beban orang tua, Dedi Mulyadi juga mengimbau agar sekolah tidak menjadikan pendidikan sebagai ajang komersialisasi.

Ia menyoroti praktik penjualan buku, kegiatan study tour, dan biaya-biaya lain yang sering kali memberatkan orang tua.

Dedi melarang kegiatan study tour atau piknik sekolah yang dinilai tidak memberi manfaat langsung terhadap kualitas pendidikan dan kerap menambah beban finansial bagi orang tua.

"Tidak ada lagi piknik sekolah. Piknik itu di rumah masing-masing," ujar Dedi Mulyadi.

Ia juga menambahkan bahwa penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah harus dihentikan. Soal seragam sekolah, Dedi menegaskan bahwa itu seharusnya menjadi urusan orang tua, bukan sekolah.

Dedi menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memastikan pendidikan yang berkualitas tanpa membebani orang tua dengan biaya-biaya tambahan yang tidak perlu.



"Tujuan utamanya agar bisa memastikan pendidikan yang berkualitas tanpa membebani orang tua," sambungnya.

Selain itu, Dedi Mulyadi juga mengingatkan pentingnya peran guru untuk lebih fokus pada kegiatan belajar-mengajar dan tidak dibebani dengan laporan administratif yang terlalu banyak.

Ia meminta agar Dinas Pendidikan Jawa Barat meminimalkan penggunaan aplikasi administratif yang me-

tongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) saat kunjungan Dedi Mulyadi ke sekolah tersebut.

Hanifah menyatakan bahwa dari total dana PIP sebesar Rp1,8 juta yang diterima siswa, terdapat pemotongan sebesar Rp250.000 yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah.

Dalam pertemuan tersebut, Hanifah menjelaskan bahwa saat pencairan dana PIP di bank, petugas Tata Usaha (TU) sekolah meminta buku tabungan,

Namun, mereka menyatakan bahwa dana hasil pemotongan tidak masuk ke kas sekolah, melainkan disalurkan ke pihak eksternal yang terkait dengan partai politik tertentu.

Setelah kasus ini mencuat, pihak yang terlibat dalam pemotongan dana PIP dikabarkan telah mengembalikan uang tersebut kepada para siswa pada 10 Februari 2025, disertai dengan surat pernyataan di atas materai.

Meskipun demikian, praktisi hukum



nyita waktu dan energi guru, sehingga mereka dapat lebih maksimal dalam mendidik siswa.

"Guru itu tugasnya mengajar bukan buat laporan," tegasnya.

Dengan kebijakan ini, Dedi Mulyadi menunjukkan komitmennya untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan berintegritas, serta memastikan bahwa setiap anak di Jawa Barat dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa hambatan finansial.

Sementara itu, Seorang siswi kelas 12 SMAN 7 Cirebon, Hanifah Kaliyah Arii, mengungkapkan dugaan pemo-

kartu ATM, dan nomor PIN siswa.

"Buku tabungan, kartu ATM dan PIN diberi tahu kepada pihak sekolah. Jadi uang PIP itu dipotong Rp250 ribu," katanya.

Diakui Hanifah, semua PIN ATM siswa disamakan agar mempermudah pengambilan uang tersebut.

Setelah itu, dana yang seharusnya diterima utuh oleh siswa dipotong sebesar Rp250.000 dengan alasan sumbangan untuk partai.

Menanggapi laporan ini, pihak SMAN 7 Cirebon mengakui adanya pemotongan dana PIP tersebut.

menegaskan bahwa pengembalian dana tidak menghapus aspek pidana dari tindakan tersebut.

Kejaksaaan Negeri Kota Cirebon telah memulai pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan pemotongan dana PIP ini untuk proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan pendidikan.

Masyarakat berharap agar pihak berwenang mengambil langkah tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. •



RDPS KOMITMEN FOKUSKAN PROGRAM PRIORITAS 100 HARI

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan Ratu Dewa kepada seluruh warga Palembang yang telah memberikan kepercayaan besar kepada RDPS.

"Kami beserta keluarga dan adinda Prima mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insyaallah, kami akan menjaga amanah ini dan merealisasikan visi-misi yang telah kami janjikan," ucapnya penuh keyakinan.

Untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan ke depan, Ratu Dewa menekankan pentingnya dukungan dan sinergi dari seluruh komponen masyarakat.

"Kami butuh dukungan penuh dari semua pihak. Yakinlah, kami akan bekerja secara maksimal untuk membawa Palembang ke arah yang lebih baik," tegasnya.

Setelah pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan intensif di Magelang pada 21-28 Februari 2025.

"Mohon doa dari semuanya. Selama saya mengikuti pembekalan, Wakil Wali Kota Prima Salam akan menjaga gawang di Palembang," tambahnya.

Setelah menjalani pelantikan Walikota Palembang Ratu Dewa dan Wawako Prima Salam langsung bekerja. Fokus utama mereka adalah menjalankan program prioritas dalam 100 hari pertama.

"Saya sudah kasih kisi-kisi mengenai program saratus hari, kegiatan, dan program sesuai komitmen RDPS kemarin semuanya jadi prioritas," tegasnya.

Kendati itu, Ratu Dewa menyebutkan pada seratus hari kerja ia akan memprioritaskan memperbaiki pelayanan publik, wajah kota, termasuk menyelesaikan permasalahan perusahaan daerah seperti Pasar 16 Ilir Palembang.

“Disamping kita memperkuat regulasi yang sudah saya tandatangani pada fakta integritas. Itu semua menjadi prioritas RDPS,” tuturnya.

Dapat Pohon Ucapan

Ada yang menarik dan sedikit berbeda dari yang lain. Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik ramai dikirim ratusan pohon atau bibit tanaman ucapan pelantikan Ratu Dewa Prima Salam (RDPS). Biasanya ada ratusan papan ucapan hingga memenuhi jalan, namun RDPS agak berbeda.

Kiriman pohon ucapan ini mulai berdatangan dari berbagai OPD di lingkungan Pemkot Palembang. Pohon-pohon ucapan tersebut terdapat ucapan selamat yang bertuliskan berbagai kalimat dukungan dan doa untuk Ratu Dewa Prima Salam.

Beberapa papan juga memuat harapan agar Palembang semakin maju di bawah kepemimpinannya.

Ratu Dewa menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai ucapan selamat yang diterimanya usai pelantikannya, termasuk banyaknya papan bunga ucapan yang dikirimkan.

Menanggapi hal tersebut, Ratu Dewa mengimbau para pelaku usaha papan bunga di Palembang untuk berinovasi dengan menawarkan produk lain yang lebih bermanfaat.

Ia mengusulkan agar papan bunga diganti dengan bibit tanaman yang bisa ditanam untuk mendukung program penghijauan kota, sebagaimana yang dilakukan oleh Bupati Ponorogo.

“Mungkin pelaku usaha bisa berinovasi, bunga plastik bisa diganti dengan bunga asli atau tanaman lain yang lebih bermanfaat,” kata Dewa.

Selain itu, Ratu Dewa menekankan bahwa Kota Palembang masih membutuhkan lebih banyak ruang terbuka hijau. Sehingga masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mendukung upaya penghijauan kota.

Bahkan, Ratu Dewa menyampaikan bahwa Pemerintah Kota juga berencana mengembangkan kawasan perkebunan untuk menampung tanamannya yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penghijauan dan bahkan menghasilkan manfaat ekonomi. ●





AKMAL BAHAGIA DI BUMI ETAM CATATAN UNTUK GUBERNUR TERPILIH

Masa jabatan Akmal Malik sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Timur akan segera berakhir. Ini sejalan dengan akan dilantik pasangan Gubernur Kaltim Terpilih Rudy Mas'ud-Seno Aji pada 20 Februari 2025.

Akmal Malik mengaku bahagia selama menjalani tugas sebagai Penjabat Gubernur Kaltim dan selama setahun lebih masa jabatannya telah banyak menamban khasanah keilmuannya.

"Bahagia ya selama menjabat, banyak sukanya karena bertemu dan dikelilingi banyak orang-orang hebat. Banyak sukanya, kalau duka tidak ada," ungkap Akmal, Selasa, 11 Februari 2025.

Selama menjabat sejak Oktober 2023, Akmal Malik mengaku telah membuat buletin terkait catatan penting permasalahan yang ada di Benua Etam. Catatan itu akan diberikan kepada gubernur terpilih yang diharapkan dapat menjadi arah kebijakan untuk Kaltim yang lebih baik.

"Kita akan kumpulkan seluruh permasalahan penting yang ada di Kaltim, kemudian akan di serahkan ke gubernur terpilih," ucap Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini.

Menurutnya, masih banyak peker-

jaan rumah yang harus dituntaskan oleh pemimpin Kaltim kedepannya. Sebut saja keluhan warga soal jalan rusak hingga terputusnya akses menuju Kutai Kartanegara ke Kutai Barat. Kemudian Kutai Barat ke Mahakam Ulu, Samarinda menuju Bontang, dilanjutkan Ke Kutai Timur hingga ke Berau.

"Termasuk ke area Ibu Kota Nusantara yang diapit dua kabupaten, PPU dan Paser. Jalannya juga masih banyak rusak dan butuh perbaikan," ujarnya.

Akmal Malik pun menegaskan Pemprov Kaltim telah menerima hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim dan pengumuman penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih oleh DPRD Kaltim. Usulan pelantikan akan segera diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.

"Insya Allah segera kita usulkan ke Kementerian Dalam Negeri hasil keputusannya. Pokoknya gerak cepat. Yang jelas, sudah diketahui pelantikan serentak 20 Februari nanti sesuai usulan Ke-

mendagri. Tapi, semua keputusan ada di Presiden,” tegas Akmal.

Akmal juga menyampaikan sejumlah pesan penting kepada Rudy Mas’ud dan Seno Aji yang akan segera menjadi orang nomor satu dan dua di Bumi Mulawarman. Dia menegaskan, transisi pemerintahan yang baik adalah kunci utama untuk memastikan program kerja gubernur baru berjalan lancar. Karenanya, ia menekankan pentingnya menjalankan kebijakan secara amanah, terutama dalam aspek pelayanan publik.

“Pelayanan publik harus di prioritaskan dan di didukung penuh oleh kelemabagaan,” ungkapny.

Selain itu, ia juga menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutny, penggunaan anggaran harus dilakukan secara arif dan bijaksana agar efisien dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam aspek kepegawaian, Akmal meminta gubernur terpilih untuk memastikan bahwa aparatur pemerintah provinsi memiliki indikator capaian kerja yang jelas. “Pegawai harus memberikan hasil dan output sesuai dengan indikator sebagai bentuk kerja nyata,” ujarny.

Akmal juga mengingatkan pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah dan DPRD Kaltim dalam pembangunan Benua Etam ke depannya.

“Membangun hubungan baik dengan DPRD Kaltim diperlukan, agar produk hukum bisa mendukung implementasi pembangunan daerah,” ujarny.

Akmal juga menekankan agar Gubernur Kaltim terpilih dapat meluruskan kepemilikan aset-aset yang ada di Kaltim, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan, serta memastikan tidak ada aset-aset milik Pemprov Kaltim yang mangkrak. Dengan penataan aset itu, Pemprov akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Aset ini harus jelas punya siapa, jangan punya orang nanti diambil,” tegas Akmal.

Akmal menyebutkan, beberapa aset yang kepemilikanny belum jelas yakni Stadion Utama Kaltim di Palaran dan GOR Segiri Samarinda.

“Tanahnya milik kota, bangunan milik provinsi. Terpenting, benahi dulu aset itu yang harus diselesaikan,” terangnya.

Sebelumny, Ketua DPRD Kaltim,

Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan, pengumuman hasil penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih dilakukan berdasarkan Surat KPU Kaltim Nomor 55/PL.02.7-SD/64/2025 tanggal 6 Februari 2025. Surat tersebut berisi usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.

Rapat pleno rekapitulasi suara KPU Kaltim pada 9 Desember 2024 telah menegaskan kemenangan pasangan Rudy-Seno. KPU Kaltim juga telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Nomor

han.

Pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji yang diusung oleh koalisi partai politik berhasil memenangkan Pemilihan Gubernur Kaltim 2024 dengan perolehan 997.344 suara atau 55,6 persen dari total 1.790.315 suara sah. Mereka mengungguli pasangan petahana, Isran Noor dan Hadi Mulyadi, yang meraih 793.322 suara (44,3 persen).

Hasanuddin pun berpesan agar pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji dapat membangun kolaborasi dengan DPRD Kaltim, terutama dalam menjalankan program prioritas pembangunan. “Gu-



14/PL.02.7-BA/64/2025 tentang penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030.

Berdasarkan informasi dari Kemendagri, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih direncanakan pada 20 Februari 2025. Pelantikan ini akan dilakukan secara serentak bersama tujuh wali kota/bupati terpilih di Kaltim yang tidak mengalami sengketa hasil pemili-

bernur terpilih harapanny lebih komunikatif kepada DPRD untuk menjalin kerja sama,” ujarny.

Sementara itu, Rudy Mas’ud dalam kesempatan terpisah menyatakan ke siapanny memimpin Kaltim. “Kami siapkan jiwa dan raga kami kalau perlu. Kami akan mempersiapkan tim transisi dulu untuk pertama ini,” ujar Rudy, Kamis, 6 Februari 2025. ●

SERAP ASPIRASI WARGA RANCANG PEMBANGUNAN 2026

Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menyerap aspirasi warga per desa melalui kecamatan masing-masing dengan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang untuk merancang program kerja yang adaptif, integratif, dan mampu menjawab permasalahan dasar.

Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menjelaskan, Musrenbang diharapkan dapat menghimpun aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan prioritas, permasalahan dasar, sasaran, dan program pembangunan daerah agar dapat diperoleh komitmen dari para pemangku kepentingan.

Musrenbang tersebut dimulai pada pertengahan Februari 2025 di sejumlah kecamatan. Kecamatan Sambaliung menjadi yang pertama menggelar Musrenbang pada Selasa, 11 Februari 2025, dilanjutkan di Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Kelay, dan kecamatan lainnya.

Di Kecamatan Sambaliung, Musrenbang dipimpin oleh Muhammad Said, didampingi Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, dan Camat Sambaliung, Ahmad Juhri, dengan moderator Kepala Bapelitbang Kabupaten Berau, Endah Ernany.

Kecamatan Sambaliung mengajukan 899 usulan, berkurang 128 usulan ketimbang sebelumnya yang berjumlah 1.028 usulan. Sebanyak 899 usulan tersebut terdiri atas 67 usulan bidang pemerintahan, 605 usulan bidang pembangunan fisik, 123 usulan bidang sosial budaya, dan 104 usulan bidang ekonomi.

Rata-rata usulan bidang pembangunan fisik terkait infrastruktur jalan, sekolah, pembangunan dermaga di

Kampung Rantau Panjang dan sejumlah kampung lainnya.

Pada usulan prioritas di bidang sosial budaya, antara lain pemugaran Keraton Sambaliung yang dianggap sudah mendesak karena kerap adanya air yang menggenangi jika hujan deras. Hal tersebut dikhawatirkan dapat merusak bangunan keraton.

Sementara, usulan per kelurahan dan kampung, seperti Kelurahan Sambali-

ung 331 usulan, Kampung Sei Bebanir Bangun sebanyak 58 usulan, Gurimbang 54 usulan, Tanjung Perangat 29 usulan, dan Sukan Tengah 48 usulan.

Lalu, Kampung Suaran 105 usulan, Pesayan 30 usulan, Pijanau 70 usulan, Rantau Panjang 21 usulan, Pegat Bukur 16 usulan, Inaran 33 usulan, Bena Baru 23 usulan, Tumbit Dayak 52 usulan, Long dan Long Lanuk 29 usulan.

"Terkait transformasi ekonomi yang



mempengaruhi kegiatan Pemkab Berau ke depan, diharapkan program yang diusulkan dapat menstimulasi pembangunan. Tentunya dengan efisiensi anggaran, kita harap program tetap terlaksana dengan baik,” ujar Said.

Musrenbang di Kecamatan Teluk Bayur mengakomodasi 450 usulan, kemudian di Kecamatan Kelay sebanyak 212 usulan.

Di Kecamatan Teluk Bayur, diserahkan bantuan peralatan/mesin kemasan coklat kepada Kelompok Kulanta, penyerahan sertifikat TKDN atas nama Nur Alif Ahmad Daroini (Madu Nisbat) di Kelurahan Rinding dan Novi Dwi Kristian Putri (Moci Coklat).

Said mengatakan, rumusan dan hasil Musrenbang dalam pertemuan ini adalah komitmen bersama, sehingga ke depan akan segera dilaksanakan dalam rangka mengawal progres pembangunan yang akan datang.

‘Apapun yang dihasilkan dari pelaksanaan Musrenbang ini merupakan kegiatan yang sangat tepat sasaran, yang mana mampu untuk menyejahterakan masyarakat secara luas,’ tegasnya.

Musrenbang di Kecamatan Teluk Bayur tahun ini menyampaikan total sebanyak 452 usulan dari Kampung Labanan Jaya, Makarti, Makmur, Kampung Tumbit Melayu, Kelurahan Rinding dan Teluk Bayur.

Dari jumlah usulan tersebut, di dominasi prasana jalan dan sistem drainase, penerangan jalan umum (PJU), Sistem Penyediaan Air Bersih dan Bantuan Rumah Ibadah, serta sarana prasarana dan utilitas sekolah tingkat SD/SMP.

Pada Musrenbang di Kecamatan Kelay, pemenuhan infrastruktur dasar kembali menjadi usulan prioritas. Camat Kelay, Thoris, menjelaskan, hasil Musrenbang tingkat kampung yang dilaksanakan 20 Januari hingga 7 Februari 2025 menghasilkan 224 usulan.

“Usulan ini telah kami masukan dalam SIPD, dan yang berhasil di-input hanya 212 usulan. Untuk sementara sisanya kami batalkan. Meski demikian, kami tetap berharap usulan yang tidak masuk ini bisa diakomodir, mengingat masih menjadi prioritas kebutuhan kampung,” ungkap Thoris.

Thoris mengatakan, usulan-usulan kebutuhan dasar yang dia sampaikan

tersebut di antaranya listrik, air bersih, jalan, jembatan dan telekomunikasi. Sedangkan, salah satu kebutuhan masyarakat di antaranya jalan tembus dari ibu kota kecamatan ke semua kampung.

“Kemudian kebutuhan jaringan telekomunikasi. Hal ini untuk mendukung penerapan smart city. Terlebih lagi dalam tahun ini presensi online mulai diberlakukan, sehingga kami sangat membutuhkan,” ungkap Thoris.

Dia juga mengungkapkan terkait masalah tapal batas kampung yang hingga kini belum rampung. Sehingga, Kampung di Kelay terkendala dalam mengikuti perlombaan di tingkat provinsi dan nasional karena belum bisa menyusun profil kampung.



Selain itu, kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan pun masih menjadi persoalan utama. Beberapa Puskesmas Pembantu (Pustu) dan sekolah mengalami kekurangan SDM yang berdampak pada pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi tidak maksimal.

“Ini karena dampak kebijakan regulasi. PTT yang belum dua tahun mengabdikan tidak bisa diperpanjang kontrak kerjanya,” ungkap Thoris.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Warji, menuturkan, pada tahun ini, ada beberapa program pembangunan yang akan dijalankan di Kelay. Di antaranya lanjutan pembangunan jalan poros Muara Lesan-Merasa, jalan poros lingkaran Muara Lesan-Kelay, pembangunan jalan Merapun-Muara Lesan, jalan poros Panaan, lanjutan

pembangunan jembatan Muara Lesan, dan peningkatan akses Wi-Fi gratis untuk masyarakat.

“Untuk kesehatan, akan ada penambahan ruang bersalin di Merapun, rehab total Pustu Merapun, rumah dinas di Long Boy. Ada juga bantuan pupuk, 8.000 bibit kakao, dan bibit bawang untuk petani,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Warji mendorong seluruh kepala kampung dapat menggali dan memaksimalkan potensi di kampungnya. Kolaborasi dengan berbagai pihak, Pemkab Berau akan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan potensi yang ada.

“Banyak sektor potensial yang masing-masing kampung, yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan pereko-

nomian di kampung, dan Pemkab Berau siap memberikan dukungan apa yang menjadi kebutuhan masing-masing kampung,” ujarnya.

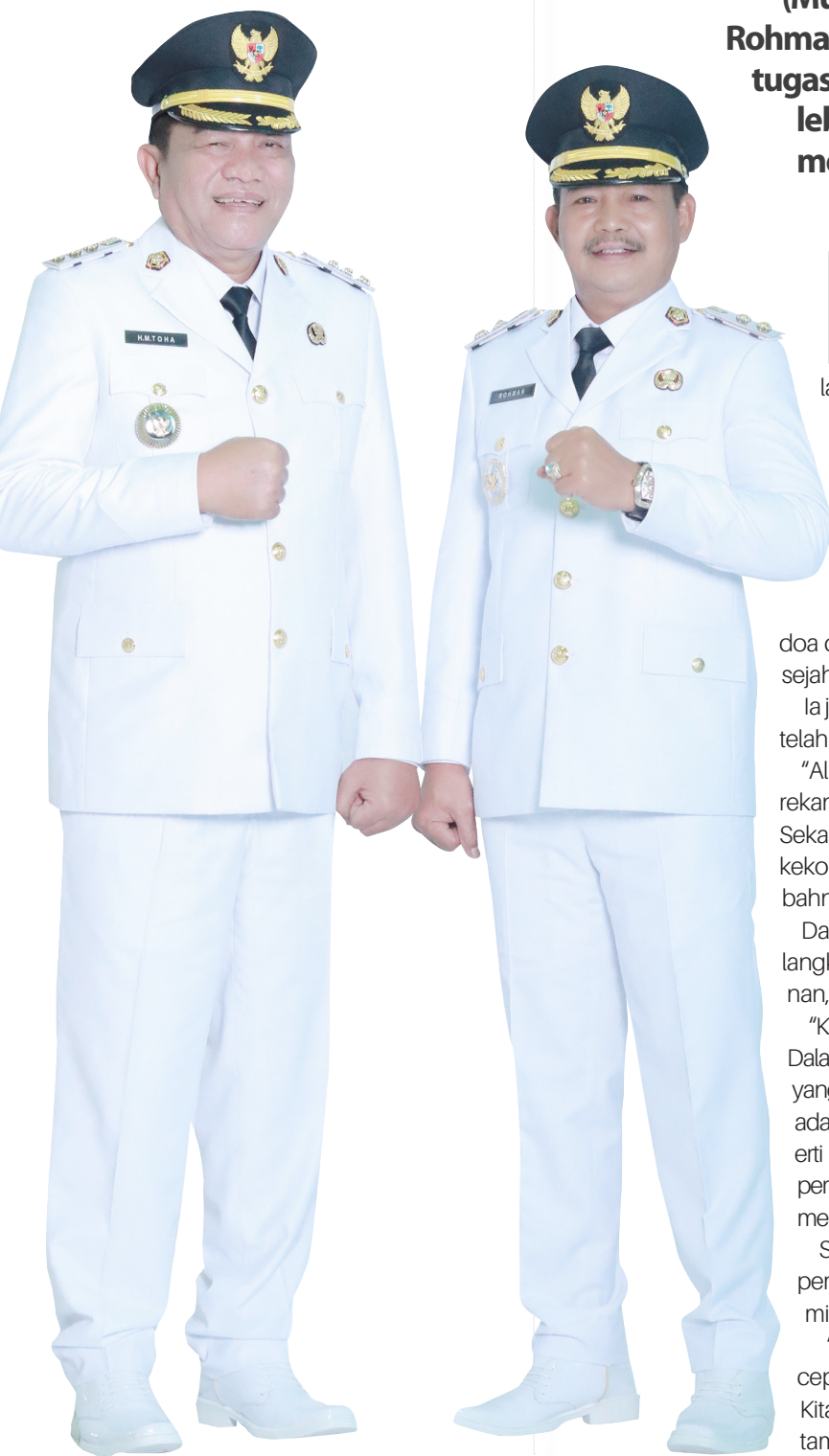
Sementara, pada Musrenbang di Kecamatan Segah, Noor Alam selaku Camat menyampaikan apresiasi atas perhatian yang telah diberikan pemerintah daerah dalam pemenuhan infrastruktur, khususnya jalan poros menuju kecamatan.

Selain jalan, kebutuhan air bersih menjadi perhatian utama di Segah, termasuk jembatan bailey. Memasuki musim hujan saat ini, beberapa kampung mengalami bencana banjir yang mengakibatkan aktivitas masyarakat cukup terganggu.

“Hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat kita karena kesulitan dalam akses jalan,” tegasnya. ●

KOMITMEN JALANKAN PROGRAM PRIORITAS

Setelah resmi dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Bupati Musi Banyuasin (Muba) H M Toha SH dan Wakil Bupati Muba Rohman langsung bergerak cepat menjalankan tugasnya membangun Kabupaten Muba agar lebih cepat maju lagi. Salah satu komitmen mereka adalah mengentaskan kemiskinan dalam 100 hari pertama kerja.



Dalam sambutannya, Bupati Muba H M Toha SH menyampaikan rasa syukur serta komitmennya untuk membawa perubahan bagi Muba. Mereka juga meminta doa serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Muba. Bupati juga menyampaikan rasa syukur serta komitmennya untuk membawa perubahan bagi Muba.

"Alhamdulillah, hari ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memulai pengabdian kepada masyarakat Muba. Amanah yang diberikan ini akan kami jalankan dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab, serta mengedepankan kepentingan rakyat. Kami mohon doa dan dukungan semua pihak agar Muba semakin maju dan sejahtera," ujar H M Toha SH.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya.

"Alhamdulillah, hari ini kita resmi dilantik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendukung dan mensupport kami. Sekarang, tugas kita adalah membangun Muba dengan penuh kekompakan. Insyaallah, Muba akan maju lebih cepat," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Bupati Muba menegaskan bahwa langkah awal pemerintahannya adalah memberantas kemiskinan, terutama dalam 100 hari kerja pertama.

"Kita tidak bisa menunggu lama untuk melakukan perubahan. Dalam 100 hari kerja pertama, kami akan fokus pada program nyata yang langsung menyentuh masyarakat. Pengentasan kemiskinan adalah prioritas utama kami, dengan langkah-langkah konkret seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan perbaikan infrastruktur. Ini bukan sekadar janji, melainkan komitmen yang harus kita wujudkan bersama," tegasnya.

Selain itu, Bupati Muba juga mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk bekerja sama demi mewujudkan visi dan misi daerah.

"Tolong kita terus usahakan supaya Muba bisa maju lebih cepat. Kepada kepala dinas dan DPRD, mohon kerjasamanya. Kita berkomitmen untuk menghentikan kemiskinan di Muba," tambahnya.

Untuk memperkuat strategi kepemimpinannya, Bupati Toha juga mengungkapkan bahwa setelah pelantikan, dirinya akan mengikuti retret di Magelang.

"Mudah-mudahan acara itu berjalan dengan lancar. Insyaallah, mental kita semakin kuat untuk menghadapi tantangan ke depan. Kita memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk membawa Muba ke arah yang lebih baik," katanya.

Menuju Kemajuan Cepat dan Merata

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Kabupaten Muba kini memasuki babak baru menuju kemajuan yang lebih cepat dan merata bagi seluruh masyarakat.

Selain fokus pada pengentasan kemiskinan, ada banyak program yang akan diluncurkan pada kepemimpinan Bupati HM Toha dan Wakil Bupati Rohman ini. Diantaranya program tambahan dana desa sebesar Rp1,5 miliar per desa.

Menurutnya, dana tambahan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian desa dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan perekonomian lokal.

Dengan dana ini, desa-desa akan lebih inovatif dan mandiri dalam mengelola sumber daya mereka," jelas Toha.

Masyarakat Muba juga sangat antusias terhadap program-program pro rakyat yang akan segera ditindaklanjuti Bupati HM Toha dan Wakil Bupati Rohman. Tagline "Muba Maju Lebih Cepat" bukan hanya sekedar jargon, tetapi merupakan komitmen nyata untuk membawa perubahan yang positif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Program pembangunan yang menjadi fokus Bupati HM Toha dan Wabup Rohman adalah :

1. **Peningkatan Infrastruktur.** Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya akan menjadi prioritas utama untuk mendukung mobilitas warga dan meningkatkan aksesibilitas ke berbagai layanan.
2. **Pelayanan Kesehatan yang Optimal.** Memperkuat fasilitas kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan medis untuk memastikan kesehatan masyarakat terjaga dengan baik.
3. **Pendidikan Berkualitas.** Program

beasiswa dan pelatihan untuk guru akan diimplementasikan untuk menghasilkan generasi muda yang cerdas dan siap bersaing.

4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal.

Dukungan terhadap UMKM dan pengembangan sektor pertanian untuk menciptakan lapangan kerja

dialog untuk mendengar aspirasi warga.

Untuk itu Bupati H M Toha dan Wakil Bupati Rohman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dalam mewujudkan visi ini. Dengan semangat kerja keras dan inovasi, mereka percaya bahwa Muba dapat melangkah lebih ce-



dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. **Keterlibatan Masyarakat.** Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sebagai kunci sukses, dengan ruang

pat menuju masa depan yang lebih baik.

"Mari kita sambut kepemimpinan baru dengan dedikasi dan komitmen untuk bersama-sama membawa Kabupaten Musi Banyuasin menuju kemajuan yang nyata. Bersama kita bisa!" •adv

MENUJU MUBA MAJU LEBIH CEPAT

Bupati-Wakil Bupati Musi Banyuasin (Muba) Terpilih Periode 2025-2030, HM Toha SH dan Rohman, resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Negara, Jakarta Pusat. Setelah pelantikan, keduanya langsung melaksanakan tugas.

"Kami berkomitmen untuk memimpin Muba dengan amanah dan membawa perubahan yang lebih baik selama lima tahun kedepan," kata Bupati HM Toha.

Bupati Toha menyatakan bahwa dia dan Wakil Bupati Rohman akan berfokus pada percepatan pembangunan dan pembenahan di semua sektor untuk kemajuan masyarakat Muba.

"Saat ini bukan lagi visi misi Toha-Rohman, tetapi visi misi demi kebaikan seluruh lapisan dan masyarakat Muba untuk Muba Maju lebih cepat," ungkap Toha.

Sementara Wabup Rohman menegaskan komitmennya untuk berkoordinasi dengan Sekda dan seluruh OPD Pemkab Muba, serta siap menjalankan program kerja demi mewujudkan Muba yang lebih maju.

Masyarakat Muba sendiri sangat antusias terhadap program-program pro rakyat yang akan segera ditindaklanjuti Bupati HM Toha dan Wakil Bupati Rohman. Tagline "Muba Maju Lebih Cepat" bukan hanya sekedar jargon, tetapi merupakan komitmen nyata un-



tuk membawa perubahan yang positif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Semangat Kolaborasi Bersama

Bupati H M Toha dan Wakil Bupati Rohman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dalam mewujudkan visi ini. Dengan semangat kerja keras dan inovasi, mereka percaya bahwa Muba dapat melangkah lebih cepat

menuju masa depan yang lebih baik.

"Mari kita sambut kepemimpinan baru dengan dedikasi dan komitmen untuk bersama-sama membawa Kabupaten Musi Banyuasin menuju kemajuan yang nyata. Bersama kita bisa," katanya.

Program unggulan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muba HM Toha dan Rohman, salah satunya pemberian bantuan modal usaha.

Kini mereka bersiap menjalankan visi, misi dan program unggulan yang telah disosialisasikan saat kampanye.

Ada 17 program unggulan pro-rakyat yang akan direalisasikan Bupati HM Toha dan Wabup Rohman untuk Kabupaten Musi Banyuasin yakni:

1. Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim
2. Program Penataan BUMD dan Kemandirian Daerah
3. Program Pengembangan UMKM dan Usaha Rakyat
4. Program Peningkatan Lapangan Kerja Berkualitas
5. Program Penguatan Moderasi Beragama Dan Ekonomi Keumatan
6. Program Penguatan Sosial Budaya Dan Pemuda
7. Program Transformasi Pendidikan, "Semua Harus Sekolah"
8. Program Beasiswa Prestasi

dimulai dalam 100 hari kerja dari Bupati HM Toha dan Wabup Rohman yakni:

- Sikat korupsi menuju pemerintahan bersih
- Program Keluarga Maju (PKM) untuk pengentasan kemiskinan
- Akte, KK, dan KTP Gratis sampai di rumah
- Mewujudkan Desa Mandiri, dan tambahan satu desa Rp 1,5 miliar dan mobil operasional setiap kepala desa
- Sekolah Gratis untuk negeri dan swasta
- One Student, One Sport
- Beasiswa prestasi sampai sarjana
- Peningkatan gaji guru swasta (madrasah dan pesantren)
- Bantuan Sayang Anak (Basanak)
- Infrastruktur Kawasan Sentra Produksi dan pusat pertumbuhan
- Bantuan guru mengaji (Bajig)

menjadi solusi nyata bagi masyarakat Muba dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Selain itu, Toha menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah infrastruktur jalan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

Banyak jalan desa dan jalan kabupaten yang mengalami kerusakan parah, menghambat mobilitas masyarakat, terutama petani yang ingin mendistribusikan hasil pertaniannya.

"Kami akan melakukan inventarisasi jalan yang menjadi prioritas perbaikan. Infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," bebernya.

Untuk itu, mereka berdua berencana untuk memperkuat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah utama dalam menyerap aspirasi rakyat secara langsung.



9. Program Penguatan Imunitas Kesehatan
10. Program Peningkatan Layanan Kesehatan
11. Program Infrastruktur Ketahanan Pangan
12. Program Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
13. Program Smart Government Dan Inovasi Daerah
14. Program Percepatan Tata Pemerintahan
15. Program Penyelarasan Kehidupan Harmonis Dengan Lingkungan
16. Program Peningkatan Nilai Tambah SDA
17. Program Penanganan Bencana

- Bantuan modal usaha UMK, petani dan nelayan
 - Penyediaan infrastruktur dan pemberdayaan disabilitas
 - Santunan kematian dan fakir miskin
 - Ekosistem industri halal
 - Revitalisasi Posyandu, Posbindu, UKS, Poskesdes dan Poskestren
 - Menciptakan iklim usaha yang aman, nyaman dan sehat
 - Digitalisasi dan klinik usaha
 - Memperluas jaringan gas rumah tangga
 - Legalisasi lahan dan kawasan hutan
 - Program bantuan bibit, pertanian, perkebunan, dan perikanan
 - Bantuan operasional rumah ibadah
- Program prioritas ini diharapkan dapat

Menurutnya, menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal jabatan. Lebih dari itu, tanggung jawab moral yang besar, baik di dunia maupun di akhirat.

Dia menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat bawah.

Menurutnya, kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengayomi ratusan hingga ribuan kepala keluarga di wilayahnya masing-masing.

"Saya ingin menanamkan kepada kepala desa bahwa kepemimpinan bukan hanya soal dunia, tapi juga menyangkut pertanggungjawaban di akhirat. Maka, nilai-nilai spiritualitas harus diperkuat dalam kepemimpinan," pungkasnya. ●



KAWAH PUTIH “PRIMADONA” WISATA DI BANDUNG

Kawah Putih terletak di Ciwidey, sekitar 50 kilometer ke arah selatan dari Kota Bandung dan memang sudah lama terkenal sebagai salah satu destinasi wisata utama di Jawa Barat.

Pesona alam di area ini masih saja memukau dan karena itulah Kawah Putih menjadi tempat wisata yang wajib kamu kunjungi saat berlibur ke Bandung.

Berada di ketinggian 2.430 meter di atas permukaan laut, Kawah Putih di Bandung ini merupakan satu dari dua kawah di Gunung Patuha. Sebenarnya area ini merupakan kawah vulkanik, namun sudah tidak pernah terlihat adanya aktivitas yang signifikan sejak beratus-ratus tahun, sehingga aman untuk dikunjungi.

Kawah Putih merupakan danau dengan tingkat keasaman yang tinggi. Bau sulfur pun cukup kencang, sehingga disarankan untuk mengenakan masker saat berwisata ke area ini.

Jangan lupa juga mengenakan jaket atau baju tebal karena suhu udara di Kawah Putih cukup dingin, berkisar

antara 8 sampai 22 derajat Celcius.

Namun, jangan sampai bau sulfur dan udara dingin menghalangimu untuk menikmati pesona alamnya karena justru dua unsur ini yang mempengaruhi ‘primadona’ di Kawah Putih, yaitu warna airnya.

Ya, Kawah Putih terkenal akan airnya yang cantik, terkadang biru, terkadang coklat dan tak jarang pula terlihat perpaduan warna indah hijau dan putih. Alam di Kawah Putih semakin memesona dengan pasir dan batu di sekitarnya yang berwarna putih akibat terkena air asam, serta lapisan kabut yang membuat suasana area ini lebih menakutkan.

Selain menikmati alamnya yang menawan, inilah beberapa aktivitas yang tak boleh kamu lewatkan saat berada di Kawah Putih, tentu saja hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengambil banyak foto.

Jadi, jangan lupa bawa kamera agar kamu bisa mengabadikan momen liburanmu di setiap sudut di Kawah Putih.

Kamu juga bisa naik Ontang-Anting. Ini bukan wahana di taman rekreasi, melainkan mobil terbuka. Dengan biaya sebesar Rp15.000/orang, mobil ontang-anting dapat mengantarkanmu dari area parkir bawah ke Kawah

Putih dan sebaliknya.

Kawah Putih juga dikelilingi oleh hutan yang bisa kamu jelajahi. Ada beberapa rute hiking yang bisa kamu lalui. Ikuti jalan setapaknya sampai ke puncak Gunung Patuha dan nikmati pemandangan Kawah Putih dan alam sekitarnya dari ketinggian.

Area hutannya juga dipenuhi oleh flora dan fauna menawan. Mungkin saja kamu akan menemukan bunga Edelweis dan melihat burung elang, burung hantu, babi hutan dan masih banyak lagi.

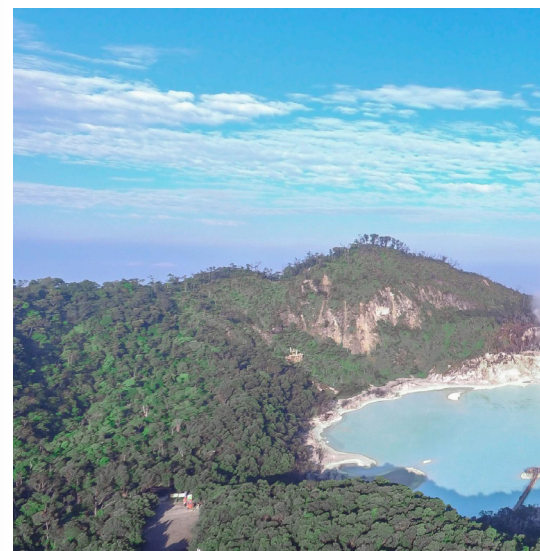
Wisata dan Aktivitas Seru di Kawah Putih Bandung:

1. Menikmati Keindahan Kawah Putih

Pemandangan utama adalah danau kawah yang unik dengan air berwarna putih kehijauan dan kabut tipis yang menambah kesan mistis. Cocok untuk foto-foto Instagramable.

2. Berfoto di Spot-spot Menarik

- Dermaga Ponton: Sebuah jembatan kayu yang menjorok ke danau, memberikan latar belakang yang sempurna untuk foto.
- Batu Cinta: Tempat ini memiliki legenda romantis dan sering dijadikan spot foto prewedding.
- Pohon Cantigi: Pohon dengan ba-



tang unik dan warna kemerahan yang sering dijadikan latar foto estetik.

3. Trekking dan Menjelajahi Alam

Bagi yang suka petualangan, bisa trekking di sekitar Kawah Putih sambil menikmati udara segar dan pemandangan pegunungan.

4. Naik Ontang-Anting

Kendaraan khas Kawah Putih yang membawa pengunjung dari area parkir menuju kawah. Sensasi naik angkutan terbuka ini cukup menyenangkan!

5. Mengunjungi Ranca Upas

Hanya berjarak sekitar 10 menit dari Kawah Putih, Ranca Upas adalah tempat konservasi rusa dan area camping yang asri.

6. Menikmati Kopi di Warung Kopi Gunung

Setelah puas berkeliling, mampirilah ke warung kopi di sekitar area wisata untuk menikmati kopi khas Ciwidey dengan pemandangan pegunungan.

7. Wisata Kuliner di Sekitar Kawah Putih

Jangan lupa mencicipi makanan khas seperti jagung bakar, bandrek, dan peuyeum (tape singkong) yang banyak dijual di sekitar kawasan wisata.

Jika kamu berencana mengunjungi wisata Kawah Putih di Bandung, ada beberapa tips terbaru untuk memastikan kunjungan kamu berjalan lancar dan menyenangkan:

Berikut ini tips wisata Kawah Putih di Bandung:

1. Waktu Kunjungan yang Tepat:

- Pagi Hari: Disarankan untuk datang pagi-pagi sekali, terutama saat musim kemarau, untuk menghindari keramaian dan menikmati pemandangan terbaik sebelum kabut turun. Kawah Putih buka mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB.

2. Persiapan Fisik dan Perlengkapan:

- Pakaian Hangat: Suhu di Kawah Putih cukup dingin karena berada di ketinggian 2.430 meter di atas permukaan laut. Kenakan jaket atau pakaian hangat.
- Masker: Bau belerang bisa cukup menyengat. Membawa dan menggunakan masker dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan.
- Sepatu Nyaman: Gunakan sepatu yang nyaman dan anti-slip untuk berjalan di area kawah.

3. Transportasi:

- Kendaraan Pribadi: Jika membawa mobil pribadi, kamu bisa parkir di area parkir bawah dengan biaya Rp6.000. Untuk mencapai kawah, kamu dapat menggunakan transportasi lokal bernama "Ontang Anting" dengan tarif Rp20.000 per orang.
- Ontang Anting: Alternatif lain adalah memarkir kendaraan di area parkir atas dengan biaya Rp150.000, yang memungkinkan Anda lebih dekat ke kawah.

4. Durasi Kunjungan:

- Karena paparan gas belerang, disarankan untuk tidak berlama-lama di dekat kawah. Jika merasa pusing atau tidak nyaman, segera menjauh dan istirahat.

Aktivitas Tambahan:

- Fotografi: Bawa kamera atau smartphone dengan baterai penuh untuk mengabadikan keindahan kawah.
- Kunjungan ke Tempat Lain: Manfaatkan perjalanan kamu dengan mengunjungi destinasi terdekat seperti Situ Patenggang dan Kebun Strawberry di Ciwidey.

Kondisi Cuaca:

- Periksa prakiraan cuaca sebelum berangkat. Hindari berkunjung saat hujan deras karena jalur bisa licin dan pemandangan tertutup kabut. Kawah Putih bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga

cerita-cerita mistis yang melingkupinya. Tempat ini memiliki sejarah panjang yang diyakini terkait dengan legenda masyarakat setempat, salah satu mitos yang terkenal adalah larangan mendekati kawah pada masa lampau karena diyakini angker dan berbahaya.

Hal ini konon berkaitan dengan adanya binatang-binatang yang mati akibat gas belerang yang menyelimuti kawah.

Legenda Kawah Putih berakar pada kisah Sunan Gunung Jati, seorang wali yang dianggap memiliki kemampuan spiritual tinggi.

Dikisahkan, beliau menenangkan aktivitas vulkanik di tempat ini dengan doa dan kekuatannya. Setelah peristiwa itu, kawasan kawah mulai tenang dan kemudian menjadi tujuan spiritual.

Kisah ini memperkuat keyakinan bahwa Kawah Putih bukan sekadar lokasi wisata, tetapi juga tempat dengan nilai sakral.

Selain itu, Kawah Putih sering dihubungkan dengan kehadiran makhluk gaib yang menjaga kawah. Dalam cerita rakyat, terdapat kepercayaan tentang sosok "penjaga gaib" yang melindungi tempat ini, kepercayaan ini membuat masyarakat lokal sering mengadakan ritual tertentu sebelum memasuki kawasan kawah yang bertujuan untuk menunjukkan rasa hormat kepada para penjaga tak kasatmata.

Keunikan warna air di Kawah Putih, yang berubah-ubah sesuai dengan kadar belerang dan cuaca, juga dianggap mistis oleh masyarakat.

Warna yang berubah ini sering dikaitkan dengan pertanda alam atau pesan dari para leluhur. Meskipun secara ilmiah dapat dijelaskan, unsur misterius ini tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Mitos dan legenda di Kawah Putih memunculkan daya tarik yang lebih mendalam bagi wisatawan, terutama mereka yang menyukai sejarah dan cerita mistis.

Cerita ini menambah pengalaman spiritual dan budaya, untuk kunjungan menjadi lebih bermakna. Bahkan, beberapa wisatawan datang khusus untuk mencari nuansa magis yang diyakini ada di tempat ini. ●



MAKANAN KHAS BANDUNG MEMANG NGANGENIN BANGET

Bukan hanya pesona dan wisata, kuliner khas Bandung memang ngangenin banget. Bahkan, makanan khas Bandung dan Jawa Barat memang tidak ada yang mengecewakan dan jadi salah satu alasan kenapa banyak orang suka liburan ke Bandung lagi, dan lagi.

Ada banyak banget makanan enak di Bandung, apalagi makanan khasnya. Kamu pun bisa menemukannya di mana-mana, dari restoran mewah hingga kaki lima.

Beberapa rekomendasi kuliner khas Bandung dengan rasa yang enak

1. Siomay

Siomay merupakan makanan revolusi dari salah satu varian dimsum khas Chi-

dengan dimsum shumai yang disajikan dengan saus cabai.

Meski siomay sudah mudah ditemukan di daerah lain, tapi masih belum ada yang bisa mengalahkan Bandung sebagai pusatnya siomay enak. Tidak harus di tempat terkenal, siomay pinggir jalan di Bandung pun rata-rata lezat.

Jangan bingung ya kalau menemukan istilah baso tahu di pedagang-pedagang siomay di Bandung. Soalnya baso tahu adalah sebutan dari orang Bandung untuk makanan khas ini.

Tempat Terbaik Menikmati Siomay Bandung

- Baso Tahu Mang Ade, Jalan Ternate, Bandung
- Baso Tahu Shin Chan, Jalan Cikawao No. 43 atau Pujasera Buah Batu, Bandung
- Batagor & Siomay Kingsley, Jalan Veteran No. 25, Bandung
- Batagor Siomay Riri, Jalan Burangrang No. 41, Bandung

2. Batagor

Batagor adalah "saudara dekat siomay" karena memang bedanya ada di cara me-

atau batagor? Di banyak tempat, kamu malah tidak harus memilih, karena kamu bisa menikmatinya bersamaan dengan bumbu kacang yang khas.

Tempat Terbaik Menikmati Batagor Bandung

- Batagor Yunus, Jalan Kopo No. 68
- Batagor Abuy, Jalan Lengkong Besar No. 47
- Batagor & Siomay Kingsley, Jalan Veteran No. 25
- Batagor Siomay Riri, Jalan Burangrang No. 41

3. Pisang Bolen

Nah, kalau makanan khas Bandung yang satu ini biasanya jadi salah satu oleh-oleh wajib kalau liburan ke Bandung. Pisang bolen adalah semacam pastry berbentuk kubus berisi pisang dan dimasak dengan dipanggang.

Selain rasa original, pisang bolen juga biasanya memiliki ragam rasa seperti rasa coklat dan keju.

Tempat Terbaik Menikmati Pisang Bolen Bandung

- Kartika Sari, Jalan Kebon Kawung No. 43



nese, shumai, ini memang lezat banget, berupa dumpling dengan luaran kulit khas yang diisi dengan adonan dari ikan tenggiri dan dimasak dengan steam.

Siomay disajikan dengan bumbu kacang yang Indonesia banget, beda

masaknya, kalau siomay dikukus, batagor dimasak dengan digoreng. Sesuai namanya batagor memang merupakan kepanjangan dari baso tahu goreng.

Di antara dua makanan khas Bandung ini, mana yang lebih kamu suka, siomay

- Mayasari Bakery, Jalan Kebon Kawung No. 22

4. Bandros

Bandros adalah kue tradisional yang dibuat dari tepung beras, parutan kelapa, dan santan. Makanan khas ini mirip

banget dengan kue pancong yang merupakan kue tradisional Betawi, beberapa sumber bahkan menyebut tidak ada perbedaan bahan di antara keduanya.

Meski begitu, menikmati Bandros di taman sambil menikmati sore di Bandung jelas pengalaman yang gak bisa kamu dapatkan di kota lain. Guruhnya kelapa di lembutnya bandros memang tiada duanya.

Tempat Terbaik Menikmati Bandros Bandung

- Bandros Hebab, Jalan Japati No. 1
- Bandros Cowboy Cisangkuy, Jalan Cisangkuy No. 56
- Kue Balok Kang Didin, Jalan Abdurrahman Saleh No. 52

5. Surabi Oncom

Di antara berbagai topping pilihan di surabi, tidak ada yang lebih Bandung daripada surabi oncom. Makanan khas Bandung yang satu ini memang enak banget kamu temukan saat liburan ke Kota Kembang. Berupa semangkuk mie dengan kuah kaldu sapi kental dan dilengkapi dengan kikil, tauge, bakso, dan ditaburi seledri, bawang goreng, dan juga jeruk nipis.

Tempat Terbaik Menikmati Surabi Oncom Bandung

- Surabi Cihapit, Jalan Cihapit
- Waroeng Setiabudhi, Jalan dr. Setiabudi
- Surabi Imut, Jalan dr. Setiabudi

6. Nasi Tutug Oncom

Oncom memang enak dikombinasikan dengan surabi, tapi oncom dan nasi adalah sahabat karib yang tak boleh dilepaskan dari kuliner Bandung.

Itulah kenapa Nasi Tutug Oncom juga wajib dapat tempat di daftar ini, karena bayangkan saja nasi panas dikombinasikan dengan oncom, lalu disajikan dengan berbagai lauk pauk dan tentu saja sambal.

Tempat Terbaik Menikmati Nasi Tutug Oncom Bandung

- Warung Talaga, Mall Cihampelas Walk
- Kedai Nining, Mardeka Food Stall, Jalan Purnawarman No. 10-12
- Nasi Tutug Oncom Bobotoh, Jalan A.H. Nasution No. 11

7. Sate Jando

Di antara banyak tempat sate leg-

endaris di Bandung, Sate Jando adalah salah satu yang paling unik dan salah satu yang perlu kamu coba kalau liburan ke Bandung. Sate ini memang bukan sekadar dibuat dengan daging biasa, tetapi menggunakan bagian jando sapi atau lemak susu sapi.

Ridwan Kamil saja sampai ikut mempromosikan makanan khas Bandung ini suatu waktu. Walau sate jando hanya disajikan di pinggir jalan di Gasibu, dekat Gedung Sate, tapi dari masyarakat biasa sampai pejabat sekalipun sudah sering datang dan menikmati makanan khas ini.

Tempat Terbaik Menikmati Sate Jando Bandung

- Sate Jando Gasibu, Jl. Hayam Wuruk

8. Mie Kocok

Mie Kocok Bandung adalah salah satu makanan khas Bandung lainnya yang gampang banget kamu temukan saat liburan ke Kota Kembang. Berupa semangkuk mie dengan kuah kaldu sapi kental dan dilengkapi dengan kikil, tauge, bakso, dan ditaburi seledri, bawang goreng, dan juga jeruk nipis.

Tempat Terbaik Menikmati Mie Kocok Bandung

- Mie Kocok Persib, Jalan Ahmad Yani No. 262
- Mie Kocok Mang Dadeng, Jalan Banteng No. 67
- Mie Kocok Cepay, GOR Pajajaran (06.00 - 09.00), Jalan Samiaji (10.00 - 16.00)
- Mie Kocok Semar, Jalan Pasirkaliki No. 65
- Mie Kocok SKM, Jalan Sunda No. 38

9. Cuanki

Faktanya, cuanki berbeda dengan bakso malang. Meski sekilas penyajiannya memang mirip, tetapi dari segi isian maupun gaya pembuatan kuah, keduanya berbeda.

Cuanki biasanya berisikan siomay goreng, siomay kukus, bakso halus, dan tahu, yang direbus dulu bersama kuahnya selama beberapa saat sebelum disa-



ikan di mangkok. Beda dengan bakso malang yang isianya tidak direbus dulu, melainkan disiram kuah di mangkok.

Selain itu, kuah cuanki juga lebih kental dan gurih ketimbang bakso malang karena bumbu, penyedap, dan kaldu dibuat bersamaan. Intinya, belum ke Bandung kalau belum coba cuanki.

Tempat Terbaik Menikmati Cuanki Bandung

- Cuanki Serayu, Jalan Serayu No. 2
- Cuanki CLBK, Jalan Senang No. 28/34A
- Cuanki Endos, Jalan Kliningan No. 1

10. Gepuk

Kalau rendang dan dendeng adalah makanan dari daging yang khas dari daerah Sumatera Barat, gepuk adalah khas Jawa Barat. Tak kalah nikmatnya dari dua saudara jauhnya itu, gepuk biasanya dibuat dari daging sapi, yang direbus setengah matang lalu dipukul-pukul hingga empuk, kemudian dimasak lagi dengan santan sampai menyusut.

Ketika akan disajikan, daging digoreng dulu, lalu jadilah gepuk. Kalau sedang liburan ke Bandung, mampir ke rumah makan sunda yang menyajikan gepuk adalah keharusan. Apalagi kalau disajikan sama nasi tutug oncom. •





SIAPKAN 30 NAMA UNTUK PATRICK KLUIVERT

Hingga saat ini tim kepelatihan Patrick Kluivert belum membentuk skuad untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Dua asisten pelatih Alex Pastoor dan Denny Landzaat masih sibuk berkeliling memantau pemain di Liga 1 Indonesia yang hingga kini belum ada yang memuaskan.

Guna memudahkan kerja Patrick Kluivert, PSSI telah menyiapkan 30 nama pemain yang selama ini sudah memperkuat Timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Shin Tae Yong.

Mereka yang masuk daftar titipan PSSI ini sebagian pemain naturalisasi, ada yang bermain di liga lokal Indonesia serta beberapa yang memperkuat Liga-liga Asia. Meski sudah masuk daftar namun hingga kini Patrick Kluivert dan para asistennya belum menentukan siapa saja yang akan memperkuat Timnas Indonesia.

Ujian pertama Patrick Kluivert tentu saja pentas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan Maret dengan menghadapi tuan rumah Australia pada 20 Maret serta menjamu Bahrain di tanggal 25 Maret mendatang.

Tidak seperti Shin Tae Yong yang mendapat beban berat dengan target lolos Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dan para asistennya malah tidak dibebankan apapun di kualifikasi ini.

Artinya, menang dan lolos adalah bonus yang didapat PSSI sekaligus bisa

membuktikan mereka tidak salah pilih mengganti Shin Tae Yong dengan Patrick Kluivert.

Sementara kalah dan gagal, hal itu dianggap sebagai bagian pembinaan sepakbola Indonesia untuk menuju prestasi yang lebih baik lagi.

Keputusan inil memicu perdebatan sepakbola nasional, suporter Timnas Indonesia yang sebagian besar mendukung pelatih Shin Tae Yong menganggap PSSI telah melakukan blunder dengan menggandeng pelatih minim prestasi, Patrick Kluivert.

Mereka menilai, Shin Tae Yong adalah sosok yang tepat dalam membangun karakter sepakbola Indonesia. Sehingga mereka menuntut PSSI bertanggung jawab penuh bila Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang.

Sedangkan PSSI yang didukung pengamat sepakbola beranggapan, keputusan yang mereka ambil memang berat namun hal itu akan menjadi



baik bagi sepakbola Indonesia di masa depan.

Sementara bagi Patrick Kluivert merasa tuntutan dari fans agar dirinya bisa membawa tim lolos ke Piala Dunia adalah hal yang normal.

Harapan tersebut dianggap hal biasa bagi Patrick Kluivert. Pelatih 48 tahun ini beranggapan bahwa timnas Indonesia memang tidak pernah sedekat sekarang untuk bisa mentas di ajang tertinggi dunia.

"Harapan besar dari suporter itu hal yang biasa, karena mereka tidak pernah begitu dekat lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi," ucap Kluivert.

"Saya pikir dari sudut pandang saya, itu hal yang normal bahwa suporter sangat antusias mengenai babak kualifikasi ini," sambungnya.

Kluivert pun optimis bisa membantu tim Merah Putih untuk lolos dari Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, itu akan menjadi sejarah.

Ada Nama Jairo Riedewald

Dari 30 nama yang disodorkan PSSI kepada Patrick Kluivert, ternyata ada nama Jairo Riedewald. Pemain keturunan yang masuk bidikan PSSI untuk menjalani naturalisasi.

PSSI menyodorkan 30 nama pemain yang selama ini masuk Timnas Indonesia namun ada sedikit perubahan. Ada pemain yang belum menjalani naturalisasi tapi sudah dititipkan ke Patrick Kluivert dan tim pelatih yakni Jairo Riedewald. Sementara beberapa nama lain ternyata tidak masuk daftar.

Pelatih Patrick Kluivert hingga kini belum punya banyak waktu memantau para pemain untuk dipilih dan dimainkan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret ini. Untuk itu PSSI menitipkan nama untuk menjalani seleksi. Ada nama Jairo Riedewald yang masuk skuad sedangkan Saddil Ramdani dan M Tahir tidak masuk Timnas Indonesia.

Masuknya nama Jairo Riedewald dikabarkan akan datang ke Jakarta dan diupayakan untuk ambil sumpah secepat mungkin. Sedangkan dua pemain yang sedang menanjak yakni Saddil Ramdani dan M Tahir tidak masuk catatan PSSI.

Jairo Riedewald merupakan gelandang 28 tahun ini sekarang bermain

untuk Antwerp (Belgia) setelah sebelumnya sempat bermain bersama Ajax (Belanda) dan Crystal Palace (Inggris).

Targetnya, jika memang dikehendaki coach Kluivert, pemain berdarah Suriname, Belanda dan Indonesia ini bisa dimainkan melawan Australia pada Maret mendatang.

Namun dari 30 pemain ini ada yang dalam kondisi menurun. Beberapa pemain bahkan sudah masuk dalam daftar jual karena dianggap kurang memberikan kontribusi serta nilai pasarnya menurun drastis.

Beberapa pemain ini antara lain Nathan Tjoe-A-On (23) yang hingga kini sulit menembus skuad utama Swansea City. Media Inggris tersebut menyoroti langkah Swansea City yang tengah mempertimbangkan pertukaran pemain.

Dimana bek Timnas Indonesia itu dinilai belum cukup siap untuk bermain di Divisi Championship Inggris atau kasta kedua tetapi bisa menjadi opsi menarik bagi klub League One atau kasta ketiga Inggris.

"Tjoe-A-On memang belum selevel buat main di Championship, tapi buat klub League One, dia bisa jadi rekrutan yang menarik. Usianya masih 23 tahun, jadi dia masih punya banyak kesempatan

30 Nama Pemain Timnas Indonesia dari PSSI:

1. Maarten Paes
2. Nadeo Argawinata
3. Ernando Ari
4. Jay Idzes
5. Mees Hilgers
6. Rizky Ridho
7. Kevin Diks
8. Justin Hubner
9. Calvin Verdonk
10. Elkan Baggott
11. Shayne Pattynama
12. Sandy Walsh
13. Asnawi Mangkualam
14. Pratama Arhan
15. Ivar Jenner
16. Thom Hays
17. Nathan Tjoe A-On
18. Marselino Ferdinan
19. Jairo Riedewald
20. Ricky Kambuaya
21. Marc Klok
22. Stefano Lilipaly
23. Eliano Reijnders
24. Ragnar Oratmangoen
25. Rafael Struick
26. Ole Romeny
27. Egi Maulana
28. Ramadhan Sananta
29. Hokky Caraka
30. Witan Sulaeman.

bane Roar di tahun 2025, Rafael Struick cuma main dua kali. Selama dua kali tampil itu, Rafael Struick Cuma mencatatkan 37 menit tampil.

Bahkan dalam empat laga terakhir,



tan buat berkembang dan jadi pemain yang lebih baik di level EFL, sesuatu yang mungkin menarik perhatian Wycombe," tulis Football League World.

Hal yang sama dialami Rafael Struick. Dari enam laga yang dimainkan Bris-

penyerang berjudul El Klemer itu sama sekali tidak bermain. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan bagi Rafael Struick. Sebab, Patrick Kluivert sempat memberi ultimatum terkait menit tampil bersama klub masing-masing. ●

NATURALISASI MAKIN KENCANG TAPI TARGET MENGHILANG

Program naturalisasi dari PSSI sepertinya semakin kencang memanfaatkan keinginan pemain keturunan yang ingin bergabung bersama Timnas Indonesia sekaligus meningkatkan prestasi sepakbola nasional. Salah satunya bisa lolos Piala Dunia 2026. Nyatanya target yang dibebankan kepada Shin Tae Yong itu menghilang.

Dalam program PSSI, akan ada banyak pemain yang akan menjalani naturalisasi. Dimana setelah proses naturalisasi Ole Romeny selesai, PSSI akan mencari sosok gelandang baru untuk Timnas Indonesia.

"Kami butuh striker, dan tentu saja, kami juga ingin memiliki 150 pemain terbaik Indonesia, termasuk pemain keturunan," ujar Erick Thohir, Ketua Umum PSSI.

Erick Thohir juga menyoroti pentingnya kekuatan cadangan dalam tim yang kini dipegang Patrick Kluivert.

"Kita semua tahu, saat Kevin Diks cedera, tidak ada penggantinya. Beruntung ada Sandy Walsh yang bisa mengisi posisi tersebut. Demikian juga dengan Shayne Pattynama dan Calvin Verdonk di bek kiri, serta Marselino di lini tengah. Namun, meskipun komposisi semakin tebal, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki," lanjutnya

Namun saat mengencangkan program naturalisasi, PSSI malah mengendurkan targetnya meski sudah menggandeng pelatih kelas dunia, Patrick Kluivert.

Hal ini terungkap saat Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mencecar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan PSSI karena tak memasukan lolos Piala Dunia 2026 sebagai target dalam paparan terkait rekomendasi naturalisasi 3 calon baru.

Dimana dalam paparan Kemenpora, Ole Romeny dipersiapkan untuk Piala Dunia 2030.

"Saya lihat optimisme kita ini sudah hilang untuk 2026. Saya tak mau optimisme ini padam. Justru kehadiran

Ole untuk memperkuat dan mempermudah agar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026," kata Lalu Hadrian.

Untuk diketahui, Kemenpora memaparkan 11 poin perihal pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi untuk Ole Romeny serta dua pemain proyeksi Timnas Indonesia U-20, Tim Geypens dan Dion Markx.

Dari 11 paparan tersebut, poin kedua menjelaskan perihal tujuan menaturalisasi ketiga pemain untuk target jangka pendek dan panjang Timnas Indonesia.



Dalam paparan jangka pendek, nama Ole Romeny tidak disebutkan. Hanya Dion dan Tim yang diharapkan bisa membantu Timnas Indonesia untuk Piala Asia U20 2025, Piala Dunia U20 2025, SEA Games 2025, Piala Asia U-23 2026, Asian Games 2026 dan Kualifikasi Piala Asia 2027.

Sementara nama Ole Romeny justru masuk dalam target jangka panjang yakni untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2030 pada 2028 dan 2029, lolos Piala Dunia 2030 dan peringkat 50 besar FIFA.

Hal itu menunjukkan kalau Piala Dunia 2026 cuma ajang uji coba Patrick Kluivert. Sehingga kalau gagal tidak ada yang harus dipecat karena targetnya adalah lolos Piala Dunia 2030 dan tembus 50 besar Ranking FIFA.

Patrick Kluivert sendiri mengakui kalau Erick Thohir sebagai Ketua PSSI tidak memberi target lolos Piala Dunia 2026.

Kluivert mengatakan bahwa dia tidak dibebani target membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, pria 48 tahun bertekad untuk bisa mencapai level itu karena peluang Indonesia sangat terbuka dan ada di tangan sendiri.

"Itu adalah target semua orang. Anda tahu, ada peluang. Semuanya ada di tangan kita sendiri. Hal ini, Anda tahu, tidak bergantung pada siapapun," ucap Kluivert.

"Jadi, ya, Erick tidak memberikan saya (target itu), tentu saja kita berharap lolos Piala Dunia dan kami melakukan segalanya untuk lolos langsung ke Piala Dunia."

"Tapi tidak seperti itu, kami, Anda tahu, kami benar-benar ingin lolos. Jika kita mencoba, kita ingin lolos ke Piala Dunia, dan itu juga merupakan misi kami," tegas mantan pelatih Curacao tersebut.

Mudah di Luar Sulit di Dalam

Banyaknya pemain keturunan yang berminat bergabung dengan Timnas Indonesia, sepertinya cara mudah PSSI untuk meningkatkan kualitas sepakbola dalam jangka pendek. Selain meningkatkan gengsi, kualitas pemain dan permainannya juga dinilai lebih tinggi.

Bahkan Exco PSSI, Arya Sinulingga sempat mengungkapkan kalau kepelatihan Timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert disebut sebagai terbaik

yang pernah dimiliki skuad Garuda. Pernyataan ini diungkapkan Exco PSSI, Arya Sinulingga, di akun Instagram-nya, @arya.m.sinulingga.

"Ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia," tulis Arya Sinulingga, sembari menampilkan foto Patrick Kluivert bersama tiga asistennya yang telah tiba di Jakarta, yakni Alex Pastoor, Gerald Vanenburg, dan Denny Landzaat.

Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga menegaskan salah satu tugas pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, adalah melobi sejumlah pemain ketu-

bawah Jepang dengan Rp4 triliun.

Di sisi lain banyak pemain lokal yang bermain di Liga Indonesia mulai terpinggirkan karena kurangnya pantauan

Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-13, KH. Ma'ruf Amin, menyampaikan pandangannya terkait fenomena banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia.

Dalam sebuah wawancara, Kiai Ma'ruf mempertanyakan bagaimana negara sebesar Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, masih kesulitan menemukan pemain sepak bola hebat dari bakat lokal.

Menurutnya, pembangunan sepak bola Indonesia perlu difokuskan pada



runan agar berganti paspor menjadi Indonesia. Pemain-pemain yang dilobi difokuskan kepada pemain bintang yang sebelumnya belum terbujuk oleh PSSI

Pernyataan di atas menegaskan, pemain-pemain top yang berkarir di Liga Inggris bisa saja dibawa Patrick Kluivert ke Indonesia. Beberapa di antaranya Ian Maatsen yang berkarir di Aston Villa, Pascal Struijk (Leeds United) dan Million Manhoef (Stoke City).

Andai dijumlahkan harga pasaran pemain Timnas Indonesia lain seperti Calvin Verdonk, Maarten Paes, Rizky Ridho, Ragnar Oratmangoen dan lain-lain, harga pasaran Timnas Indonesia menembus Rp2 triliun lebih! Nominal itu menempatkan Timnas Indonesia sebagai skuad termahal kedua di Asia, di

pembinaan atlet muda sejak usia dini. Ia menegaskan pentingnya pembinaan yang memperhatikan penguatan fisik, daya tahan tubuh, dan asupan nutrisi yang tepat.

"Memang pembinaan atlet itu harus dari usia dini, otot-ototnya, makanannya itu dijaga. Tidak bisa langsung seperti itu. Kita ini sekarang daya tahannya itu kan lemah, biasanya main, terus lama-lama lemas," jelas Ma'ruf Amin.

Ia juga menekankan peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan yang serius di tingkat akar rumput.

Menurutnya, daerah-daerah di Indonesia perlu menggali potensi pemain berbakat yang tersebar di berbagai wilayah dan menyaring mereka untuk menjadi talenta terbaik yang dapat diandalkan di Skuat Garuda. ●



DARI BAMSOET HINGGA SULTAN YOGYA DUKUNG EFISIENSI ANGGARAN

Para pemangku kepentingan anggaran pemerintah memiliki pandangan beragam tentang penerapan program efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto. Namun, Wakil Ketua Umum Kadin Bambang Soesatyo dan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menjabat Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta justru mendukung kebijakan ini.

Kebijakan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Intinya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dari penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, Rp256,1 triliun berasal dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) demi memastikan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

Secara khusus Prabowo meminta jajaran pemerintahannya memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun dari alokasi awal Rp1.160,1 triliun untuk Tahun Anggaran 2025. Sedangkan anggaran transfer ke daerah yang mencapai Rp50,6 triliun alokasi awalnya adalah Rp919,9 triliun.

Untuk itu, para menteri dan pimpi-

nan lembaga mesti membuat rencana efisiensi untuk belanja operasional dan non-operasional masing-masing instansi. Toh rencana efisiensi ini tidak boleh mengutak-atik alokasi belanja pegawai dan bantuan sosial.

Sedangkan untuk para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Prabowo meminta mereka membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau focus group discussion. Para kepala daerah juga diharapkan memangkas ongkos perjalanan dinas sebesar 50 persen dan mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

Inpres 1/2025 ini mulai berlaku pada 22 Januari 2025, dengan waktu pelaksanaan yang ketat. Seluruh hasil identifikasi rencana efisiensi harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025. Sebelumnya rencana efisiensi itu juga harus disampaikan dan dibahas bersama dan mendapat persetujuan DPR sebelum diser-



(Dok Setpres)

ahkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari.

Namun, sepekan sebelum tenggat pertengahan Februari 2025 itu, terbetik kabar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda seluruh rapat di komisi terkait pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja. Penundaan itu berdasarkan surat edaran DPR yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi I hingga XIII dan ditan-datangani Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco pada 7 Februari 2025.

"Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian / Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja," demikian sebagian kutipan dari surat tersebut

Dalam suratnya, Dasco meminta Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru.

Sedangkan Presiden Prabowo dalam pidato Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIE expo), Surabaya,

Senin, 10 Februari 2025 mengemukakan muncul resistensi terhadap Inpres 1/2025 itu. "Ada yang melawan saya ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat," ujarnya.



Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat.

Prabowo menyebut langkah penghematan yang diterapkan di era pemerintahannya merupakan upaya untuk menyaring pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dan berpotensi dikorupsi. "Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan," tegasnya.

Prabowo mengaku uang yang berhasil dihemat akan digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) dan memperbaiki 330.000 bangunan sekolah di Indonesia. "Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan, untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia, kita punya 330.000 sekolah," kata dia.

Nah, berkaitan dengan itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik & Keamanan (Polkam) KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, mengatakan KADIN Indonesia mendukung penuh kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran. Tentu saja pembaruan skala prioritas program dan kegiatan itu harus berkait langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

"Ketika kondisi keuangan negara sedang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran menjadi keharusan. Tujuannya, agar tata kelola pemerintahan pada semua tingkatan tetap berjalan dengan baik dan efektif. Tanpa efisiensi anggaran, Tupoksi K/L dan Pemda untuk melayani masyarakat bisa terganggu. Kadin sepakat dan mendukung kebijakan Presiden men-



(Dok Setpres)

erapkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran,” ungkap Bambang yang kerap disapa Bamsoet di Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.

Efek kebijakan tersebut, sambungannya, semua kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda) diharapkan untuk memperbaiki prioritas program sesuai alokasi anggaran masing-masing. “Dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, Presiden Prabowo telah memberi pesan kepada aparatur pemerintah di semua K/L dan daerah untuk realistis terhadap kondisi keuangan negara saat ini. Selain itu, presiden juga mengajak aparatur pemerintah untuk melanjutkan pro-

Inpres itu, ditetapkan target efisiensi anggaran sampai Rp 306,6 triliun.

“Dengan efisiensi anggaran, presiden ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan pada semua tingkatan akan tetap berjalan dengan baik dan efektif di sepanjang tahun anggaran berjalan. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) semua K/L dan Pemda, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, tidak terganggu,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, dengan efisiensi belanja pemerintah, presiden secara tidak langsung mendorong semua K/L dan Pemda untuk melakukan penyesuaian

ke depan. Terlebih tantangan sangat berat jika terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Sri Sultan sebagai keynote speech sekaligus membuka Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY 2025 bertema “Sinergi dan Akselerasi: Mendorong Pencapaian Ketahanan Pangan, Penciptaan Lapangan Kerja, Pariwisata, dan Perumahan,” di Jogja Expo Center (JEC), Minggu, 9 Februari 2025.

Rapimda Kadin DIY 2025 dihadiri Ketua umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Kadin DIY GKR Mangkubumi, serta jajaran pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah



(Istimewa)

gram-program pembangunan dengan mengoptimalkan semua potensi, dan selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” sambungnya.

Bamsoet juga meminta masyarakat dan aparatur pemerintah bisa memahami kondisi keuangan negara saat ini. Serta memaknai keberanian pemerintah menunda anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan, untuk melaksanakan efisiensi anggaran itu, diterbitkan Instruksi Presiden No.1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Sebagai patokan untuk implementasi

skala prioritas program-program pembangunan di masing-masing sektor dan sub-sektor. Tentu saja pembaruan skala prioritas itu harus berkait langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Dari kalangan Kepala Daerah, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong semua pihak berkonsolidasi dalam menyikapi efisiensi atau pengendalian anggaran yang dilakukan pemerintah. Konsolidasi tersebut sangat penting untuk bersama-sama mencari ide kreatif dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan dan program-program kerja

(Forkopimda) DIY, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY. Hadir pula perwakilan Kadin daerah lain serta Kadin Kabupaten/Kota se DIY, asosiasi dan himpunan usaha se DIY, Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Kadin DIY.

“Ini tantangan sangat berat. Tapi jangan bersedih, mari bersama-sama membuka ruang kesempatan dengan melakukan konsolidasi. Harus dipahami APBN dan APBD tidak lagi dapat menjadi penopang utama. Itu hanya 20 persen dan mensubsidi saja sehingga perlu kita dorong kerjasama semua pihak, agar program pembangunan tetap berjalan

dengan baik. Salah satunya membuka diri terhadap kehadiran investor,” ungkapnya sebagaimana dikutip situs web resmi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sri Sultan menegaskan kesadaran baru harus muncul di tengah kebijakan perampangan anggaran negara tahun ini. Menyikapi kondisi tersebut, Sri Sultan berharap semua pihak mau membuka diri menjalin kerjasama dan berjejaring dengan semangat untuk kemajuan semua pihak sehingga jika mendapatkan keuntungan atau kerugian ditanggung bersama-sama.

Raja Keraton Yogyakarta ini pun menekankan pentingnya kesadaran kolektif, tentang menyatukan visi dan mengonsolidasikan segenap potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Kesadaran akan potensi bangsa ini harus mampu mengurangi ketergantungan dari pihak

kolaborasi dalam mendukung pembangunan DIY yang lebih maju dan berdaya saing. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan berbagai program DIY.

“Salah satu prioritas utama kami adalah mendukung program pengurangan kemiskinan ekstrem. Pada 2024, kami telah menyerahkan bantuan rumah layak huni di Gunungkidul sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kami juga berkontribusi dalam program pengurangan stunting yang menjadi perhatian besar, karena anak-anak kita adalah masa depan bangsa,” ujarnya.

GKR Mangkubumi menegaskan komitmen ini akan terus berlanjut di 2025, di mana pihaknya akan memberikan bantuan rumah layak huni di Kulon-

Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan Kadin bisa semakin solid dan diakui ke depannya pasca Munas Konsolidasi Persatuan. Selain itu, Kadin diharapkan bisa menjadi mitra strategis pemerintah pusat maupun daerah. Terdapat ratusan universitas dan perguruan tinggi sehingga menjadi modal utama bagi DIY jika ingin melakukan dobrakan ekonomi dan teknologi terutama di bidang artificial intelligence (AI)

“Karena semua itu membutuhkan engineers atau tenaga kerja dan teknologinya sudah ada. Ini bisa menjadi motor penggerak juga terkenal dengan ekonomi kreatif. Ke depan, ekonomi kreatif ini menjadi syarat ekonomi yang maju,” tandasnya.

Anindya menilai potensi ekonomi DIY tidak hanya secara politik tapi ekonomi



Kadin sepakat dan mendukung kebijakan Presiden menerapkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran.

luar, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam negeri pada saatnya nanti.

“Jangan berharap dan bergantung dari asing. Kita harus mampu mendesain agar ke depan kita bisa mengembangkan dan mengelola sendiri semua potensi yang kita miliki, termasuk industri. Perlu keberanian bagi pemerintah untuk memberi kemudahan, jangan malah dipersulit karena tantangan masa depan sudah berbeda. Jangan kita bangga dengan menjual produk asing, sementara kita tidak punya kemampuan untuk bersaing,” tandas Sri Sultan.

Ketua Umum Kadin DIY GKR Mangkubumi mengatakan Rapimda Kadin DIY ini adalah momentum memperkuat langkah ke depan. Ia berharap semua dapat memberikan gagasan terbaik, merumuskan strategi akselerasi yang solid, dan mempererat sinergi serta



(Dok Pribadi)

progo, serta melanjutkan program bantuan pengurangan stunting. Upaya ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial kami untuk mendukung pemerintah daerah dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat DIY.

“Dalam upaya mencapai ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan perumahan, dan pariwisata, Kadin DIY tidak dapat bekerja sendiri. Kita memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat, kita dapat mengakselerasi program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” imbuh putri sulung Raja Keraton Yogyakarta ini.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin

juga sehingga buat Kadin Indonesia datang ke sini ingin memastikan bahwa bergerak perekonomian di DIY sehingga bisa menjadi percontohan bagi provinsi lain. Ekonomi yang maju adalah ekonomi yang kreatif dan mencari terobosan.

Serangkaian dengan itu berlangsung pula Dialog Bisnis menghadirkan sejumlah pembicara yaitu Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Kementerian Pariwisata RI Bisma Jatmika Tisnasasmita, Kepala Bapperida DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, Rektor Amikom Suyanto, Pemimpin Proyek Jasa Marga Jogja Bawen Usodo Sahid Nugroho Aditomo dan Akademisi Universitas Brawijaya Bogat Agus Riyono. • Editor: GE

DANANTARA MELUNCUR, HARUS INDEPENDEN

Kelola Aset Rp14.000 Triliun

Badan Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara akan segera resmi beroperasi. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan akan meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025 yang akan mengelola sekitar USD900 miliar atau Rp14.616 triliun aset dalam pengelolaan (AUM).

"Kami menyiapkan peluncuran Danantara Indonesia, lembaga sovereign wealth fund terbaru yang menurut evaluasi awal kami akan mengelola lebih dari USD900 miliar aset dalam pengelolaan (AUM) yang akan diluncurkan pada 24 Februari," kata Prabowo saat berbicara secara daring di forum internasional World Government Summit di Dubai, Kamis, 13 Februari 2025.

Prabowo mengatakan, Danantara akan mengelola investasi sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor,

menyebut initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai USD20 miliar.

"Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15-20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah membatalkan peluncuran Danantara dari rencana pada 16 Januari 2025. Pemerintah menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya disahkan



di antaranya energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan. Dia berharap proyek tersebut dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Prabowo

pada Rapat Paripurna DPR, Selasa, 4 Februari 2025.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengaku sangat menyambut baik terbentuknya Danantara. Dia meyakini, nantinya Da-

nantara akan menjadi kekuatan besar dalam menopang kinerja perekonomian nasional, karena akan menarik investasi-investasi bernilai besar, baik dari domestik hingga asing.

"BPI Danantara sedang berjalan, namun saya meyakini ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat besar untuk Indonesia dalam rangka mengembangkan perekonomian ke depannya," kata Rosan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin, 10 Februari 2025.

Menurutnya, upaya pembentukan Danantara memang bertujuan untuk mendatangkan investasi dalam jumlah besar guna mendukung upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan hingga mampu menembus angka 8 persen.

"Dan tentunya ini akan dilakukan bersama-sama dengan pihak luar, yang ingin berinvestasi bersama-sama dengan Danantara," ujar Rosan.

Kepala Badan Pengelola Investasi

was, Badan Pelaksana, dan Dewan Penasihat.

Ketika dikonfirmasi mengenai nama-nama yang akan masuk ke Danantara, ia tidak berkomentar. Muliaman mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo seiring dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Lebih jauh Muliaman mengatakan, setelah RUU BUMN disahkan oleh DPR selanjutnya akan disiapkan aturan turunan sebagai bantalan dalam operasional Danantara. Menurut Muliaman aturan itu akan termuat dalam Peraturan Pemerintah. Dia juga belum mau menjelaskan apa saja yang akan diatur dalam aturan turunan itu.

Merujuk dalam RUU BUMN yang telah diketok DPR, Dewan Pengawas Danantara nantinya terdiri dari Menteri BUMN sebagai ketua merangkap anggota. Selanjutnya ada perwakilan dari kementerian keuangan sebagai anggota, pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh presiden sebagai anggota.

yang terdiri dari dua orang dari unsur profesional dengan masa jabatan lima tahun. Pada pelaksanaannya, Badan Pelaksana akan dibantu oleh Direktur Eksekutif dan Komite. Dalam Badan Pelaksana, Direktur Eksekutif maksimal terdiri dari enam orang. Direktur Eksekutif diangkat oleh Kepala Badan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. Kemudian komite yang terdiri dari minimal komite investasi dan komite manajemen risiko. Terdapat juga Dewan Penasihat yang dibentuk oleh presiden dengan tugas memberikan masukan dan saran kepada badan.

Tantangan

Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurrahman, mengungkapkan sejumlah kritik terhadap potensi dan tantangan yang dihadapi Danantara.

Rizal menekankan, pengesahan UU BUMN memberikan dasar hukum yang kuat bagi Danantara, tetapi regulasi masih perlu diperbaiki untuk mencapai



Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, memastikan struktur kepengurusan superholding BUMN akan sama seperti RUU BUMN yang sudah disahkan DPR. Menurut versi BUMN, struktur Danantara terdiri dari Dewan Penga-

"Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretaris dan komite yang terdiri dari minimal komite etik, komite audit, dan komite," tulis RUU BUMN.

Lalu, terdapat Badan Pelaksana

operasional yang optimal.

"Untuk mencapai operasional yang optimal, pembenahan regulasi masih sangat diperlukan," ujar Rizal, Jumat, 14 Februari 2025.

Ia khawatir, tanpa kejelasan dalam



pembagian kewenangan antara Kementerian BUMN dan Danantara, pengelolaan dana bisa menjadi tidak efisien. Selain itu, Rizal menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan sebagai tantangan yang sangat ambisius.

"Dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih tinggi, kita perlu investasi

yang substansial untuk menutupi kekurangan yang ada," tambahnya.

Ia juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih realistis dalam menarik investasi asing, mengingat kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Rizal juga menggarisbawahi tantangan yang harus dihadapi Danantara, termasuk tumpang tindih regulasi dan kurangnya infrastruktur.

"Pemerintah

perlu segera memperbaiki regulasi dan meningkatkan kapasitas SDM agar Danantara dapat beroperasi secara efektif," tegasnya.

Dia menambahkan, tanpa langkah-langkah yang tepat, Danantara berisiko menjadi lebih banyak ilusi daripada harapan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resource Indonesia (CERI), Yusri Usman, mengkritik rancangan pembentukan Danantara karena seharusnya didesain untuk bertindak secara independen, seperti Temasek Holdings di Singapura atau Khazanah Nasional di Malaysia.

"Jika kita melihat draf yang ada, BPI Danantara ini masih sangat kental dengan campur tangan birokrasi. Jalur persetujuan yang panjang, mulai dari direksi, dewan komisaris, Kementerian BUMN, hingga DPR, justru akan menuhkan fleksibilitas badan ini dalam mengeksekusi kebijakan," ujar Yusri, Selasa, 4 Februari 2025.

Dia mengatakan, panjangnya jalur birokrasi berpotensi menghambat respons perusahaan terhadap dinamika pasar. Misalnya, ketika ada peluang investasi yang harus segera diambil direksi BUMN, proses persetujuan yang panjang ini bisa membuat perusahaan kehilangan momentum.

"Ini jelas bertentangan dengan semangat efisiensi yang diharapkan dari pembentukan BPI Danantara," tegas Yusri.

Dalam draf revisi UU BUMN, pengawasan terhadap Danantara akan dilakukan Menteri BUMN dan laporan diberikan kepada Presiden. Selain itu, Menteri BUMN memiliki kewenangan untuk menempatkan perwakilan di badan ini. Yusri menilai kondisi ini memperlihatkan Danantara belum benar-benar independen.

"Kalau masih ada intervensi dari pemerintah, maka ini tidak sesuai dengan konsep superholding, seperti Temasek atau Khazanah. Seharusnya, pengelolaan BUMN terpisah dari pengaruh pemerintah, agar fokus pada bisnis dan memberikan hasil maksimal kepada negara," kata dia.

Pengamat BUMN dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, mengungkapkan model Danantara lebih mirip dengan Khazanah yang bisa menjadi pilihan yang lebih tepat bagi Indonesia.

Keberadaan BUMN yang tidak hanya bertujuan komersial, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi.

"Menurut saya modelnya Khazanah itu mungkin agak lebih tepat dibandingkan dengan yang fully komersial seperti Temasek," jelas Toto.

Khazanah Malaysia, menurutnya, mengelola tidak hanya portofolio aset tetapi juga aset strategis yang berperan dalam pembangunan negara, seperti proyek infrastruktur besar. Sebagai contoh, Khazanah pernah ditugaskan untuk membangun Kota Iskandar di Malaysia, yang menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi negara.

"Kan dalam UU (19/2003) BUMN juga bilang bahwa tujuan BUMN bukan hanya komersial, tapi juga punya tugas public service obligation untuk penguasaan bidang bisnis baru," tutur dia.

Lalu untuk struktur organisasinya, Danantara juga bisa mencontoh dari Khazanah, dengan Chairman Khazanah ditempati oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara ex officio. Danantara juga dinilai sudah tepat, dengan menempatkannya langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk menghindarkan sebanyak mungkin intervensi yang tidak diperlukan. Danantara kan sama desainnya, nanti dia langsung bertanggungjawab kepada presiden," terang Toto.

Toto mengingatkan bahwa keberhasilan super holding company di negara-negara lain seperti Temasek dan Khazanah tidak lepas dari pengelolaan yang bebas dari politik, dengan pemimpin yang memiliki kompetensi tinggi dan pengalaman dalam dunia investasi.

"Yang ingin saya sampaikan adalah mereka benar-benar harus dikelola secara profesional. No politics tentunya," katanya.

Dengan pengelolaan yang lebih profesional, ia menilai Danantara bisa men-

jadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional. Danantara yang berperan sebagai superholding dapat berfungsi sebagai kendaraan untuk menarik investor global.

"Danantara bisa menjadi mitra kredibel yang dipercaya investor asing, mengingat aset yang dikelolanya cukup besar," ujar Toto.

Toto juga menjelaskan, perlu ada koordinasi yang apik antara Kementerian BUMN dan Danantara guna me-

dua hal utama yang perlu dilakukan dalam memulai pengelolaan Danantara. Pertama, yakni dengan melakukan pemetaan pembentukan holding BUMN sesuai dengan kesehatan usaha perseroan.

"Putuskan langkah berikutnya apakah perlu liquidasi BUMN atau perlu restrukturisasi dalam rangka penyehatan," tuturnya.

Langkah kedua, Danantara diminta untuk dapat melakukan pemindaian



nyukseskan kick off operasional superholding pengelola investasi itu. Dia menyebut, pemerintah Indonesia perlu berkaca dengan pengelolaan perusahaan pelat merah yang dijalankan oleh China.

"Ini (pengelolaan BUMN China) bisa jadi rujukan bagaimana kita bisa kapitalisir BUMN semakin besar ke depan. Musti ada kerjasama state owned companies (SOEs) dan Private Owned Enterprise (POE) untuk menumbuhkan potensi ekonomi bangsa," ujarnya.

Sejalan dengan hal itu, Toto memberikan catatan, setidaknya terdapat

sektor prioritas bagi holding investasi. Hal itu dilakukan guna memaksimalkan pengelolaan aset secara maksimal hingga mengembalikan return yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tembus 8 persen sebagaimana yang ditargetkan pemerintah.

"Untuk holding investasi, lakukan scanning cepat di sektor prioritas mana Danantara akan investasi (chip in) sesuai program strategis pemerintah, lalu mulai undang strategic global investor untuk bersama joint di proyek tersebut (Joint Venture)," pungkasnya. ●



OMON-OMON EFISIENSI DI FORUM DUNIA

Di forum dalam maupun luar negeri, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program efisiensi atau penghematan anggaran dengan percaya diri. Kali ini ia mengemukakannya pada pidato secara daring (dalam jaringan internet) di World Governments Summit 2025 --acara yang berlangsung sekali setahun sejak 2013 di Dubai, Uni Emirat Arab.

Dalam pidato yang berdurasi hampir 15 menit itu, Presiden Prabowo Subianto mengemukakan efisiensi anggaran yang peruntukannya kurang jelas dan mengalihkannya ke berbagai program strategis untuk membangun infrastruktur fisik maupun digital. Sebelumnya, ia menyampaikan informasi membuka sektor infrastruktur kepada pasar swasta dalam maupun luar negeri.

"Kami sedang membangun jalu-jalu kehidupan vital: jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, jalur energi, jaringan digital, yang kemudian menghubungkan masyarakat dan merangsang ekonomi lokal," ujarnya sebagaimana rekaman video Sekretariat Presiden yang mulai tayang pada Kamis, 13 Februari 2025.

Presiden menambahkan, konektivitas digital bagi Indonesia pun menjadi perhatian khusus dalam kondisi dunia yang

sudah saling terhubung. Bukan saja sebagai kemewahan, melainkan juga sebagai kebutuhan. Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan kembali spektrum Wi-Fi 6 GHz untuk penggunaan publik dan secara efektif menggandakan kapasitas internet di Indonesia.

"Hal ini memastikan bahwa setiap orang Indonesia, mulai dari pulau terpencil hingga jantung kota Jakarta, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, untuk belajar, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan," kata Presiden.

Berkaitan dengan itu, lanjut Presiden, pengelolaan keuangan dan manajemen yang baik sangat penting untuk mewujudkan inisiatif-inisiatif pengembangan infrastruktur fisik dan digital. "Melalui penghematan anggaran negara secara cermat, kami telah menghemat lebih dari 20 miliar dolar AS," ujarnya.

Penghematan anggaran setara sekitar

stpost. LIVE



WORLD GOVERNMENTS SUMMIT 2025

Rp 327 triliun itu, kata Prabowo, sebanding dengan sekitar 10 persen anggaran negara. "Penghematan yang dialokasikan untuk proyek dan program tanpa strategi yang jelas, sekarang akan digunakan untuk membiayai lebih dari 20 program strategis bernilai miliaran dolar yang akan mengubah negara ini," ungkapnya.

Presiden juga menegaskan komitmennya untuk membangun Indonesia menjadi negara modern dan maju dengan mengedepankan potensi besar yang dimiliki bangsa. "Potensi Indonesia tercermin dari keberagaman dan geografi yang luas. Kepulauan kita, yang terdiri dari 17.000 pulau dan luasnya hampir 2 juta kilometer persegi, merupakan rumah bagi lebih dari 282 juta orang, sebuah mosaik budaya dan tradisi yang dinamis," ujarnya.

Meski demikian, Kepala Negara menyadari bahwa keberagaman budaya dan luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan sekaligus kekuatan dalam membangun negeri. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan

peluang ekonomi.

"Salah satu pencapaian utama kami dalam 100 hari pertama pemerintahan saya adalah terbentuknya pemerintahan yang berfungsi penuh berdasarkan talenta dan meritokrasi. Banyak orang Indonesia terampil yang telah membangun karir mereka di luar negeri kembali untuk mengabdikan pada negara kita," katanya.

Salah satu inisiatif transformatif dalam pemerintahannya yaitu peluncuran program makan bergizi gratis (MBG) yang telah mulai dilakukan pada awal bulan Januari lalu. Program ini menurut Presiden tampak sederhana, tetapi ia meyakini ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan bangsa.

"Ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330.000 sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita. Tujuan kami dalam program ini adalah untuk mencakup lebih dari 85 juta anak dan wanita hamil di Indonesia," ungkapnya.

Meski begitu, di awal pidatonya, Presiden mengungkapkan pemahamannya tentang situasi ketidakpastian global

yang dapat berpengaruh terhadap Indonesia. Dalam hal ini Prabowo menegaskan pentingnya peran aktif dunia dalam menjaga stabilitas global dengan prinsip perdamaian, keadilan, dan saling menghormati.

Dalam pidatonya pada sesi pembicaraan bersama Presiden Republik Indonesia dalam World Governments Summit 2025 itu, Presiden mengemukakan bahwa dunia saat ini menghadapi tantangan besar termasuk konflik di Ukraina, Gaza, dan Kongo Timur yang memerlukan solusi berbasis dialog dan keadilan. "Kita berada pada momen sulit dalam sejarah. Lanskap internasional berkembang pesat, ditandai dengan ketidakstabilan dan proteksionisme ekonomi. Jika kita tidak bertindak bijak, perubahan ini bisa menjadi tidak terkendali," ujar Presiden Prabowo.

Ia juga menyatakan, Indonesia selalu menjunjung tinggi ketiga prinsip tersebut dalam diplomasi global. Indonesia secara tegas mendukung solusi dua negara (two states solution) dalam konflik Israel dan Palestina, serta mendesak upaya nyata untuk mengakhiri siklus kekerasan. "Dunia tidak bisa membiarkan siklus kekerasan terus berlanjut. Kri-

sis yang terjadi di Ukraina, Gaza, Kongo Timur, dan wilayah lain di Afrika mencerminkan terkikisnya stabilitas global secara lebih luas. Indonesia memahami bahwa retorika saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan ini," tambahnya.

Selain itu, Presiden Prabowo menyatakan komitmen Indonesia dalam mempertahankan diplomasi yang seimbang dengan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Indonesia turut menjalin kemitraan global dengan meningkatkan peran di organisasi internasional seperti BRICS, OECD, CPTPP, dan Indo-Pacific Forum.

negeri untuk dapat berperan aktif dalam diplomasi global tersebut.

"Kita harus mengerjakan pekerjaan rumah kita sendiri di dalam negeri. Pengaruh dan kemampuan kita untuk berkontribusi dalam stabilitas global saling berhubungan dengan kekuatan, ketahanan, dan kemajuan ekonomi, serta kesejahteraan sosial bangsa dan rakyat kami," tegasnya.

Kembali ke soal efisiensi anggaran, beberapa program strategis yang menjadi sasaran adalah investasi dalam industri hilir nikel, bauksit, tembaga, dan mineral penting lainnya. Program lain yaitu menggencarkan pengembangan

beberapa tahun ke depan. "Bersama dengan inisiatif untuk meningkatkan produksi protein, mendukung akuakultur, dan mengembangkan proyek energi bersih dan terbarukan, dengan memanfaatkan sumber daya mineral dan terbarukan kami yang kaya," kata Ketua Umum Partai Gerindra yang di awal pidatonya menyatakan baru terpilih kembali.

Sebagai penutup, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan inisiatif pemerintahannya. Kepercayaan dan optimisme terhadap pemerintahannya menjadi inspirasi untuk terus melanjutkan pekerjaan dalam memastikan



"Kami berusaha untuk mendengarkan sebanyak yang kami katakan, menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati," ujarnya.

Dengan visi diplomasi aktif, Indonesia juga berkomitmen untuk terus menjadi jembatan antara dunia utara dan selatan, serta berkontribusi dalam menciptakan tatanan global yang lebih damai dan stabil. Namun, Presiden Prabowo menuturkan bahwa Indonesia harus tetap menjaga stabilitas dan kesejahteraan dalam

industri petrokimia yang substansial, serta pusat data Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang berskala memadai. "Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8 persen," tambahnya.

Pemerintah, kata Prabowo, juga menyalurkan dana ke dalam program-program yang memajukan ketahanan pangan. Tujuannya menjadikan Indonesia sebagai pengeksport pangan dalam

kesejahteraan masyarakat.

"Visi bersama dan upaya kolektif inilah yang akan mendorong bangsa kita maju menuju masa depan yang ditentukan oleh perdamaian, keadilan, kemajuan dan peluang," tandasnya.

Pidato Presiden Prabowo kali ini menyesuaikan isinya dengan tema World Government Summit 2025, 'Membentuk Pemerintah Masa Depan'. (Shaping Future Government. Lagi pula, acara di Dubai, Uni Emirat Arab yang ber-

langsung pada 11-13 Februari 2025 ini mempertemukan pemerintah, organisasi internasional, para pemikir, pengusaha sektor swasta dari seluruh dunia untuk mendorong kerja sama internasional dan mengidentifikasi solusi inovatif untuk tantangan masa depan, yang pada akhirnya menginspirasi dan memberdayakan generasi pemerintah berikutnya.

Nah, rupanya pidato Presiden Prabowo mendapat tanggapan dari Pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio. Kantor Berita Nasional Antara melaporkan, Ray Dalio penasaran mengenai rendahnya tingkat pendidikan di

moral, penurunan kepemimpinan sosial. Namun, tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan," kata Prabowo.

Presiden pun bertekad untuk menggunakan seluruh energi dan wewenang yang dimiliki untuk mencoba mengatasi korupsi, yang dinilai sebagai penyakit, serta akar dari seluruh penurunan kinerja di berbagai sektor tersebut. Dalam sambutannya pada forum itu, Kepala Negara berkomitmen teguh untuk memberantas korupsi dan maladministrasi. Menurut Prabowo, dibutuhkan keberanian untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, serta mengakui bahwa ko-

kum.

"Tindakan kami telah membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Mereka yang dianggap tidak tersentuh kini diminta pertanggungjawabannya," kata Prabowo.

Prabowo pun mengungkapkan bahwa segala bentuk korupsi, seperti penyalahgunaan dana pemerintah, penggelapan, pajak rendah yang hanya berpihak pada pengusaha, telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, Prabowo pun mengungkapkan alasannya untuk melakukan efisiensi di kementerian/lembaga hingga 20 miliar dolar AS, untuk mengalokasikan



Indonesia, penelitian dan pengembangan, serta inovasi yang penyebabnya terutama tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia.

Menanggapi Ray Dalio, Presiden Prabowo mengakui tingkat korupsi di Indonesia sudah mengkhawatirkan dan telah menjadi masalah dasar bagi penurunan kinerja di semua sektor. "Saya yakin bahwa masalah dasar kami adalah telah terjadi semacam, saya tidak tahu, apakah itu penurunan kepemimpinan

ruspi tersebut sebagai kelemahan dan kekurangan di negara ini.

Setelah 100 hari menjalankan pemerintahan, Prabowo juga menyoroti tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah dari masyarakat yang cukup tinggi, yakni mencapai 81 persen, melampaui persentase kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden. Ia menilai bahwa masyarakat telah menerima pesan terkait upaya pemerintah agar tidak satu pun individu dapat kebal hu-

dana tersebut dalam berbagai proyek strategis dan berkelanjutan,

"Setelah 100 hari, saya berhasil menghemat 20 miliar dolar AS. Saya yakin bahwa jika saya tidak menyimpan uang itu, uang itu akan hilang begitu saja. Saya menghadapi beberapa perlawanan dari birokrasi yang mengakar. Beberapa dari mereka menganggap diri mereka tak tersentuh, tetapi saya bertekad untuk bergerak, saya bertekad untuk menegakkan hukum," tegas Prabowo. • Editor: GE



Hari Pers Nasional Ke-79

2 KOTA DENGAN SEMANGAT PERSATUAN

Peringatan Hari Pers Nasional Ke-79 berlangsung di dua kota berbeda pulau. Namun, Presiden Prabowo Subianto menyatukan perbedaan tempat itu dengan pidato ucapan selamat yang bersemangat persatuan.

Tanpa menyebut satu kata pun tentang perbedaan dua kota tempat peringatannya, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 yang jatuh pada Minggu, 9 Februari 2025. "Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerin-

tan Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia," ujar Prabowo dalam pidato yang ditayangkan Sekretariat Presiden RI.

Dalam pi-

dato berdurasi sekitar empat menit itu, Presiden menyampaikan pula apresiasi terhadap kerja keras para insan pers dan media, "yang terus menjalankan pengabdianya dengan dedikasi tinggi, meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks."

Semangat persatuan pun mengemuka saat Presiden Prabowo mengingatkan upaya mempengaruhi opini publik di negara-negara yang menjadi target atau sasaran. "Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu," ujarnya.

Prabowo mengatakan, meski menjunjung tinggi kebebasan pers, media juga harus tetap waspada terhadap penyebaran berita yang tidak benar dan hoaks. Selain hoaks, ia menyebut penyebaran kebencian dan ketidakpercayaan terhadap

sesama warga negara perlu diwaspadai. "Upaya-upaya pecah belah ini harus selalu kita waspadai," ujarnya.

Oleh sebab itu, Prabowo berpesan agar pers Indonesia selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. "Perlu saya ingatkan, bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, serta harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar," kata Prabowo.

Prabowo memahami bahwa dunia pers di dalam dan luar negeri sedang menghadapi dinamika saat ini. Namun

ia mengingatkan bahwa pers yang profesional dan punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa.

Selain itu Prabowo menyebut pers telah menjadi pilar penting dalam kehidupan berdemokrasi. Ia mengemukakan, selama delapan dekade, pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran, dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia.

Sedangkan



Presiden Prabowo Subianto
(Sekretariat Presiden RI)

acara peringatan Hari Pers Nasional kali ini berlangsung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Pekanbaru, Riau. Di Banjarmasin, acara makan malam bersama (gala dinner) tampak dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang juga memiliki rekam jejak sebagai wartawan.

Dalam sambutannya, ia mengemukakan pers tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, literasi, dan narasi yang menjadi bagian erat dari sejarah bangsa. Menurut Fadli Zon, banyak tokoh pers yang juga merupakan budayawan.

Ia menyebut beberapa nama seperti Rosihan Anwar dan Jamaluddin Adinegoro, yang tidak hanya dikenal sebagai jurnalis, tetapi juga sastrawan dan pencinta budaya Indonesia. "Sejarah Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan lisan dan aksara, syair dan seruan, tulisan

oleh tokoh pers nasional Tribuana Said yang melekat dengan media Waspada terbitan Kota Medan, Sumatera Utara. Acaranya berlangsung di di Nazir Ballroom Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, pada Minggu, 9 Februari 2025.

Deklarasi Riau berisi antara lain penguatan komitmen insan pers untuk menjaga etika, integritas, independensi, dan solidaritas di tengah tantangan zaman. "Menolak segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap wartawan serta menuntut perlindungan hukum bagi insan pers."

hoaks dan propaganda.

"Pers memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan membentuk opini publik. Oleh karena itu, kebebasan pers harus tetap dijaga tanpa intervensi yang merusak," demikian salah satu poin deklarasi.

Usai pembacaan deklarasi, berlangsung pula acara foto bersama dan silaturahmi antarpengurus Persatuan Wartawan Indonesia Pusat dan PWI provinsi se-Indonesia.

Sebelumnya, Peringatan HPN 2025 di Riau juga dimeriahkan dengan aneka



Upaya-upaya pecah belah ini harus selalu kita waspadai.

dan keberanian," ujarnya.

Menteri Fadli mengungkapkan pula pernah berkecimpung di dunia jurnalistik sejak masih duduk di bangku SMA. Ia bahkan menjadi redaktur majalah sastra Horison selama 20 tahun. "Saya pernah menjadi bagian dari dunia jurnalistik sejak masih siswa SMA dan mahasiswa, kemudian setelah lulus perguruan tinggi," ujarnya.

Lebih dari itu Menteri Fadli menegaskan tantangan pers di era disinformasi dan dominasi algoritma digital. "Pers yang bebas dan bertanggung jawab adalah cahaya bagi bangsa. Kita dihadapkan pada pertanyaan, bagaimana kata-kata tetap menjadi penuntun kebenaran dan pers menjadi penjaga nurani bangsa," ujarnya.

Sedangkan puncak peringatan Hari Pers Nasional 2025 di Pekanbaru dimeriahkan oleh pembacaan Deklarasi Riau



Gala Dinner Hari Pers Nasional 2025 (Humas Panitia HPN Riau 2025).



Acara puncak Hari Pers Nasional 2025 (Humas Panitia HPN Riau 2025).

Selain itu, deklarasi juga berisi keprihatinan terhadap masalah bangsa di bidang ekonomi, politik, dan sosial, serta berkomitmen untuk berkontribusi dalam penyelesaiannya. Selanjutnya, menjaga peran pers dalam membentuk opini publik dan stabilitas nasional, serta berkomitmen untuk tidak terjebak dalam

kegiatan selama empat hari, mulai dari 6 hingga 9 Februari 2025.

Beberapa acaranya antara lain pameran karya fotografi dan karikatur, Selain itu berlangsung pula Focus Group Discussion (FGD) Serikat Media Siber Indonesia dan LBH Pers, seminar, dan juga gala dinner. • Editor: GE



ANGGARAN DIPANGKAS TAK GANGGU BANSOS

Kementerian Sosial mengalami pemangkasan anggaran Rp1,3 triliun imbas keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Meski begitu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan akan memetakan pos-pos yang memungkinkan untuk efisiensi, sehingga tidak mengganggu program-program prioritas.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, memastikan Kemensos akan menyesuaikan pengeluaran, misalnya untuk alat tulis kantor (ATK). Adapun untuk bantuan sosial, ia memastikan tidak ada pemotongan. Dia menyatakan akan menyesuaikan biaya operasional di jajarannya sebagai upaya membangun kesadaran baru dalam mengelola keuangan.

"Saya ingin mengajak, apa yang diinginkan oleh presiden ini harus dianggap sebagai upaya untuk membangun kesadaran baru, betapa uang rakyat itu harus kita kelola dengan baik. Dan yang kedua, kita harus memperkecil biaya operasional, tapi memperkuat program-program pro rakyat. Semangatnya itu," kata Gus Ipul, Selasa, 4 Februari 2025.

Gus Ipul pun berharap dengan adanya instruksi presiden mengenai refocusing anggaran ini dapat membentuk kesadaran para abdi negara di kementerian maupun lembaga negara dalam menghemat biaya operasional, seperti penggunaan listrik.

"Mudah-mudahan dengan adanya Instruksi presiden ini, kita menghadirkan satu kebiasaan baru untuk melakukan penghematan listrik dan lain sebagainya lewat pembatasan-pembatasan," ucap Gus Ipul.

Gus Ipul juga memastikan program bantuan sosial Kemensos tetap berjalan tanpa pengurangan. Dia menegaskan bansos berpotensi bertambah. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian besar terhadap masyarakat miskin.

"Bansos terus (berlanjut) tidak ada perubahan bahkan akan ditambah dan ini sudah langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat saya menghadap beberapa waktu yang lalu itu," kata Gus Ipul saat rapat pimpinan di Ruang Rupatama Gedung Kemensos, Kamis, 6 Februari 2025.

Presiden Prabowo berkomitmen memastikan masyarakat miskin tetap mendapatkan perlindungan sosial. Oleh karena itu, tidak ada pengurangan target penerima manfaat dalam program

bansos maupun program sosial lainnya yang dikelola oleh Kemensos.

Sejumlah program Bansos yang tetap berjalan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), Program Yatim-Piatu (YaPi), dan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Program-program tersebut berperan penting dalam mendukung program pemberantasan kemiskinan sesuai Asta Cita Presiden.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Kemensos tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat. Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan penghematan tidak akan mengurangi semangat dan kinerja dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Kita harus tetap bekerja keras, semangat tidak berubah, dan tidak cengeng. Kita tunjukkan peningkatan kinerja kita di tengah penghematan," kata Mensos Gus Ipul.

Ia juga meminta seluruh jajaran Kemensos untuk tetap fokus pada pelayanan sosial yang efektif dan mengubah mindset untuk tetap berkinerja optimal meski di tengah efisiensi. Dengan komitmen ini, Kemensos berharap masyarakat tetap tenang dan tidak termakan isu yang tidak berdasar. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan mengorbankan hak masyarakat miskin yang telah menjadi bagian dari program pelayanan dan perlindungan sosial nasional.

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya, mengapresiasi sikap Gus Ipul yang tidak mengeluh dengan adanya efisiensi anggaran kementerian. Menurut dia, Gus Ipul justru segera berupaya mencari cara agar pemangkasan anggaran tidak mengganggu penyaluran Bansos.

"Saya melihat Gus Ipul ini tangguh luar biasa ya.

Jadi ketika yang lain mengeluh ketika ada efisiensi, Gus Ipul ini langsung berpikir bagaimana caranya supaya ini bisa tetap berjalan yang paling penting adalah memastikan anggaran Bansos yang diberikan kepada masyarakat tidak dikurangi. Kemudian juga memastikan



anggaran operasional yang melekat pada Bansos tidak dikurangi dan lain sebagainya," kata Atalia saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kemensos di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

Dalam rapat tersebut, Gus Ipul menyebutkan, ada kaidah yang dilakukan Kementerian Sosial dalam menindaklanjuti efisiensi anggaran berdasarkan Inpres 1/2025. Salah satunya, yakni memastikan tidak mengurangi anggaran bansos.

"Yang pertama, memastikan anggaran Bansos yang diberikan langsung ke masyarakat tidak dikurangi. Bahkan arahan presiden, jika memang memungkinkan akan ditambah. Itu adalah yang untuk rakyat," ujar Gus Ipul.

Kaidah kedua, yaitu memastikan anggaran operasional yang melekat pada Bansos, seperti biaya salur tidak dikurangi. Kemudian, gaji pegawai dan honor pendamping tahun berjalan juga tak bakal dikurangi.

Gus Ipul juga memastikan bahwa re-focusing atau efisiensi anggaran ini tidak akan mengurangi target kinerja dan semangat kerja Kemensos.

"Kaidah ini yang kita pakai. Jadi biar sama persepsinya dulu. Jadi semangatnya tetap, tapi memastikan yang fixed cost, (anggaran) yang memang tidak bisa dikurangi, ya akan tetap kita pertahankan apapun tidak akan mengurangi kinerja kita," tegas Gus Ipul. •



ATASI KEMISKINAN, KEMENSOS GANDENG KAMPUS

Kementerian Sosial terus berupaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu strategi yang dilakukan Kemensos untuk mewujudkan hal tersebut yakni model teritorial.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menjelaskan, dalam model teritorial, Kemensos akan menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi.

"Sejak awal saya bilang ke pak menteri (Menteri Sosial Saifullah Yusuf), graduasi ini, pemberantasan kemiskinan ini supaya jadi atmosfer, kita harus melibatkan

kampus. Karena mereka yang paling legitimate, lembaga yang tidak politis, itu kampus," kata Agus Jabo saat melakukan audiensi bersama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret (IKA UNS) di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.

Dia menjelaskan, alasan lain Kemensos menggandeng perguruan tinggi karena masing-masing kampus memiliki lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Lembaga ini nantinya bakal melakukan kajian terhadap profil kemiskinan serta kebutuhan di suatu desa untuk menjadi rujukan sebagai desa binaan.

"Nanti kita mau ajak kampus. Kampus kan punya lembaga pemberdayaan masyarakat. Kajiannya dari sana, nanti yang melaksanakan Kemensos bersama kementerian-kementerian lain plus swasta. Kita bikin modelling di paling tidak misalnya ke depan itu satu kota/kabupaten ada dua desa (binaan). Itu asesmennya dari kampus," jelas Agus Jabo.

Agus Jabo menyebut, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas presiden. Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto ingin

agar persoalan kemiskinan ekstrem dapat tuntas pada 2026.

"Jadi modelling pengentasan kemiskinan ini konsepnya kan graduasi. Jalan keluarnya (melalui) pemberdayaan," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, pada kesempatan berbeda menyatakan Kemensos mengajak Perguruan Tinggi di Jawa Timur berkolaborasi mengentaskan kemiskinan. Langkah ini tertuang pada pertemuan Kemensos dengan 12 rektor atau yang mewakili dari Forum Rektor Jatim dalam diskusi pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan desa di Kampus UNESA 2 pada 7 Februari 2025. Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Robben menyampaikan Kemensos memprioritaskan pengentasan kemiskinan di tiga provinsi terlebih dahulu. "Ada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tiga Provinsi ini dipilih karena berkontribusi besar dalam angka kemiskinan di Indonesia," kata Robben.

Kemudian soal strategi yang dipilih adalah dengan membangun desa. Untuk itu diperlukan kolaborasi dengan



berbagai pihak. "Untuk itu kami mengajak Universitas/Lembaga dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat sebagai program kolaborasi secara bersama," kata Robben.

Nantinya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang ada di setiap Universitas diharapkan berperan melakukan rujukan dan kajian serta terapan program pengentasan kemiskinan.

"Melalui LPPM akan dikaji, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan ditindaklanjuti secara bersama-sama," ujar Robben.

Robben meyakini jika telah dilakukan kajian, maka program dari Kemensos akan dilandasi perencanaan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Soal kolaborasi, Robben menjelaskan Kemensos sudah melakukan dengan berbagai pihak, di antaranya dengan pemerintah daerah untuk relokasi kampung nelayan yang ada di Indramayu, Jawa Barat, menjadi Kampung Nelayan Sejahtera.

"Kampung Nelayan Sejahtera tidak akan bisa diwujudkan jika tidak ada kolaborasi dengan lembaga lain," kata Robben.

Selain Kampung Nelayan Sejahtera, Kemensos juga bekerja sama dengan pihak lain untuk mewujudkan program Sekolah Rakyat. Tujuan Sekolah Rakyat ini untuk memutus rantai kemiskinan, membentuk agen perubahan dari keluarga miskin, sehingga terbentuk mental dan pola pikir untuk keluar dari kemiskinan.

Kerja-kerja kolaboratif Kemensos dengan berbagai pihak ini mendapat apresiasi dari para sivitas akademika. Mereka pun siap bersinergi. Masing-masing perguruan tinggi memiliki pengalaman dan komitmen dalam pengentasan kemiskinan. Menurut Robben nantinya apa yang telah dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi bisa lebih dikembangkan.

"Sehingga tidak usah memulai dari nol lagi, apa yang telah dilakukan nanti dikumpulkan dalam satu link dan akan kami sepakati kembali. Pertemuan ini memang baru langkah awal namun niat dan semangat bapak ibu semua kami yakin apa yang ditargetkan Presiden akan terwujud," kata Robben.

Pers Ikut Terlibat

Dalam momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Wamensos Agus Jabo Priyono berharap pers dapat berperan aktif menyelesaikan persoalan bangsa dan masyarakat, termasuk kemiskinan.

"Saya secara pribadi berharap supaya media memberikan kontribusi yang sangat besar, ikut terlibat aktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, persoalan-persoalan masyarakat. Dan saat ini yang menjadi problem kita adalah kemiskinan," kata Agus Jabo saat

"Artinya, pers bisa memahami problem-problem bangsanya seperti apa, problem-problem masyarakatnya seperti apa dan jalan keluarnya seperti apa. Dan mereka mencoba mengkonsolidasikan kekuatan," ujar dia.

Dia menjelaskan, pada masa sekarang, masyarakat Indonesia menghadapi masalah kemiskinan. Penanganan kondisi ini pun menjadi tanggung jawab Kemensos. Namun, ia berharap pers dapat berkolaborasi menyelesaikan persoalan tersebut.



menghadiri tasyakuran memperingati HPN 2025 bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Cilegon, Banten, Minggu, 9 Februari 2025.

Agus Jabo mengingatkan, peran media pada masa penjajahan erat kaitannya dengan organisasi pergerakan melawan kolonialisme agar Indonesia bisa merdeka. Insan pers memahami persoalan yang ada dan berupaya mencari jalan keluar.

"Kita berharap ada kolaborasi antara insan pers dengan menyampaikan apa yang dialami oleh bangsa kita ini dan bagaimana kita bisa sama-sama keluar dari lingkaran kemiskinan ini supaya kemudian bangsa kita melompat menjadi bangsa yang adil, bangsa yang makmur, bangsa yang berdikari dan setara dengan negara-negara maju yang lain," kata Agus Jabo. •

AHY PERTIMBANGKAN PEMBANGUNAN LEWAT INVESTASI

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mempertimbangkan kerja sama pendanaan dan pembangunan melalui investasi, baik dalam maupun luar negeri, menyusul adanya efisiensi anggaran kementerian/lembaga.

Menurut Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta, termasuk dengan para investor luar negeri, dapat mendukung pembangunan infrastruktur ke depan.

Adapun pertimbangan itu dilakukan beriringan dengan peninjauan ulang proyek-proyek yang diprioritaskan untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.

"Kami fokus melakukan revisi, penyesuaian-penyesuaian, karena tentunya setelah adanya pengurangan atau efisiensi anggaran tadi, ya, harus segera di-review kembali, apakah yang telah ditargetkan atau ditetapkan itu sudah sesuai atau perlu dilakukan penyesuaian (ulang)," kata AHY di Antara Heritage Center Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

Kemenko Infra sendiri membawahi sejumlah kementerian teknis terkait seperti Kementerian Pekerjaan

Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kementerian Transmigrasi.

Memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur negara, AHY mengakui bahwa pihaknya memerlukan anggaran yang besar untuk mewujudkannya. Namun, AHY memandang efisiensi anggaran K/L saat ini sebagai tantangan untuk lebih bisa menyisir proyek yang dapat mendukung visi pemerintahan periode 2024-2029.

"Ketika kita bicara proyek-proyek infrastruktur, yang kita tahu tidak murah, karena setiap pembangunan infrastruktur, apalagi yang sifatnya proyek strategis, mega infrastructure, itu butuh anggaran yang besar," kata AHY.

"Maka harus kita tata sedemikian rupa, sehingga kami bisa fokus dalam

upaya menghadirkan infrastruktur yang benar-benar mendukung, yang menjadi prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan, energi, air, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita melalui sektor kesehatan dan pendidikan," sambungnya.

AHY pun mengungkapkan pemerintahan berkomitmen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui skema pembiayaan inovatif dan kerja sama dengan lembaga internasional.

"Kami harus memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai jalurnya untuk mendukung visi dan misi Presiden, termasuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen serta mewujudkan keberlanjutan dan kemandirian di sektor pangan, energi, dan air," ujar AHY.

Fokus utama mencakup proyek strategis, pemerataan pembangunan, serta keberlanjutan infrastruktur fisik dan digital guna mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, infrastruktur merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

AHY juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.

"Fokus utama kami adalah mengatasi disparitas antara Jawa dan non-Jawa, serta mempersempit kesenjangan digital, yang masih



menjadi tantangan besar bagi Indonesia,” katanya.

Di tengah tantangan efisiensi anggaran, pemerintah tetap mencari solusi terbaik. AHY mengungkapkan bahwa pemerintah akan membentuk tim kecil guna membahas pengembangan perumahan dan infrastruktur dasar secara paralel untuk memastikan percepatan pembangunan yang signifikan.

Sebelumnya, AHY menerima kunjungan delegasi World Bank, Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan International Finance Corporation (IFC).

Dalam pertemuan tersebut, AHY memaparkan peta jalan pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan, termasuk proyek strategis seperti pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) Jakarta untuk mengatasi penurunan tanah, serta proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Saya optimistis kemitraan ini dapat semakin diperkuat dan melahirkan solusi inovatif yang relevan dengan tantangan di Indonesia,” katanya.

Pihak World Bank, yang diwakili oleh Manuela Ferro dan Hiroshi Matano, menyampaikan dukungan mereka terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Mereka juga menegaskan pentingnya kerja sama pemerintah dan sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur guna mencapai hasil optimal.

Evaluasi PSN

AHY juga menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) guna memastikan kemajuannya telah sesuai dengan tujuan awal pembangunan.

“Bapak Presiden berharap kita review dengan baik, kita evaluasi dengan baik bersama-sama, apakah sudah on the track, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dan progresnya baik atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian,” kata AHY di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.

Dia mengatakan, Presiden Prabowo

Subianto telah menginstruksikan jajaran kabinet untuk meninjau kembali perkembangan lebih dari 280 PSN yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

“Tidak hanya (evaluasi) terkait dengan infrastruktur, karena ini berkaitan dengan ekonomi, (tetapi) berkaitan dengan berbagai elemen mengapa sebuah proyek dikatakan sebagai PSN,” ucapnya.

Dia menyebut evaluasi yang akan dilakukan juga akan mempertimbangkan

nsinya pada penentuan prioritas didapatkan pada keterbatasan anggaran, namun ini juga menjadi pelecut bagi kami untuk mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan infrastruktur yang juga kredibel dan yang kreatif, yang inovatif,” ucapnya.

Dia menambahkan, pembangunan tidak hanya dapat mengandalkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan harus mencari sumber-sumber investasi lainnya.



kan tantangan anggaran fiskal yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan pembangunan PSN tersebut.

Untuk itu, dalam melakukan evaluasi terhadap PSN, dia menekankan pula pentingnya menentukan prioritas proyek serta mencari sumber pendanaan alternatif yang kredibel dan inovatif.

“Semangat untuk pembangunan yang tepat sasaran ini juga konseku-

“Investasi datang dari dalam dan luar negeri yang sekali lagi bisa membantu pemerintah melalui skema-skema yang baik, kerja sama yang baik agar bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Dia berharap pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pemerintah pada akhirnya mampu memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.. •

KADES JANGAN MAIN-MAIN DENGAN DANA DESA

Sejak diluncurkan pada 2015 oleh pemerintah, Dana Desa menjadi salah satu instrumen terpenting dalam pembangunan di Tanah Air.

Dengan besaran bernilai triliunan rupiah pada setiap tahunnya, dana desa diharapkan mampu memperbaiki infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi di desa, dan menyejahterakan masyarakat desa.

Akan tetapi, di tengah harapan yang besar itu, dalam implementasinya, pengelolaan dan penyaluran Dana Desa masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Terkini, persoalan terkait Dana Desa yang tengah menjadi sorotan adalah berkenaan dengan dugaan penyelewengan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap informasi awal mengenai penyelewengan penyaluran dana desa itu. Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan, pihaknya menemukan sejumlah bentuk penyelewengan Dana Desa, seperti di wilayah Sumatera dan Papua. Di dua wilayah itu, ditemukan penggunaan Dana Desa oleh oknum kepala desa (kades) untuk judi online (judol).

Ivan mengatakan temuan penggunaan dana desa untuk judi online itu berkisar antara Rp50-260 juta.

Seusai mendengar informasi awal tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, segera menemui Ivan. Dia mendapatkan penjelasan bahwa temuan terkait penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa dan oknum-oknum lainnya itu terjadi dalam catatan transaksi Dana Desa sejak Januari hingga Juni 2024.

Penindakan tegas adalah hal yang ditekankan Yandri seusai mendengar penjelasan dari PPATK terkait penyelewengan dana desa tersebut. Mantan Wakil Ketua MPR itu menekankan, aparat penegak hukum yang saat ini sudah menjalin kolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan benar-benar menegakkan hukum serta keadilan.

Dia juga melayangkan peringatan keras kepada para kepala desa di Tanah Air agar tidak main-main dalam mengelola dan menyalurkan Dana Desa. Yandri mengingatkan kepada para seluruh kades bahwa Dana Desa adalah dana yang dihadirkan negara untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan di desa. Dengan demikian, sudah sepatutnya kepala desa mengelola dan menyalurkan Dana Desa dengan rasa penuh tanggung jawab.

Selain menjanjikan penindakan yang tegas terhadap segala bentuk pe-



nyelewengan dana desa, Yandri menjelaskan beragam upaya yang ditempuh Kemendes PDT untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyaluran Dana Desa.

"Semua kekuatan untuk memastikan bahwa Dana Desa itu benar adanya, akan kami lakukan," tegas Yandri.

Pencegahan merupakan salah satu elemen penting yang tengah diperjuangkan oleh Kemendes PDT. Yandri mengungkapkan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa masih merumuskan formula agar jejak penyaluran Dana Desa dapat dituangkan dalam suatu pembukuan yang senantiasa bisa dipantau.

Sejumlah desa pun telah menerapkan model prinsip transparansi dalam penyaluran Dana Desa melalui keberadaan papan informasi di balai desa ataupun laman web desa. Dengan demikian, masyarakat pun dapat ikut mengawasi penyaluran Dana Desa. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga ditempuh oleh Kemendes PDT untuk mengoptimalkan pencegahan terhadap penyelewengan dana desa dengan menghadirkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Tingkatkan Pengawasan

Yandri menyampaikan langkah-langkah seperti itu terus diperluas agar transparansi penyaluran Dana Desa menjadi lebih baik. Masih dari sisi pencegahan, langkah lain yang ditempuh oleh Kemendes PDT adalah memperkuat kolaborasi dari beragam pihak dalam mengawal atau memantau Dana Desa. Sejak terbentuknya Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024 hingga paruh awal 2025, Kemendes PDT telah menggandeng dua institusi untuk mengawasi Dana Desa, yakni Kejaksaan dan Polri.

Kedua lembaga pilar penegak hukum di Tanah Air itu berkolaborasi dengan Kemendes PDT untuk membina kepala desa agar mampu mengelola Dana Desa secara baik dan memastikan keberadaan Dana Desa benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan desa.

Untuk memperluas pengawasan penyaluran Dana Desa, Kemendes PDT pun mendorong keterlibatan masyarakat hingga pilar keempat demokrasi, yakni para insan pers. Yandri menegaskan, pihaknya terbuka atas segala laporan dari masyarakat dan wartawan terkait dengan dugaan penyelewengan Dana Desa.

Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, menilai, pengawasan secara terbuka itu sebagai salah satu

Eksekutif Center of Economic and Law (Celios), Bhima Yudhistira, adalah terkait dengan realisasi secara maksimal.

Ketakutan atas adanya kekeliruan dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu kendala yang membuat kepala desa belum optimal dalam merealisasikan belanja dana desa. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Kemendes PDT telah mengatur sejumlah panduan, seperti fokus penggunaan dana desa yang diatur dalam Per-



Semua kekuatan untuk memastikan bahwa Dana Desa itu benar adanya, akan kami lakukan.

langkah penting dalam pengawasan dana desa. Menurutnya, edukasi dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memantau pengelolaan dana desa. Bahkan, pengawasan dari pihak kecamatan dan kabupaten, memang diperlukan untuk mengoptimalkan pencegahan terhadap terjadinya penyelewengan dana desa.

Agar keberadaan dana desa mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan oleh pemerintah, hal lainnya yang juga perlu diperhatikan, sebagaimana pandangan Direktur

aturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 hingga panduan berupa modul.

Dalam Permendes itu, Kemendes PDT memaparkan sejumlah fokus penggunaan dana desa yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa, seperti untuk mendukung agenda perwujudan ketahanan pangan hingga memberantas kemiskinan. Sementara itu, modul yang dihadirkan Kemendes PDT merupakan panduan bagi desa untuk bertransformasi menjadi desa tematik atau desa yang dikembangkan berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Pembinaan dari Kejaksaan Agung pun dihadirkan oleh Kemendes PDT agar kepala desa mampu menyerap dana desa secara optimal dan tepat sasaran.

Kini, total dana desa pada 2025 yang mencapai Rp71 triliun memang menuntut pengawasan secara optimal. Dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dalam mengawal dana desa, harapan untuk desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tentunya bukan sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang dapat digapai bersama-sama. ●

KOLABORASI KUNCI MAJUKAN DESA

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tetap optimis keterbatasan anggaran menyusul kebijakan efisiensi tidak akan mengganggu agenda pemajuan desa selama ada kolaborasi yang solid seluruh elemen bangsa.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memangkas anggaran sebesar Rp1.034.396.000.000 dari total Rp2.192.387.697.000 pada APBN 2025 sebagai tindak lanjut terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Sehingga, anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal setelah diefisiensi menjadi Rp1.157.991.697.000.

“Walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas, dengan kolaborasi berbagai elemen bangsa, saya yakin desa akan semakin berdaya dan maju dengan lebih cepat,” kata Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.

Pria yang akrab disapa Ariza ini menyampaikan, Kemendes PDT saat ini terus memperluas ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian/ lembaga lainnya, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan filantropi dari para pejabat ataupun tokoh-tokoh lainnya, demi memajukan desa.

Menurut mantan Wakil Gu-

bernur DKI Jakarta itu, dengan menggabungkan sumber daya dari berbagai sektor, pembangunan desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejauh ini, Kemendes PDT di bawah pimpinan Yandri Susanto telah menggendeng sejumlah pihak sebagai upaya mempercepat kemajuan desa, antara lain Kejaksaan dan kepolisian dalam mengawasi pengelolaan dan penyaluran dana desa agar penggunaan dana desa tepat sasaran, yakni menghadirkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kemendes PDT juga siap berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghadirkan program 1 Desa 1 TK. Program tersebut untuk memastikan setiap desa memiliki akses pendidikan taman kanak-kanak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh desa di tanah air.

Mendes Yandri optimis, ide untuk menghadirkan satu TK di setiap desa dapat menjadi jalan pembuka dalam menciptakan generasi emas yang siap membawa kemajuan bagi Indonesia.

Ariza juga menekankan pentingnya peran pemuda dalam membangun usaha yang dimulai dari desa. Para pemuda desa didorong untuk berinovasi dan memanfaatkan potensi lokal guna meningkatkan perekonomian.

Ariza memberikan salah satu contoh, yakni berperan aktif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memanfaatkan sumber daya desa sebagai bahan baku. Hal itu dikatakan Riza dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) dan Seminar Nasional di Hotel Habitare Rasuna, Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025.

Dia pun mengajak berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh FKP dan media massa untuk memiliki desa binaan guna mempercepat pembangunan desa. “Kolaborasi antara berbagai elemen bangsa sangat penting untuk memajukan desa, terutama di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Melalui peran aktif pemuda dalam kewirausahaan desa, diharapkan tercipta kemandirian ekonomi serta pembangunan berkelanjutan. Munas FKP 2025 menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemuda, pemer-



intah, dan sektor swasta untuk membangun Indonesia.

Di sisi lain, Ariza juga berpandangan kampus dan media massa harus mempunyai desa binaan guna mempercepat pembangunan desa-desa di Tanah Air.

"Dalam posisi ini saya mengajak seluruh pihak, termasuk kampus untuk ikut serta dalam membangun desa. Setiap kampus harus punya desa binaan, tidak hanya yang memiliki jurusan pertanian atau peternakan, tapi juga semua bidang ilmu," kata dia.

Dia mengungkapkan salah satu strategi Kemendes PDT ke depan untuk membangun desa secara berkelanjutan, yakni melalui kolaborasi multipihak, mulai dari sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan filantropi dari para pejabat ataupun tokoh-tokoh lainnya.

Diketahui desa binaan merupakan desa yang mendapatkan pembinaan dari suatu lembaga, instansi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan, atau organisasi tertentu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di desa tersebut.

Dia mengatakan salah satu kampus atau perguruan tinggi yang telah digandeng oleh Kemendes PDT untuk mempercepat pembangunan desa adalah Universitas Indonesia (UI).

"Saat MoU dengan Pak Rektor UI kemarin, saya sampaikan bahwa bahkan jurusan Sastra Rusia pun harus punya desa binaan," ujarnya.

Dia juga menyampaikan desa merupakan tempat yang ideal bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan, memperkaya pengalaman, serta mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan di perguruan tinggi.

"Sering kali saya berdiskusi dengan para aktivis mahasiswa yang bercita-cita menjadi anggota DPR. Saya bilang, jadi kepala desa dulu lah baru setelah itu ke DPR dan mereka semangat," ucapnya.

Selain mengajak kampus untuk memiliki desa binaan, Ariza juga mengajak media massa untuk berkontribusi membangun desa dengan memiliki desa binaan.

"Media jangan hanya tahu mengkritik, tapi juga harus berkontribusi langsung membangun desa. Media pun harus pu-

nya desa binaan," tambahnya.

Selain melibatkan kampus dan media, Ariza juga mendorong aktivis mahasiswa untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Menurutnya, desa adalah tempat ideal bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan, memperkaya pengalaman, serta mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan di perguruan tinggi.

"Sering kali saya berdiskusi dengan para aktivis mahasiswa yang bercita-cita menjadi anggota DPR atau Dewan. Saya

akan semakin berdaya dan maju dengan lebih cepat," tegasnya.

Ariza juga mengungkapkan rencananya untuk mengajak pejabat tinggi negara yang berasal dari desa agar kembali membangun kampung halamannya. Ia meyakini bahwa pembangunan desa sangatlah penting, mengingat sebagian besar bahan pokok bangsa berasal dari desa.

"Nanti kami akan buat modul panduan untuk para pejabat yang lahir di desa dan saat ini hidup di kota (Jakarta) agar



bilang, jadi kepala desa dulu lah, baru setelah itu ke DPR. Dan mereka semangat," ujarnya.

Dengan keterbatasan anggaran, ia yakin bahwa desa tetap bisa maju asalkan ada kolaborasi lintas sektor yang solid.

"Walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas, dengan kolaborasi berbagai elemen bangsa, saya yakin desa

bisa kembali membangun kampung halamannya. Kalau perlu, presiden pun harus punya desa binaan," terangnya.

Sebagai bagian dari strategi ini, Kemendes PDT juga akan menyediakan panduan digital dan ruang data yang memudahkan pelaporan serta pemanfaatan perkembangan desa binaan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi hexahelix ini. ●



PENERIMA BEASISWA PEMERINTAH DINAS DI WILAYAH TRANSMIGRASI

Kementerian Transmigrasi berencana menempatkan para mahasiswa penerima beasiswa pemerintah, baik luar maupun dalam negeri, untuk berdinamis di wilayah transmigrasi.

Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyatakan, saat ini, beasiswa-beasiswa pemerintah, baik yang diberikan di dalam negeri maupun luar negeri, sering kali tidak memiliki saluran hilirisasi yang tepat. Masyarakat sipil yang menerima beasiswa, baik dalam maupun luar negeri, diharapkan bisa melaksanakan kewajiban 2N+1, namun kenyataannya hal itu belum berjalan maksimal.

Iftitah menyampaikan, Kementerian Transmigrasi berencana menjalin kolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk memastikan penerima beasiswa pemerintah dapat berkontribusi langsung di kawasan transmigrasi.

"Kami beberapa kali sudah berbicara dengan Direktur LPDP dan menyampaikan ke beliau agar beasiswa LPDP ini nantinya akan berkolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi," kata Iftitah dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

Rencananya, para penerima beasiswa ini akan menjalani pelatihan dan penempatan di kawasan transmigrasi dengan skema ikatan dinas.

"Kami berpikir bahwa memberikan beasiswa tanpa memanfaatkan ilmunya untuk negara adalah seperti membangun bendungan tanpa saluran irigasi. Ini

juga adalah bentuk kebocoran anggaran," tambahnya.

Skema baru ini, yang disebutnya sebagai Transmigrasi Patriot, merupakan program unggulan yang tidak hanya menawarkan beasiswa pendidikan di universitas terbaik, tetapi juga pelatihan sebagai komponen cadangan atau tentara cadangan. Para penerima beasiswa ini akan ditempatkan di kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi selama periode tertentu.

"Program ini bertujuan untuk mendukung swasembada nasional, mendorong pembangunan ekonomi, dan menjaga persatuan Indonesia. Kami menekankan prinsip *quality over quantity*, karena meskipun kami sudah menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga di kawasan transmigrasi, hasilnya belum optimal. Kami perlu fokus pada kualitas distribusi penduduk," terangnya.

Skema ini mencakup perkuliahan di

luar negeri yang diawali dengan rekrutmen khusus untuk Transmigrasi Patriot. Selanjutnya, para peserta akan menjalani pelatihan sebagai komponen cadangan selama 2-3 bulan. Sebelum berangkat ke luar negeri, mereka akan ditempatkan di kawasan transmigrasi untuk memahami secara langsung masalah-masalah yang ada di lapangan.

"Setelah itu, mereka akan diberangkatkan ke universitas masing-masing dan setelah menyelesaikan pendidikan, mereka akan ditempatkan kembali di kawasan transmigrasi. Setelah ikatan dinas selesai, mereka akan diberikan pilihan untuk menetap secara permanen di kawasan transmigrasi atau melanjutkan karier sesuai pilihan mereka," katanya.

Untuk perkuliahan di dalam negeri, penerima beasiswa yang sudah mengikuti pelatihan komponen cadangan akan langsung ditempatkan di kawasan transmigrasi.

"Filosofi kami adalah mendekatkan kampus dengan laboratorium lapangannya. Seperti halnya fakultas kedokteran yang selalu ada rumah sakit, nantinya fakultas pertanian, misalnya, akan melakukan perkuliahannya di kawasan transmigrasi, sehingga teori yang dipelajari bisa langsung diterapkan di lapangan," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian Transmigrasi sebelumnya juga telah menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam upaya membangun kawasan transmigrasi yang berbasis sumber daya manusia berkualitas dan teknologi.

Rektor UGM, Prof Ova Emilia, menekankan pentingnya peran UGM dalam mendukung program transmigrasi dengan pendekatan yang komprehensif. Menurutnya, pembangunan tidak akan berhasil jika tidak dimulai dari mengatasi berbagai akar persoalan yang ada di masyarakat.

"Kami sangat siap berkolaborasi untuk mengembangkan kawasan transmigrasi, terutama di sektor-sektor seperti pertanian, peternakan, dan perikanan," ujar Ova pada pertemuan dengan Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanegara, pertengahan Januari lalu.

Sebagai upaya mendukung program pengembangan kawasan transmigrasi ini, UGM menawarkan berbagai inisiatif inovasi kebijakan strategis di bidang transmigrasi. Salah satunya adalah melalui keterlibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik di kawasan transmigrasi. Bahkan, UGM juga membuka peluang pendidikan jarak jauh di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Kami ingin memastikan bahwa tempat bukan halangan untuk belajar, sehingga masyarakat di kawasan terpencil pun bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas," tambah Ova.

Selain itu, UGM melalui Pusat Inovasi

dan manajemen kawasan, sehingga transmigrasi menjadi lebih produktif dan berkelanjutan," jelasnya.

Dia menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk dengan mitra non-APBN. "Kita tidak bisa hanya bergantung pada anggaran negara. Perlu ada kolaborasi dengan mitra swasta dan lembaga internasional untuk mempercepat industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi," ujarnya.

Kedua pihak juga sepakat membahas paradigma baru transmigrasi yang tidak hanya berorientasi pada pemindahan penduduk, tetapi juga menciptakan inklusivitas dan diplomasi budaya.



Agroteknologi (PIAT) di Kulon Progo siap mengembangkan teknologi untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. UGM juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Universitas Cenderawasih di Papua guna memberdayakan masyarakat lokal melalui riset dan teknologi.

"Kami melihat peluang besar untuk mengembangkan kawasan transmigrasi dengan memanfaatkan riset dan teknologi inovatif," ungkap Ova.

Sementara, Iftitah menggarisbawahi tantangan dalam program transmigrasi, terutama terkait dengan ketidaksesuaian antara keahlian penduduk transmigran dan kebutuhan di wilayah baru.

"Transmigrasi bukan hanya soal memindahkan penduduk, tetapi bagaimana menciptakan sinergi antara pendatang dan penduduk lokal. Fokus kita harus pada peningkatan kualitas SDM

"Kita harus membangun kawasan transmigrasi yang tidak hanya produktif, tetapi juga menjadi pusat pertukaran budaya antara pendatang dan penduduk lokal. Dengan cara ini, kita menciptakan kolaborasi yang menggerakkan daerah, bukan kompetisi," ujar Iftitah.

UGM pun berkomitmen untuk terus merancang program pendampingan riset dan pengembangan kawasan transmigrasi secara holistik. "Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan membawa manfaat besar, tidak hanya bagi masyarakat di kawasan transmigrasi, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan," kata Ova.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam membangun kawasan transmigrasi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mempertegas peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional. ●

BERANTAS SINDIKAT PENYALUR PMI ILEGAL

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bakal memberantas sindikat di balik penyaluran calon pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Jika hal itu tidak dihilangkan, masalah perlindungan PMI tidak akan pernah selesai.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyatakan, upaya yang ditempuh KP2MI untuk memberantas sindikat atau kelompok yang menyalurkan CPMI secara non-prosedural itu antara lain dengan pembentukan Tim Reaksi Cepat.

Melalui kerja sama dengan banyak pihak di lintas lembaga, kepolisian, keimigrasian, bahkan tentara, angkatan laut dan lain-lain, tim tersebut dibentuk untuk melindungi para CPMI yang akan bekerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural, yaitu dengan menggagalkan keberangkatan mereka.

Dalam upaya itu, pendekatan tersebut tidak dilakukan untuk

mencegah orang-orang untuk bekerja ke luar negeri, tetapi menargetkan para sindikat di balik pemberangkatan non-prosedural tersebut.

"Jadi, saya bilang sama teman-teman tim saya, pencegahan itu targetnya bukan mencegah orang yang mau bekerja. Target kita adalah pemain di belakangnya, harus dicari," kata dia, kata Karding di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Karding pun mengakui perlunya kerja sama dengan pihak-pihak terkait guna memberantas para sindikat tersebut. "Kami tetap tidak bisa sendiri. Kami butuh teman-teman polisi, kami butuh yang lain. Prinsipnya secara komitmen, kalau kami punya data pasti akan kami berantas karena ini masalah utamanya," kata dia.

Karding menegaskan, terkait kemungkinan adanya oknum di dalam kementerian yang mung-



kin terlibat dalam penyaluran CPMI non-prosedural tersebut, dirinya akan memberikan hukuman yang setimpal.

"Kalau itu oknum dari saya, saya pastikan di zaman saya, enggak saya kasih ampun. Pecat di tempat. Bukan hanya pecat. Kalau ada bukti, saya bawa ke ranah hukum. Karena itu kriminal. Itu enggak ada ampun," tegasnya.

Karding juga menyatakan ingin fokus mengkampanyekan jalur aman bagi calon PMI yang ingin bekerja di luar negeri, sehingga perlindungan terhadap para pekerja migran lebih terjamin.

Karding mengatakan, upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI terus dilakukan. Untuk mencapai hal itu, ada beberapa hal yang dia garisbawahi. Pertama, perlunya mengarusutamakan isu PMI, sehingga isu

rian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal guna meningkatkan pengawasan daerah terhadap warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.

Selain itu, KP2MI akan terus mengedukasi masyarakat tentang cara-cara yang aman untuk bekerja di luar negeri. "Dan sebenarnya tidak sulit juga. Dan kalau lewat resmi, pasti pungutan tidak ada," katanya.

Langkah berikutnya dalam kampanye tersebut, dengan memilih jalur yang aman, maka perlindungan dari negara terhadap para pekerja migran juga akan lebih terjamin. Untuk itu, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi para calon PMI sebelum bekerja ke luar negeri, antara lain perlunya memperoleh izin orang tua atau wali, dan

gan berbagai risiko yang terkadang kami tidak bisa melindungi lagi, karena itu di luar kendali kami. Laut ini kan enggak bisa dikavling, enggak bisa dijaga. Jalan darat juga enggak bisa dipagari semua," katanya di Jakarta, akhir Januari lalu.

Dia mengatakan hal ini menanggapi insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh Agensi Penkuatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Pihaknya mendorong sinergisitas kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk memastikan agar PMI yang berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi.

"Bagaimana sinergi dari semua kementerian/lembaga, terutama pemerintah daerah juga untuk memastikan



Target kita adalah pemain di belakangnya, harus dicari.

tersebut diketahui oleh lebih banyak orang.

Upaya berikutnya adalah dengan memaksimalkan kampanye tentang pentingnya mengambil jalur yang aman bagi para calon PMI yang ingin bekerja di luar negeri, sehingga mereka tidak terjebak pada permasalahan seperti eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan lain-lain.

Untuk itulah, Karding menegaskan kementerannya akan fokus memaksimalkan kampanye tersebut di daerah-daerah kantong di mana terdapat banyak calon PMI. "Daerah kantong itu di mana? Jawa, semua Jawa. Kemudian, NTB, Lampung, NTT, kita fokus di situ," kata Karding.

Untuk memaksimalkan kampanye tersebut, KP2MI terus membangun kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk koordinasinya dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kemente-

juga atas sepengetahuan kepala desa.

Karding juga mengimbau para calon PMI untuk memeriksa kembali kontrak kerja sebelum memutuskan untuk berangkat ke luar negeri.

"Jadi, sebenarnya untuk kebaikan mereka, maka sebelum berangkat dicek dulu kontrak kerjanya seperti apa. Dia keahliannya seperti apa. Dia sehat secara jasmani dan rohani. Itu seharusnya," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, juga menekankan pentingnya PMI berangkat ke luar negeri secara legal untuk mencegah terjadi hal-hal berisiko yang tidak diinginkan.

"Ini sebetulnya pelajaran yang bisa diambil dari hal ini adalah berangkat secara non-prosedural itu penuh den-

warganya itu bisa berangkat dengan jalur yang baik, prosedural," katanya.

Dalam kasus penembakan terhadap lima PMI non-prosedural, pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada otoritas Malaysia untuk meminta investigasi secara menyeluruh terhadap kasus tersebut.

"Nota diplomatik sudah dikirim, itu jadi domain Kementerian Luar Negeri, ya kita tunggu balasan dari pihak Malaysia. Nota diplomatik itu kan sebenarnya meminta agar dilakukan investigasi menyeluruh, dan jika ada pelanggaran dalam hal ini, kekuatan berlebihan yang digunakan, nah itu bisa menjadi satu temuan," kata Christina. ●



IKAN

Gunawan Effendi

Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Tapi, belalang dan ikan sama-sama menjadi usulan pengayaan menu makan bergizi gratis.

Belalang dan serangga lainnya, misalnya laron, bahkan kalong sudah menjadi bahan konsumsi manusia di kawasan Asia Tenggara. Paling tidak, makanan sejenis itu biasanya dianggap pula sebagai obat. Namun, dalam konteks makan bergizi gratis, serangga dan ikan dianggap sumber protein yang mudah diperoleh, dan harganya relatif lebih murah.

Toh serangga sebagai bahan konsumsi akan memunculkan beragam silang-pendapat. Berbeda dengan ikan. Terlebih lagi, wilayah Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas, baik sungai, danau, maupun laut, dengan potensi produksi ikan yang luar biasa.

Sudah bertahun-tahun sebenarnya Indonesia menjadi eksportir tuna dan cakalang terbesar di dunia. Namun, untuk seluruh jenis ikan yang diperdagangkan di pasar global, Indonesia masih berada di luar 10 besar negara eksportir ikan. Jenis ikan favorit di pasar global, selain keluarga tuna, cakalang, dan tongkol, masih ada jenis ikan lain juga udang dan cumi, serta keluarga kepiting.

Mungkin Indonesia belum masuk daftar lima besar negara eksportir ikan di pasar global karena konsumsi dalam negeri yang sebanding dengan jumlah penduduknya. Atau kesanggupan menangkap ikan dan kemampuan budidaya yang masih ketinggalan?

Nah, soal kesanggupan budidaya itu tampaknya yang memicu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menganggap ikan seharusnya bisa menjadi pilihan menu, dalam program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Berbicara sebagai narasumber pada acara Diseminasi Teknis bersama Pembudidaya Ikan Sumatera Barat yang digelar Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam pada Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Padang, Minggu, 27 Januari 2024, Alex berharap, peserta diseminasi teknis yang

mayoritas merupakan nelayan di Kota Padang, memanfaatkan kesempatan ini sebagai penambah pengetahuan dalam berbudidaya ikan air tawar.

Terlebih lagi, kata Alex, Sumatera Barat, memiliki lokasi pelatihan budidaya ikan seluas 30 hektare di Kabupaten Dharmasraya. Di Dharmasraya pula berlokasi sentra produksi pada beririgasi--yang berarti berpotensi menjadi lokasi budidaya ikan air tawar. Sebut saja kawasan transmigrasi Sitiung misalnya.

Di Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Riau dan Kabupaten Bungo, Jambi itu mengalir hulu Batanghari, sungai panjang yang bermuara di Selat Malaka yang memisahkan Sumatera dan Semenanjung Malaya.

Namun, di Selat Malaka itu menyebar pulau-pulau kecil yang menjadi wilayah Indonesia dan kita kenal sebagai Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya adalah kawasan Batam, Rempang, Galang (Barelang). Nah, dalam suasana Tahun Baru Imlek, tradisi masyarakat Kepri yang dikelilingi laut antara lain adalah kebersamaan festival masyarakat Tionghoa

perantauan di wilayahnya hingga Singapura dengan menangkap atau panen ikan dingkis.

Dingkis, dengkis, lingkis atau baronang susu (*Siganus canaliculatus*) adalah ikan favorit warga keturunan Tionghoa di Kepri hingga Singapura. Harap maklum, Barelang ke Singapura pergi pulang melalui jalur laut hanya memakan waktu sekitar 30 menit pergi-pulang dengan kapal bermotor.

Sedangkan untuk nelayan Barelang, terutama kawasan Belakang Padang, tradisi menangkap dan menjual dingkis menjelang Imlek adalah rezeki tahunan yang membuka peluang beroleh penghasilan jutaan hingga puluhan juta rupiah. Dengan bermodal kelong (keramba laut), hasil tangkapan dingkis pada musim Imlek 2025 ini kisaran harganya dapat mencapai Rp300-500 ribu per kilogram.

Tahun baru, gagasan baru, semoga kesehatan dan kesejahteraan menyertai kita semua. Meskipun lain padang lain belalang dan lain lubuk lain ikannya. ●





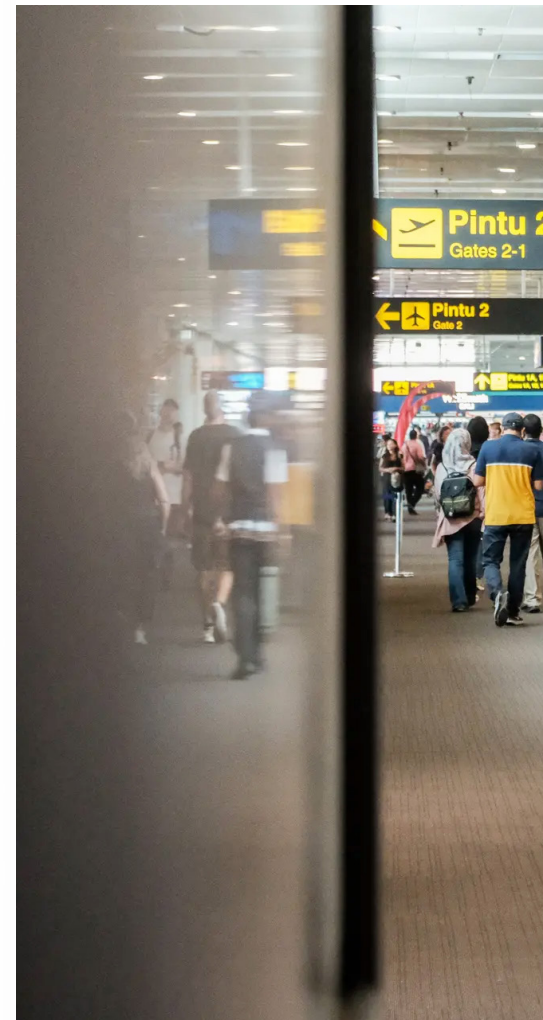
SEKTOR PARIWISATA MULAI PULIH

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2024 memecahkan rekor sepanjang lima tahun terakhir. Momentum yang menjadi peluang untuk pengembangan sektor pariwisata pada tahun-tahun berikutnya.



Secara keseluruhan Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang 2024, total wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia mencapai 13.902.420 orang atau meningkat 19,05 persen dibandingkan dengan angka pada 2023. Toh, ada pula catatan tambahannya.

"Capaian kunjungan wisman 2024 merupakan tertinggi dalam lima tahun terakhir sejak 2020. Namun demikian



masih relatif lebih rendah dibandingkan angka 2019 sebelum pandemi Covid-19 yang 16,106.954 kunjungan," ungkap Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Senin, 3 Februari 2025.

Sedangkan wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung sepanjang 2024 datang dari Malaysia dengan kunjungan mencapai 2,27 juta dan menghabiskan rata-rata US\$693 dalam kunjungan. Disusul oleh wisman asal

Australia yang mencapai 1,67 juta kunjungan dan mengeluarkan US\$1,712, serta Singapura mencapai 1,40 juta kunjungan dan mengeluarkan rata-rata US\$707.

Untuk angka belanja wisman, BPS mengungkapkan wisatawan dari Swiss menjadi pembelanja yang paling banyak pengeluarannya pada 2024. Dengan jumlah wisman mencapai 58.205 kunjungan, wisatawan dari Swiss rata-rata menghabiskan US\$58.205 atau

gan dengan rata rata lama tinggal 12,22 hari,” sambung Amalia.

Plt Kepala BPS yang juga Deputy Bidang Ekonomi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menjelaskan, pengeluaran tersebut paling banyak dibelanjakan untuk akomodasi dan makanan serta minuman. “Secara rata-rata, sepanjang tahun 2024, wisman menghabiskan sekitar 1.391,85 dolar AS selama berada di Indonesia,” ujar Amalia.

luarkan uang untuk akomodasi dan makanan minuman. Pada triwulan IV-2024, proporsi untuk dua jenis pengeluaran tersebut, yaitu akomodasi dan juga untuk makan minum, mencapai 57,49 persen dari total pengeluaran wisman.

Sebelumnya, pada akhir 2024, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana optimistis pencapaian sektor pariwisata di tahun 2024 tidak hanya akan melampaui kinerja per 2023, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan, serta pelestarian alam dan budaya.

“Hal ini sesuai dengan arahan pengembangan sektor pariwisata berdasarkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan prinsip program pembangunan yang mengarah pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan,” kata Menpar Widiyanti dalam “Jumpa Pers Akhir Tahun 2024”, di Balai Rung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.

Sejumlah indikator kinerja sektor pariwisata menunjukkan pertumbuhan yang positif sepanjang 2024. Menpar Widiyanti menyebut antara lain kontribusi PDB pariwisata pada paruh pertama 2024 sebesar 4,01 persen. Angka ini melebihi kontribusi di tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,9 persen.

Untuk wisatawan nusantara (wisnus), Kementerian Pariwisata mencatat jumlah pergerakan pada Januari hingga Oktober 2024 mencapai 839,4 juta perjalanan dan diyakini akan bertumbuh hingga akhir tahun. Angka ini juga sudah mendekati realisasi pergerakan wisnus di tahun 2023 sebesar 839,7 juta perjalanan.

“Sehingga kami optimistis bahwa pencapaian 2024 akan melampaui realisasi tahun 2023. Di tahun 2024 peringkat TTDI Indonesia juga telah berhasil naik 10 angka menjadi peringkat 22 dari 32. Perolehan devisa sektor pariwisata hingga triwulan ketiga tahun 2024 telah mencapai 12,63 miliar dolar AS. Sementara untuk jumlah tenaga kerja pariwisata dari semester 1 sebanyak 24,5 juta orang,”



sekitar Rp 957 juta (Asumsi Kurs Rp 16.455) dalam kunjungannya ke Indonesia.

Selanjutnya, Amerika Serikat dengan pengeluaran US\$2.183, Austria US\$2.175, Belgia US\$2.148 dan Rusia US\$2.113. “Indikator wisman berdasarkan kawasan sepanjang 2024 dari negara Eropa pengeluarannya terbesar dibandingkan kelompok kawasan lainnya. Rata-rata wisman asal Eropa menghabiskan 2.009 dolar AS selama kunjung-

Pada triwulan IV-2024, sambungnya, secara rata-rata pengeluaran wisman mencapai 1.287 dolar AS atau senilai Rp21,16 juta selama melakukan kunjungan di Indonesia. Pada periode yang sama, wisman juga menghabiskan rata-rata sekitar 10,39 malam di Indonesia. Hal ini berarti bahwa rata-rata para turis asing menghabiskan uang untuk berbelanja di Indonesia hingga sekitar Rp2,036 juta per hari.

Wisman paling banyak menge-

• INFO KHUSUS

ungkap Menpar Widiyanti yang akrab disapa Widi.

Sepanjang 2024, pariwisata Indonesia juga menorehkan kebanggaan dengan meraih 67 penghargaan dari 32 organisasi pariwisata dunia. Sementara Kemenparekraf sebagai kementerian juga meraih 7 penghargaan yang diberikan oleh sejumlah kementerian/ lembaga.

Menpar Widi di kesempatan yang sama juga menjelaskan realisasi investasi yang diraih sektor parekraf khususnya untuk periode Januari hingga September 2024. Yakni sebesar 2,4 miliar dolar AS atau setara dengan Rp35,43 triliun yang terdiri dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri.

"Untuk PMA didominasi oleh negara Singapura diikuti oleh Australia, India,

dolar AS, dan jumlah tenaga kerja pariwisata sebanyak 25,8 juta orang.

"Pencapaian-pencapaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Tahun 2025 dipahami sebagai momentum penting untuk membangun fondasi *quality tourism*, sebuah pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai keberlanjutan dan nilai tambah," ujar Widi.

Menteri Widi juga menghadap Presiden Prabowo untuk melaporkan kinerja sektor pariwisata sepanjang 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam laporannya, ia mengemukakan menyebut secara keseluruhan kunjungan wisatawan pada tahun 2024 meningkat sekitar 18 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023.

"Secara keseluruhan pada 2024, jumlah kunjungan wisatawan mencapai

kan dengan Kuartal IV 2023. "Di sisi perjalanan, wisatawan nusantara angkanya mencapai 263,13 juta perjalanan pada Kuartal IV 2024, atau meningkat 23,2 persen jika dibandingkan dengan Kuartal IV 2023," sambung Menpar Widi.

Widi menyebutkan jumlah perjalanan wisatawan dalam negeri—disebut juga wisatawan nusantara—selama 2024 mencapai lebih dari satu miliar, artinya meningkat 22 persen jika dibandingkan dengan angka pada 2023. Menurut dia, pencapaian itu menunjukkan keberhasilan Kementerian Pariwisata menjaga pertumbuhan kunjungan wisatawan ke berbagai daerah di Indonesia.

Pada periode 100 hari tersebut, kata dia, Kementerian Pariwisata mampu menjaga pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dengan angka yang



Jepang, dan Prancis. Sektor usaha yang paling diminati mencakup hotel bintang, restoran, apartemen hotel, bar, dan area permainan," kata Menteri Widi.

Selanjutnya pada 2025, Kementerian Pariwisata mengemban amanah mencapai beberapa target utama. Yakni kunjungan wisatawan mancanegara ditargetkan sebanyak 14,6 juta sampai 16 juta kunjungan, wisatawan nusantara sebanyak 1,08 miliar pergerakan, kontribusi pariwisata ke PDB sebesar 4,6 persen, devisa pariwisata sebesar 19-22,1 miliar

13,74 juta kunjungan, meningkat sekitar 18 persen jika dibandingkan dengan angka yang tercatat pada 2023," kata Menteri Pariwisata Widi kepada media usai menghadap Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

Menpar juga melaporkan kepada Presiden data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Kuartal IV 2024 mencapai 3,37 juta kunjungan, atau tumbuh 10,3 persen jika dibanding-

meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Dalam kesempatan yang sama, Widi juga menilai pertumbuhan angka kunjungan tersebut mencerminkan kepercayaan wisatawan terhadap kondisi dan kebijakan pariwisata Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata juga mengungkapkan optimismenya sektor pariwisata dapat

terus berkontribusi mendukung perekonomian nasional. Pasalnya, sepanjang 2024, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pariwisata mencapai 25,01 juta orang, artinya ada pertumbuhan 2,5 persen jika dibandingkan dengan catatan pada 2023. "Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pariwisata pada tahun 2023 mencapai 24,41 juta orang," ujarnya.

Ia optimistis perkembangan sektor pariwisata dapat terus berlanjut. Selain itu, Menteri Widi pun bertekad meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perkembangan produk domestik bruto (PDB) nasional.

Tak ketinggalan, kalangan bisnis dan investasi mancanegara pun mengamati perkembangan sektor pariwisata Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Catatan Lembaga nirlaba US-Asean Business Council misalnya menyebut sektor pariwisata ASEAN sepanjang 2024 menyak-

buhan substansial di sektor pariwisatanya, melampaui ekspektasi pemerintah dengan lebih dari 35 juta pengunjung pada 2024. Sebagai catatan khusus, Bank Dunia memperkirakan negara itu akan melampaui jumlah wisatawan sebelum pandemi pada 2025. Terlebih lagi, pemerintah Thailand mengusulkan rancangan undang-undang kontroversial untuk melegalkan kasino sebagai strategi untuk lebih meningkatkan pariwisata, dengan harapan bahwa undang-undang baru tersebut dapat meningkatkan wisman hingga 10 persen, meningkatkan pendapatan pariwisata sebesar 120 - 220 miliar baht (US\$3,35 miliar - US\$6,32 miliar) dan menciptakan antara 9.000 dan 15.000 lapangan kerja baru.

Lebih jauh ke Selatan, di Malaysia, kedatangan wisatawan mengalami peningkatan, mencapai 22,5 juta antara Januari dan November 2024, melam-



sikan pertumbuhan berarti di kawasan Asia Tenggara. Toh lembaga ini juga pertumbuhan sektor pariwisata di Filipina dan Myanmar masih bertahap.

Pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia menjadi perhatian khusus karena mencapai angka tertinggi sepanjang lima tahun terakhir. Vietnam dan Thailand juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dengan demikian, perkembangan kawasan juga bermanfaat menjadi pembanding bagi masing-masing negara

Thailand terlihat mengalami pertum-

paui 20,14 juta yang tercatat pada tahun sebelumnya. Singapura tetap menjadi sumber wisatawan terbesar, menyumbang lebih dari 8 juta pengunjung, diikuti oleh Indonesia dengan 3,2 juta dan Tiongkok dengan lebih dari 3 juta pengunjung. Dengan kampanye Visit Malaysia 2026 yang sedang berlangsung, negara ini diantisipasi akan mengalami lonjakan lebih lanjut dalam kedatangan wisatawan tahun ini, yang berpotensi melampaui tingkat sebelum COVID.

Laos dan Kamboja juga mengalami peningkatan yang luar biasa dalam ke-

datangan wisatawan. Laos menyambut lebih dari 5 juta pengunjung pada tahun 2024, menghasilkan pendapatan lebih dari USD 1 miliar. Lonjakan ini sebagian besar didorong oleh Kereta Api Laos-Tiongkok, yang menghubungkan tujuan-tujuan utama seperti Vang Vieng, Luang Prabang, dan Oudomxay, yang menarik sejumlah besar wisatawan Tiongkok ke negara yang terkurung daratan tersebut. Kamboja melaporkan 6,7 juta pengunjung pada tahun 2024, meningkat 22,9% dari tahun 2023. Lima sumber wisatawan teratasnya adalah Thailand, Vietnam, Tiongkok, Laos, dan Amerika Serikat. Kebijakan seperti pengurangan biaya visa telah berkontribusi pada pertumbuhan pariwisata Kamboja, dengan biaya e-Visa turis diturunkan dari US\$36 menjadi US\$30 dan biaya e-Visa reguler dikurangi dari US\$42 menjadi US\$35.

Singapura mengalami pertumbuhan pariwisata yang stabil, dengan 15,3 juta pengunjung tercatat antara Januari dan November 2024, meningkat 12% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Pendapatan pariwisata mencapai S\$14,9 miliar (US\$11,09 miliar) untuk enam bulan pertama tahun 2024, naik 19% dari tahun ke tahun. Acara-acara besar, seperti konser Taylor Swift dan Coldplay, secara signifikan meningkatkan kedatangan wisatawan. Negara ini diperkirakan akan mempertahankan momentum ini dengan berbagai acara besar serupa yang direncanakan pada tahun 2025, yang menandai peringatan 60 tahun kemerdekaan Singapura.

Sebaliknya, Filipina mengalami penurunan jumlah kedatangan wisatawan, hanya menerima 5,9 juta pengunjung dibandingkan dengan target 7,7 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan tajam jumlah wisatawan Tiongkok, dengan hanya 300.000 kedatangan dari yang diproyeksikan sebanyak 2,2 juta.

Di dalam negeri, kinerja sektor pariwisata menunjukkan peningkatan signifikan. Namun, negara-negara di kawasan ASEAN pun mengupayakan hal serupa. Kinerja sektor pariwisata Indonesia pada 2025 tergantung keberhasilan mengatasi tantangan sepanjang tahun berjalan. • Editor: GE



TANTANGAN DAN PELUANG PARIWISATA 2025

Program pemangkasan Anggaran, APBN dan APBD 2025, memang dapat berdampak negatif terhadap sektor pariwisata. Terutama wisata MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) yang mengandalkan anggaran pemerintah.

Simak saja pernyataan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati yang biasa disapa Cok Ace ini, la bilang, tidak semua hotel dan restoran di Bali terkena dampak dari kebijakan tersebut. Misalkan hotel miliknya yang tidak menjadi langganan acara kementerian maupun lembaga pusat.

"Saya punya hotel empat, nggak terpengaruh. Dipotong pun nggak berpengaruh karena tidak pernah dipakai oleh kementerian, pemerintah," ujarnya, Kamis, 13 Februari 2025.

Maksud Cok Ace memang terkait dengan pemangkasan APBN dan APBD yang dapat berdampak negatif terhadap bisnis perhotelan terutama yang men-

gandakan acara-acara MICE dengan pembiayaan oleh pemerintah pusat maupun daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Penjelasan yang lebih gamblang datang dari Ketua PHRI Kabupaten Badung, Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya. Senada dengan Cok Ace, dalam pandangan Suryawijaya, meski kebijakan penghematan anggaran untuk perjalanan dinas dan pertemuan dipangkas, dampak terhadap sektor perhotelan dan MICE di Kabupaten Badung yang bertetangga dengan Kota Denpasar tidak akan terlalu signifikan.

"Ini juga akan berpengaruh tetapi tidak signifikan. Kami akan imbangi dengan tamu FIT (Free Independent Traveler), grup wisata, serta penyelenggaraan

event MICE dari luar," kata Suryawijaya.

la menjelaskan, perkembangan industri pariwisata Bali pada 2025 sedang berada pada momentum pemulihan yang memicu optimisme tinggi dalam menghadapi 2025. Indikasi utamanya, kata Suryawijaya, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali sepanjang 2024 telah melampaui angka sebelum pandemi Covid-19.

"Pada 2019 sebelum Covid-19, jumlah wisatawan mencapai 6,3 juta orang. Tahun lalu, 2024, angka kunjungan telah melampaui, mencapai 6,4 juta wisatawan," ungkap Suryawijaya.

Menurut dia, pertumbuhan jumlah wisatawan pada 2024 ini menunjukkan Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan, baik bagi wisatawan domes-



tik maupun mancanegara. Tren positif ini membuat PHRI Badung yakin pada 2025 akan menjadi tahun yang lebih baik bagi industri pariwisata.

Dengan peningkatan jumlah wisatawan, diharapkan tingkat hunian hotel serta pertumbuhan ekonomi di Bali semakin meningkat. "Kami optimis pariwisata Bali akan terus berkembang, memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tutur pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PHRI Bali itu.

Selanjutnya PHRI Badung akan terus berupaya menarik lebih banyak wisatawan dari segmen bisnis kelas menengah ke atas. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat industri perhotelan dan wisata di tengah tantangan pada tahun berjalan, termasuk pengurangan dan pengetatan anggaran pemerintah untuk pertemuan serta perjalanan dinas.

Perkembangan di Bali yang memang sudah menjadi destinasi wisata global memang kontras dengan pengalaman para pengusaha yang tergabung dalam PHRI provinsi dan kabupaten serta kota lainnya. Katakanlah di Jawa dan Sumatera. Laporan dari berbagai daerah menyebutkan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah ramai-ramai membatalkan reservasi kamar yang mereka

pesan pasca terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Tak pelak PHRI yang menyelenggarakan Musyawarah Nasional Ke-18 di Hotel Royal Safari Garden, Jalan Raya Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, pada 10-11 Februari 2025 akan membincangkan soal efisiensi APBN dan APBD itu. Terlebih lagi, para peserta sudah memaklumi bahwa petahana Ketua Umum PHRI Hariyadi B Sukamdani akan dipilih secara aklamasi untuk masa jabatan periode 2025-2030.

Dalam konferensi pers Munas XVIII PHRI pada Selasa, 11 Februari 2025, Hariyadi mengemukakan bahwa pelaku usaha akan berfokus menggenjot sektor pariwisata, baik dari sisi domestik maupun mancanegara. "Jadi upaya kita untuk meningkatkan pariwisata ini, kami konsentrasi di dua-duanya," kata Hariyadi

la menjelaskan pula, para pelaku usaha berupaya untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman) ke Tanah Air. Ini terkait dengan kecenderungan peningkatan kunjungan wisman sebagaimana catatan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa total kunjungan wisman ke Indonesia sepanjang

2024 mencapai 13,9 juta kunjungan atau naik 19,05% dibanding tahun lalu sebanyak 11,6 juta kunjungan.

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) itu mengatakan, upaya pertama yang akan dilakukan pelaku usaha yakni melakukan komunikasi dengan pelaku industri penerbangan yang tertarik untuk melayani penerbangan langsung ke Indonesia. Salah satu maskapai penerbangan yang tengah dalam penajakan yakni AirAsia. Hariyadi menyebut, maskapai penerbangan asal Malaysia itu diharapkan membuka penerbangan dari Bangkok, Thailand, ke DI Yogyakarta.

Selain itu, pihaknya juga berupaya meminta Jetstar Airways, maskapai penerbangan yang berpusat di Australia, untuk melayani penerbangan dari kota-kota di Negeri Kangguru ke Lombok atau Labuan Bajo. "Nanti kita akan lihat kemungkinannya seperti apa, karena juga terkait dengan status bandara," ujarnya.

Kedua, meningkatkan partisipasi di travel mart, acara pameran perjalanan yang mempertemukan buyer dan seller di bidang pariwisata. Hariyadi mengungkapkan bahwa pada tahun ini Indonesia akan melakukan dua jenis travel mart yakni Wonderful Indonesia Tourism Fair yang akan digelar pada 5 Oktober 2025

• INFO KHUSUS

dan berpartisipasi dalam pameran di Utrecht, Belanda pada November 2025.

Untuk domestik, Hariyadi mengungkapkan bahwa asosiasi pariwisata akan mendorong pameran yang digelar di delapan kota. Pameran ini bertujuan untuk menarik minat wisman maupun wisatawan nusantara (wisnus). Toh Hariyadi belum merinci kota mana saja yang akan menggelar pameran tersebut.

Upaya lainnya yakni gencar melakukan promosi. Alasannya, minimnya anggaran promosi menjadi tantangan bagi sektor pariwisata, pihaknya berupaya melakukan promosi menggunakan digi-

perekonomian bangsa di masa depan. "Kita harus bisa, kita harus menunjukkan kepada masyarakat, kepada bangsa ini bahwa pariwisata adalah prioritas," ujarnya.

Ia mengemukakan, setiap adanya dukungan dari pemerintah sangat berarti untuk memajukan sektor pariwisata, terutama dalam rangka bersaing dengan negara lainnya seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia. Terlebih saat ini geopolitik dunia sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ia mencontohkan dengan terpilihnya Presiden AS Donald Trump yang mulai memperketat

sebagai semacam 'aksesori' tambahan dalam pembangunan bangsa. "Saya yakin dengan tekad kita bersama, kita akan bisa menyamai negara-negara peer (teman) kita," ujar dia.

Dari sisi pemerintah, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Rizki Handayani Mustafa mengemukakan, tidak mungkin pariwisata Indonesia maupun sektor turunannya bergantung terus-terusan terhadap belanja pemerintah. Diperlukan sumber-sumber baru yang dapat meningkatkan kinerja sektor pariwisata nasional.



tal marketing. Dia mengakui pada situasi normal saja anggaran untuk promosi sangat minim, ditambah lagi dengan adanya pemangkasan anggaran yang kian memberatkan sektor pariwisata dalam melakukan promosi.

"Jadi problem paling utama dari kami sebetulnya adalah lebih kepada anggaran. Kalau yang lainnya kami bisa atasi tapi untuk anggaran khususnya promosi kami menghadapi kendala," ujarnya.

Soal dukungan dari negara, dalam pembukaan Munas, Hariyadi juga menyerukan pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas untuk mendorong pertumbuhan

sejumlah kebijakan membuat banyak pihak menjadi takut.

Di Indonesia sendiri, katanya, negara sedang mengalami kekhawatiran soal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mendapat banyak tekanan dari berbagai sisi. "Hal ini yang harus kita jawab dengan baik, tantangan ini. Kami yakin rekan-rekan dari stakeholder pariwisata lainnya mempunyai resiliensi tinggi yang tangguh, kuat dan tabah dalam menghadapi semua rintangan yang ada," kata dia.

Oleh karena itu, Hariyadi menggagas sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas secara politik, bukan dijadikan

Kemenpar pun sedang menggodok rencana pengembangan sejumlah segmen wisata baru, seperti wellness atau wisata kesehatan/kebugaran, gastronomi atau perjalanan yang berhubungan dengan makanan ke suatu daerah, serta wisata bahari.

Rizki menjelaskan, ketiga segmen yang disebutkan tadi pada dasarnya memiliki cakupan yang luas. Sebagai contoh, wellness tidak hanya berkaitan dengan kegiatan seperti spa, melainkan juga kegiatan lain yang berbalut rekreasi seperti berendam di air panas atau yoga.

Begitu juga dengan wisata bahari. Segmen ini bisa dimaksimalkan dengan

mengembangkan paket wisata boat-ing, diving, hingga yacht. "Indonesia sebenarnya sudah ada segmen-segmen wisata tersebut, tapi belum diperbesar dan dikemas dengan lebih baik," ungkap Rizki saat Munas PHRI 2025, Selasa (11/2).

Pengembangan segmen wisata baru ini ditujukan untuk menjawab tantangan perubahan perilaku para wisatawan di Indonesia. Harapannya, segmen baru ini dapat menjaring lebih banyak wisatawan lokal dan mancanegara untuk berwisata di Indonesia. Untuk itu, diperlukan dukungan berupa investasi yang

dikembangkan saja dari fasilitas yang ada," ujarnya

Pengembangan segmen wisata baru ini diharapkan bisa menekan risiko menurunnya okupansi perhotelan akibat kebijakan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga. PHRI menyebut, pangsa pasar hotel di Indonesia cukup didominasi oleh pelanggan pemerintah dengan porsi 40%. Dengan adanya pemangkasan anggaran, maka ada potensi kehilangan pendapatan hotel berbintang 3 sampai 5 di seluruh Indonesia sekitar Rp 24,5 triliun.

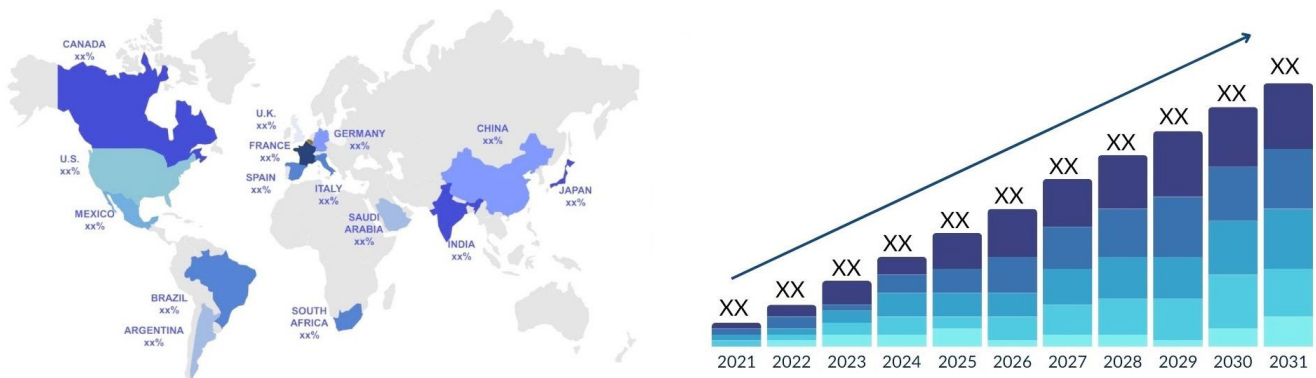
Sedangkan Wakil Menteri Pariwisata

berperan penting dalam upaya pengembangan pariwisata, dan merupakan mitra pemerintah dalam membangun sektor pariwisata. "Sepanjang 56 tahun usia PHRI, organisasi ini sudah menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam membangun dan menguatkan sektor pariwisata," kata Ni Luh yang menyebut PHRI berkontribusi besar dalam upaya menarik wisatawan untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Indonesia.

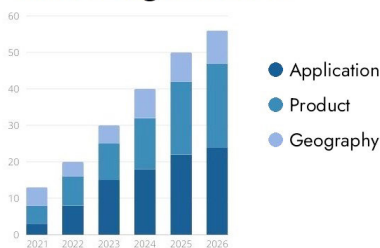
Sedangkan PHRI menegaskan komitmen perhimpunan ini untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan

Global Mice Market Size and Scope

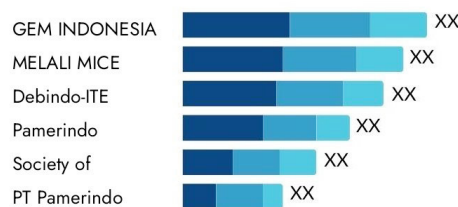
MARKET RESEARCH INTELLECT



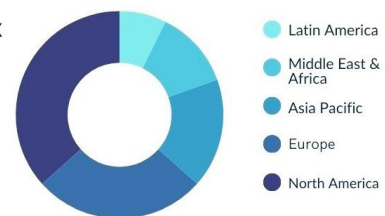
Market Segmentation



Top Key Players



Regional Analysis



Source : www.marketresearchintellect.com

tidak hanya menyasar pada infrastruktur saja, melainkan juga investasi yang berkaitan dengan produk pariwisata itu sendiri, termasuk pengembangan biro perjalanan.

Menanggapi gagasan itu, Hariyadi menyampaikan, para pelaku usaha perhotelan siap mendukung langkah pemerintah yang hendak mengembangkan segmen wisata baru. Bahkan, sebenarnya sudah banyak hotel di Indonesia yang memiliki fasilitas untuk mengakomodasi kebutuhan wisata seperti wellness, gastronomi, dan bahari. "Jadi, untuk investasi, kami tidak perlu mulai dari nol lagi. Tinggal

Ni Luh Enik Ermawati mengajak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya memajukan sektor pariwisata Indonesia. "Kami sangat membutuhkan peran dan kolaborasi dari PHRI untuk menyiapkan dan membangun sumber daya manusia profesional untuk dapat menghadirkan pelayanan berkualitas, kemudian memperkuat program positif pariwisata, dan meningkatkan daya tarik Indonesia di mata dunia," kata Wamen Pariwisata Ni Luh dalam pernyataan resmi, Rabu, 12 Februari 2025.

Dia mengemukakan bahwa PHRI

usaha pariwisata. "Kami berkomitmen untuk senantiasa membantu pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata, untuk bersama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan pariwisata Indonesia," katanya.

Momentum pengembangan pariwisata Indonesia sedang menunjukkan tren positif. Ketidakpastian geopolitik global yang dapat memicu perjalanan dan belanja wisata dari berbagai segmen sebenarnya merupakan peluang lebih besar dibandingkan dengan masalah penghematan APBN dan APBD. Kita lihat saja sepanjang 2025. • Editor: GE



MERAIH TARGET PARIWISATA BERSAMA EFISIENSI ANGGARAN

Dampak negatif efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah tetap menjadi kekhawatiran sebagian pemangku kepentingan pariwisata. Toh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan target-target pencapaian sektor pariwisata masih akan seperti sebelum efisiensi anggaran.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana justru menegaskan, proyeksi target sektor pariwisata Indonesia pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya masih seperti sedia kala sebagaimana sudah dikemukakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sedangkan jajaran kementeriannya, kata dia, tetap optimistik target-target itu akan tercapai sesuai dengan kinerja sektor pariwisata yang menunjukkan pemulihan pada 2024.

"Mengenai proyeksi target, target itu telah ditentukan oleh Bappenas, kami tidak menentukan target sendiri. Kami tidak melakukan proyeksi target baru karena kami optimistis bisa sampai dengan target tersebut," kata Menpar Widiyanti dalam rapat kerja dengan Komisi VII

DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

Sejumlah target pengembangan sektor pariwisata sudah terpatok pada 2025. Misalnya sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 4,6 persen, naik dari 3,8 persen dari pencapaian pada 2023. Sedangkan devisa dari sektor ini pada 2025 diproyeksikan mencapai kisaran 19-22,1 miliar dolar AS. Selanjutnya, target angka kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025 berada di kisaran 14,6-16 juta dibandingkan dengan 13,9 juta pada 2024. Selain itu, target lainnya, lanjut Menteri Widi, antara lain 1,08 miliar perjalanan wisatawan nusantara.

Dari sisi daya serap tenaga kerja, sektor pariwisata diproyeksikan dapat mempekerjakan sekitar 25,8 juta orang tenaga kerja pariwisata pada 2025. Bersamaan

dengan itu, proyeksi lainnya adalah peringkat Travel & Tourism Development Index Indonesia naik dari peringkat 22 dunia pada 2024 setelah sebelumnya melonjak dari peringkat 32 pada 2023.

Sebelumnya, pada akhir 2024, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan wisatawan sangat bisa diandalkan sebagai penyangga perekonomian Indonesia. "Kita tahu bahwa wisatawan telah memberikan efek pengganda yang besar bagi perekonomian Indonesia. Jadi baik wisatawan internasional, wisatawan domestik itu justru sangat bisa kita andalkan sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi kita. Kalau memang itu menjadi faktor penyangga dalam perekonomian kita, maka kita juga harus memberi perhatian yang

baik kepada sektor ini,” ujarnya dalam acara CORE Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu, 23 November 2024.

Menurut Menteri PPN, sektor pariwisata menjadi demikian penting perannya dalam perekonomian nasional. “Karena itulah, maka pemerintah sekarang juga tidak hanya memberikan perhatian pada sektor pariwisata, tetapi juga menugasi khusus sektor pariwisata hanya membidangi kepentingan pariwisata,” ungkap Menteri Rachmat.

Sedangkan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa melampaui lima persen. Ini berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang menargetkan peningkatan nilai devisa pariwisata sebesar 22,10 miliar dolar AS dan kontribusi pariwisata terhadap PDB naik menjadi 4,6 persen.

Ia meyakini target tersebut bisa tercapai. “Pariwisata itu luas, mencakup transportasi, akomodasi dan atraksi. Jika semuanya digabungkan, mungkin kontribusinya bisa lebih dari 5 persen atau sekitar Rp1.044 triliun (PDB 2023: Rp20.892 triliun),” kata Huda.

Menurut dia, yang terpenting adalah dampak positif bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Salah satunya dengan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan memperhatikan kearifan lokal, seperti memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu, perbaikan regulasi juga perlu dilakukan. Contohnya, terkait aktivitas online travel agent (OTA) asing yang kerap membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak komisi kepada hotel. Toh Nailul menekankan penyusun regulasi hendaknya memahami seluk-beluk pariwisata. “Itu harus diatur ulang, siapa sih yang memungut, siapa yang dipungut dan siapa yang membayar ke pemerintah. Itu harus clear terlebih dahulu oleh pemerintah,” ujar dia.

Sedangkan pengamat pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menyebut masih banyak OTA yang beroperasi tanpa mematuhi aturan lokal, seperti tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) dan tidak dikenakan pajak. Kondisi ini menciptakan

ketidakadilan di pasar lantaran pelaku usaha lokal menanggung beban pajak.

Chusmeru menganggap isu ini perlu menjadi prioritas dalam program 100 hari kerja Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, yang tidak hanya akan melindungi pelaku usaha lokal tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih adil. Ia juga menyoroti perlunya anggaran yang lebih optimal untuk promosi pariwisata, yang selama ini lemah karena keterbatasan anggaran.

Selain itu, pemerintah diharapkan fokus pada pariwisata berkualitas dan regeneratif, yang tidak hanya mengejar jumlah kunjungan tetapi juga kualitas wisatawan yang berdampak positif bagi ekonomi lokal. “Pariwisata harus menjadi bagian dari peradaban yang membawa

Sebagai perbandingan, di Australia angkanya sudah melampaui 5.100 dolar AS. Sedangkan di Thailand 1.610 dolar AS, Singapura 1.060 dolar AS. Sementara di Indonesia baru 1.050 dolar AS.

“Oleh sebab itu, pada 2029, kita menginginkan kontribusi pariwisata bisa menghasilkan devisa nasional menjadi 32-39 miliar dolar AS, tenaga kerjanya (di sektor pariwisata) menjadi 29 juta orang, kontribusi PDB-nya (Produk Domestik Bruto) menjadi lima persen, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakatnya meningkat (14,4 persen),” kata Deputy Kepala Bappenas yang akrab disapa Winny pada Kamis, 21 November 2024.

Dalam lima tahun mendatang, rata-rata pengeluaran wisman turut ditarget-

No	Indikator	Satuan	2022		2023		2024	
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1	Nilai Devisa Pariwisata	Miliar USD	5.78	5.00-6.00	5.80	5.00-6.00	7.00	7.00
2	Target 10 Destinasi Prioritas	%	5.75	6.00	5.80	6.00	6.00	6.00
3	Indikator keberlanjutan pariwisata	Skala	5.80	6.00	5.80	6.00	6.00	6.00
4	Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata	Pengukuran	5.80	6.00	5.80	6.00	6.00	6.00
5	Indikator Keberlanjutan Pariwisata	Pengukuran	5.80	6.00	5.80	6.00	6.00	6.00
6	Indikator Keberlanjutan Pariwisata	Pengukuran	5.80	6.00	5.80	6.00	6.00	6.00

kemakmuran bagi rakyat,” ungkapnya.

Sedangkan Deputy Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengemukakan, pentingnya peningkatan devisa selain jumlah kedatangan wisatawan mancanegara. Terlebih, untuk dua hal ini Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga sekawasan semisal Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Menurut dia, rata-rata total devisa dari sektor pariwisata Indonesia belum mencapai 20 miliar dolar AS per tahun. Sementara Thailand, sambungnya, sudah mencapai 64,3 miliar per tahun.

Ihwal pendapatan devisa ini juga dapat dilihat dari angka belanja rata-rata per kunjungan wisatawan mancanegara (average spending index per arrival).

kan 1.600 per dolar AS, nilai investasi pariwisata Rp88,7 triliun, hingga kontribusi 13 Destinasi Pariwisata Prioritas/DPP (10 DPP plus tiga destinasi regeneratif) Rp49,1 triliun.

“Jadi 10 destinasi pariwisata prioritas ini terkenal dengan nama 10 Bali Baru, ini melanjutkan dari periode sebelumnya karena di 10 DPP sudah ada. Kami selesaikan di tahun ini integrated tourism master plan di masing-masing 10 DPP. Tetapi, kami tidak berhenti di 10 DPP, ada kita sebut plus tiga destinasi regeneratif yaitu Bali, Kepri (Kepulauan Riau), dan DKI Jakarta. Ini yang sebenarnya sudah menjadi sasaran besar para kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, tetapi ini harus kita regenerasi, harus kita tata ulang supaya

lebih optimal,” ungkap Winny.

Regenerative tourism adalah konsep yang melampaui pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) tradisional dengan fokus pada pemulihan dan regenerasi lingkungan serta masyarakat lokal. Tujuan utamanya adalah meninggalkan destinasi yang lebih baik daripada kondisi awalnya. Salah satu yang mengkampanyekan konsep regenerative tourism adalah Anna Pollock melalui perusahaan konsultan pariwisata Conscious Travel.

Dalam era perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang terus meningkat, regenerative tourism menjadi solusi yang penting untuk mengurangi dampak negatif pariwisata dan memperbaiki kerusakan yang terjadi sebelumnya.

Berkaitan dengan itu, Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah atau akrab disapa Erma, meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengevaluasi industri pariwisata di Bali secara menyeluruh.

Selain itu, dia mengatakan bahwa solusi yang komprehensif dibutuhkan untuk mengatasi persoalan industri pariwisata di Bali. Terlebih Bali merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. “Cek juga regulasi-regulasi lokal. Apakah sudah cukup untuk mencegah berbagai persoalan-persoalan yang muncul?” ujarnya.

Ia mencontohkan bahwa salah satu regulasi yang perlu ditinjau kembali adalah mengenai ketentuan investor asing atau warga negara asing (WNA) yang memiliki uang Rp10 miliar dapat berinvestasi. Menurut dia, regulasi tersebut berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat di antara investor asing, dan mengesampingkan peran masyarakat lokal.

Lebih dari ketentuan atau aturan lokal, seiring dengan program efisiensi anggaran, Komisi VII DPR RI memprioritaskan usulan elemen pariwisata di Bali dalam proses perumusan RUU Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

man luas dalam mengelola pariwisata,” ungkapnya, Kamis, 13 Februari 2024 di Kabupaten Badung, Bali.

Menurut Saleh yang juga ketua tim panitia kerja, pengalaman Bali dalam mengurus pariwisatanya terlihat dari keaktifan asosiasi mereka, bahkan dalam kunjungan kerja ini hadir 23 perhimpunan khusus pariwisata di Bali. “Mereka punya asosiasi yang banyak, ada asosiasi perhotelan, rental, vila, kemudian paguyuban pariwisata, itu menurut saya satu modal yang perlu kita dengar, pengalaman mereka selama ini,” ujarnya.

Komisi VII DPR RI menyimpulkan, dari pertemuan ini mereka tidak hanya menyerap usulan rumusan untuk RUU Kepariwisata, namun juga mendapati fakta-fakta keluhan kesah dalam mengelola pariwisata. Jika berkaca dari undang-undang yang sudah ada, perhimpunan pariwisata sebagian mengembangkan ide-ide mereka, ada pula yang merasa sejumlah aturan sudah cukup.

“Kami berharap masukan tadi bisa jadi referensi dan juga rekomendasi untuk membangun undang-undang ke depan, masukan-masukannya juga lengkap, ada yang membahas perizinan, ada membahas soal destinasi wisatanya, adat istiadat, alam, saya kira lengkap jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa berjalan lebih cepat,” ujar Saleh.

Dalam usulannya kepada dewan, Dispar Bali banyak menyinggung soal perlindungan terhadap alam, perkembangan jenis-jenis usaha pariwisata, hingga pendataan organisasi dan tenaga kerja pariwisata. Rangkaian usulan muatan untuk RUU Kepariwisata dari Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali Tjok Bagus Pelayun, sekurangnya mencakup 13 pasal dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 yang perlu diubah atau ditambahkan narasinya.

“BAB III Pasal 8 saya usulkan tambahkan memupuk rasa cinta alam dan lingkungan, BAB IV Pasal 13 belum menyentuh alam, padahal alam perlu dijaga, dan Pasal 27 perlu ditambahkan definisi kawasan penyangga, apa sih kawasan penyangga ini?” ujarnya.

Efisiensi anggaran ternyata tetap dapat seiring dan sejalan dengan semangat mengembangkan sektor pariwisata Indonesia. Pertanda peluang masih lebar terbuka. • Editor: GE



Erma menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi sejumlah persoalan kepariwisataan di Bali dalam beberapa waktu terakhir, seperti aksi kriminal atau perampokan terhadap warga negara Ukraina maupun penutupan Kampung Rusia. “Pascapandemi, angka kunjungan khususnya turis asing di Bali naik. Ini merupakan potensi yang harus dimaksimalkan,” kata Erma menjelaskan salah satu alasan evaluasi perlu dilakukan, seperti disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 2 Februari 2025.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan terdapat empat daerah kunjungan kerja yaitu Bali, Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

Namun, sambungnya, Bali diutamakan, sebab Pulau Dewata adalah destinasi internasional dengan banyak pengalaman kepariwisataan. “Bali ini kenapa jadi prioritas kunjungan karena kita tahu Bali bukan hanya destinasi wisata nasional tapi juga destinasi internasional, sudah sangat dikenal di luar negeri, nah mereka yang di Bali ini punya pengala-

info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



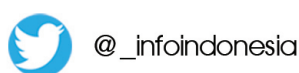
*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786

BAHLIL BIKIN RAKYAT NGEGAS

